Edisi Revisi

Sabirin, S.Sos.I., M.Si.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Kata Pengantar
Dr. A. Rani Usman, M.Si
(Pakar Komunikasi Antar Budaya dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry periode 2012-2016)

Scanned by CamScanner

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sabirin, S.Sos.I., M.Si.

Kata Pengantar:
Dr. A. Rani Usman, M. Si

PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Hak Cipta Pada Penulis
All rights Reserved

ISBN: 978-602-9276-52-7

- Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), April 2015.
viii + 112 hlm. 16 x 24 cm.
Edisi pertama buku ini (2012) diterbitkan oleh Arraniry Press
dan Lembaga Naskah Aceh (NASA)

Penulis : Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
Editor : Masrizal, S.Sos.I., MA.
Layout/Tata letak : LKASGroup

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jomblangan Gang Ontoseno Blok B No. 15 Rt 12/30
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 9494 558
Email/FB: psambiru@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt Tuhan seru sekalian Alam. Dengan berkat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah ini dalam bentuk buku, yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal", sebagaimana yang ada ditangan anda sekalian.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada nabi Muhammad saw yang telah mengantarkan manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berperadaban. Tidak lupa pula penulis sanjung-sajikan selamat sejahtera kepada para ahli waris dan sahabat beliau sekalian, serta para a'lim ulama baik ulama mutakaddimin maupun ulama mutaakhirin sebagai pewaris risalah kenabian, yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan Kalimatul Haq; "Laa Ilaahaa Illallah, Muhammadur Rasulullah" sehingga sampai hari ini dapat dirasakan manfaatnya.

Dasar tulisan sederhana ini merupakan karya tulis ilmiah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pascatsunami Berbasis Meunasah yang telah mengantarkan penulis mendapatkan gelar Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga sangat pantas penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada Dr. Syaifan Nur, M.A. yang tidak bosan-bosannya membimbing, meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk memberikan kritikan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis yang kemudian menjadi buku ini. Terima kasih juga kepada Dr. Waryono, Dr. Phil. Sahiron, dan Asep Jahidin, M.Si yang sangat teliti dan kritis dalam menguji dan memberikan penilaian terhadap karya tulis ini. Juga kepada pihak lainnya yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Ucapan senada juga penulis tujukan kepada pihak Canadian International

Development Agency (CIDA) Ibu Annie Yoesoef (office manager, Mc Gill Jakarta office), PIC IAIN Ar-Raniry Bapak Auni Lutfi, M.A dan staf atas dukungannya. Tidak lupa juga untuk segenap warga gampoeng Rima Keuneurom, atas kerja samanya dalam kebersamaan kita.

Penulis juga menyampaikan ta'zim teriring do'a kepada kedua orangtua tercinta, Maneh Mahmud, S.Ag (alm) yang tidak sempat melihat karya anaknya dan Ainol Mardhiah ibunda tersayang yang telah mengantarkan anaknya seperti saat ini. Eva Setiawati, S. Pd istri tercinta yang senantiasa mendukung dan mendorong suaminya untuk terus berkarya, moga ini menjadi hadiah untuk buah hati tercinta, Zakia Sabra.

Terima kasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. A. Rani Usman, M. Si, yang telah mendukung terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini, baik cetakan pertama maupun cetakan kedua (revisi) sebagaimana yang ada di tangan pembaca sekalian. Terima kasih atas segala bantuan yang diberi kan, semoga amal baiknya mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah swt.

Penulis menyadari, buku ini adalah karya sederhana yang barangkali masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan konstruktif sangatlah kami harapkan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama sebagai bahan bacaan dan bahan diskusi dalam memperkaya khasanah keilmuan kita, amin.

Banda Aceh, 27 Januari 2015
Hormat Penulis

Sabirin

PENGANTAR

Dr. A. Rani Usman, M. Si

(Pakar Komunikasi antar Budaya dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Periode 2012-2016)

Kehadiran buku ini sudah selayaknya kita syukuri dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang selalu menjadi dambaan setiap pribadi, komunitas dan Negara-Bangsa tentunya. Dalam pembangunan generasi bangsa, sangat dibutuhkan sentuhan tangan-tangan terampil dalam menggapai kesuksesan. Tidak hanya berorientasi pada hasil, namun lebih jauh hendaknya juga berorientasi pada proses untuk mencapai sebuah cita-cita yang didambakan, berupa masyarakat etis sebagaimana telah digambarkan dalam dalam Al-Qur'an yaitu *baldatun thaiyibatun warabbul ghafur*, yang juga disebut dengan masyarakat Madani.

Kehadiran buku ini menjadi sangat menarik mengingat ide yang disampaikan dalam buku ini adalah pembangunan (pemberdayaan) masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep kearifan lokal (*local wisdom*), sehingga dalam proses yang dijalankan akan mendapat respon positif dari masyarakat dan tentunya diikuti dengan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Dalam tulisan yang tergolong cukup sederhana ini, sabirin dengan *back ground* keilmuan *community development*nya mencoba mengangkat pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal sebagai sebuah pendekatannya, dalam buku ini meunasah diposisikan sebagai media pemberdayaan yang cukup baik dalam menggerakkan masyarakat di komunitas gampong (desa). Buku ini juga memperlihatkan betapa kearifan lokal menjadi sangat penting diperhatikan oleh para pihak yang terlibat pemberdayaan di suatu komunitas.

Think globally act locally (berfikir global bertindak secara lokal), inilah semangat yang terkandung dalam buku yang saya pikir sangat berharga bagi kita semua. Setting lokasi yang diambil di sebuah gampong yang

ada di Aceh, namun mampu memberikan gambaran yang sama terhadap beberapa daerah lainnya di nusantara bahkan di dunia. Karena masyarakat dimanapun ia berada dengan beragam budaya, latar belakang pendidikan maupun secara letak geografis berbeda. Namun ada satu hal yang sama, yaitu semua daerah itu memiliki keunikan dan perbedaan dengan daerah lainnya yang kemudian kekhususan ini desebut dengan kearifan lokal.

Apresiasi kami kepada penulis, semoga akan ada tulisan lainnya setelah ini. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa buku ini layak anda miliki, dan anda yang berhak menilainya.

Banda Aceh, 10 September 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii
PENGANTAR
Dr. A. Rani Usman, M. Si v

BAB I
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Kajian Pustaka.....7
C. Kerangka Teori 10
D. Metodologi.....13

BAB II
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEUNASAH.....19
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 19
B. Masyarakat dalam Pemberdayaan 21
C. Pemberdayaan dalam Masyarakat Aceh.....22
D. Pengertian *Meunasah*.....25
E. Kedudukan, Fungsi, Struktur dan Manajemen *Meunasah* dalam Sejarah Aceh 29
1. Kedudukan dan Fungsi Meunasah.....29
2. Struktur *Meunasa*h 30
3. Manajemen *Meunasah* dalam Sejarah Aceh.....35
F. Hubungan Sinergi *Meunasah* dengan Masjid dan *Dayah* 36

BAB III
MEUNASAH BAGIAN DARI KEARIFAN LOKAL.....45
A. Meunasah dalam Defenisi Kearifan Lokal.....45
1. Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan.....50
2. Efektivitas Bantuan Asing Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.....53
B. Pemberdayaan Masyarakat Pascatsunami.....59
1. Bidang Agama, Sosial dan Budaya.....67
2. Bidang Ekonomi.....70
3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan.....74

BAB IV
MEUNASAH DULU DAN SEKARANG.....79
A. Sekilas Gampong di Aceh; Menilik Rima Keneurum.....79
1. Gambaran Geografis.....80
2. Keadaan Penduduk.....84
3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan.....87
4. Keberadaan LSM.....91
B. *Meunasah* di Masa Tradisional dan Saat Ini.....92
1. *Meunasah* sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat.....93
2. *Meunasah* Sebagai Pusat Keagamaan.....95
3. *Meunasah* Sebagai Tempat Pendidikan.....96
4. *Meunasah* Sebagai Pusat Sosial-Kebudayaan.....96
5. *Meunasah* Sebagai Basis Perekonomian.....98
6. *Meunasah* Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat.....99

BAB V
PENUTUP.....101
A. Kesimpulan.....101
B. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA.....105
BIOGRAFI PENULIS.....111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meunasah di Aceh merupakan lembaga sosial yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakatnya. Arti strategis itu terletak pada pemaknaan bahwa *meunasah* tidak hanya sebatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai media pemberdayaan bagi masyarakat *gampong*[1] atau desa[2] dalam kehidupan masayarakat Aceh. *Meunasah*[3] sebagai asset budaya bangsa

[1] Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks Aceh untuk desa disebut *gampong*, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Lihat Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD*, edisi. II (Banda Aceh: Biro Pemerintahan Sek-Prov. NAD, 2005), hlm. 1 dan 194

[2] *Ibid*…, Setelah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 untuk melaksanakan nilai-nilai keistimewaan Aceh dan pelaksanaan otonomi khusus, maka dibentuklah *Qanun* (perda) No. 5 tahun 2001 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam provinsi NAD. Dalam *Qanun* dimaksud nama desa berubah menjadi *gampong*. Lebih lanjut mengenai *gampong* juga dapat dilihat dalam: *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, UndangUndang RI No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh* (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 84.

[3] Term *meunasah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *madrasah,* yang berarti sekolah (tempat belajar atau lembaga pendidikan), Lihat Safwan Idris, *Perkembangan pendidikan Pesantren/ Dayah, antara Tradisi dan Pembaharuan, dalam Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 61; Lihat juga H. Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah* sebagai *Sumber Energi Budaya Aceh* (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 1. Keberadaan *meunasah* di Aceh berfungsi bukan hanya sebagai "tempat belajar" tetapi telah dijadikan sebagai pusat pertemuan anggota masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat *gampong* di Aceh (sebagai lembaga sosial-keagamaan). Selain sebagai tempat pertemuan anggota masyarakat, *meunasah* juga memiliki makna

Indonesia sangat berperan dalam membangun sebuah peradaban yang cukup megah, yang mampu mengantarkan Aceh mendapat predikat lima besar kerajaan Islam di dunia mewakili Asia Tenggara dengan kerajaan Islam Aceh Darussalam-nya.[4] Pada masa kesultanan Aceh, *meunasah* memiliki tempat yang strategis dalam mengawali sejarah kegemilangan Aceh dengan *basic*/dasar pendidikan yang dimulai dari tingkat *meunasah* untuk mengantarkan anak didik hingga mencapai pendidikan di tingkat yang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi/university.

Tentang bagaimana memahami *meunasah* secara lebih jauh lagi, alangkah baiknya untuk mengenali juga tentang Aceh dan

lika-liku perjalanan sejarahnya. Provinsi[5] Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian disingkat dengan NAD,[6] telah dilanda konflik berkepanjangan semenjak tahun 1973[7] dan berakhir pada tahun 2005 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) di Kota Helsinki, Finlandia.[8] Selama konflik

yang cukup strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga sampai dengan saat ini tidak ada satu *gampong*-pun di Aceh yang tidak memiliki *meunasah*. Lihat juga Aslam Nur, *Ramadhan dalam Persepsi Masyarakat Aceh*, *sebuah Interpretasi Antropologi* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh, 1996), hlm. 27.

[4] Ali Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam: Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1980), hlm. 208.

[5] Penyebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baru dilaksanakan pada tahun 2001 (lihat Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), sebelumnya disebut dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu, penulisan nama provinsi ini disesuaikan dengan konteks tahunnya. Lihat juga Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Perpaduan Adat dan syariat islam di A*ceh (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm 11. Saat ini pasca MOU Helsinky juga lazim penyebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan sebutan 'Pemerintahan Aceh', hal ini senada dengan yang tertuang dalam perjanjian damai antara RI-GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia, dan UU No. 16 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

[6] Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disingkat dengan NAD dalam tesis ini kemudian akan Penulis sebut dengan provinsi Aceh atau Aceh, mengingat orang lebih mengenal nama Aceh daripada NAD.

[7] Hasan Tiro yang menjadi tokoh penting dalam tubuh GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang menjadi aktor penggerak pemberontakan terhadap Republik Indonesia sebagai wujud perlawanan Aceh atas ketidakadilan Negara terhadap rakyat di Aceh. Pada tahun 1972 pulang ke Aceh dan pada tahun 1976 memproklamirkan kemerdekaan Aceh. Pada tahun 1973 masa-masa awal pemberontakan Aceh kembali terjadi, sehingga tahun yang penulis ambil dalam tesis ini adalah tahun 1973 bukan tahun 1972 ataupun tahun 1976. Lihat Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh; mengungkap Falsafat Hidup Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 288-290.

[8] Lihat *Tsunami Dan Perdamaian Aceh,* dalam http://www.koalisi-ham.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=38, diakses pada tanggal 27 Agustus 2008.

berlangsung di Aceh, banyak sendi kehidupan telah berubah, keamanan menjadi sangat mahal harganya, kemiskinan semakin merajalela, sehingga untuk memperoleh kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahtera, terasa tidak mungkin untuk diraih.

Ditengah konflik yang melanda Aceh, bencana alam-pun datang. Gempa berkekuatan 8,9 pada scala rechter yang disusul gelombang tsunami telah semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang, baik sosial-budaya, ekonomi dan politik. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun, sehingga banyak masyarakat yang menjadi miskin (23, 3 persen dari total penduduk Aceh yang mencapai empat juta jiwa lebih)[9] dan tidak berdaya. Total kerugian yang di alami akibat bencana mencapai Rp 43 trilyun, baik kerusakan fisik maupun kehilangan penghasilan.[10] Diperkirakan lebih dari 350 ribu jiwa menjadi pengungsi, 1,3 juta lebih rumah dan bangunan hancur, 8 pelabuhan, dan 4 tempat penampungan bahan bakar juga hancur, 18 jembatan dan jalan sepanjang 120 km rusak, 85 persen sistem air dan 92 persen sanitasi rusak.[11]

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor di atas, mengharuskan para pihak yang berkompeten di bidangnya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam segala bidang. Hal ini yang membuat pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah pascatsunami menjadi menarik bagi donor. Setting lokasi dalam buku ini penulis ambil secara khusus di Provinsi Aceh yaitu di *gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

---

[9] Angka tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh Periode 2007-2012) dalam kata sambutannya pada acara serah terima asset Bada Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) AcehNias kepada Pemerintahan Aceh, dalam http://www.metrotv.news.com diakses pada tanggal 16 April 2009. Azwar Abubakar (gubernur sebelum Irwandi, 2005) mengatakan penduduk miskin per-Juli 2005 mencapai 1.226.217 jiwa dari total penduduk Aceh 4,2 juta jiwa. Lihat Media Indonesia (Senin, 11 Juli 2005), *Pasca Tsunami Penduduk Miskin di Aceh Bertambah,* dalam http://www.acehrecoveryforum.org/id/index.php?action=NewsUpdate&no=2946, diakses pada tanggal 18 April 2009. Data lain menyebutkan jumlah penduduk miskin di Aceh selama periode 1999-2002 meningkat dari 21,72 persen menjadi 33,84 persen, peningkatan penduduk miskin tersebut dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Sedangkan dalam periode berikutnya secara perlahan jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan. Selama periode 2005-2007 jumlah penduduk miskin Aceh mengalami penurunan sebesar 2,04 persen yaitu dari 28,69 persen pada tahun 2005 menjadi 26,65 persen pada tahun 2007. Lihat Pemda Aceh, *Penduduk Miskin di Provinsi NAD Tahun 2005-2007 Mengalami Penurunan* (02 Agustus 2007) dalam http://www.nad.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=2960&Itemid=2, diakses pada tanggal 18 April 2009.

[10] Lihat M. Mufti Mubarok, *Duka Aceh, Tsunami dan Solidaritas Dunia* (Surabaya: Java Pustaka, 2005), hlm. 4.

[11] *Ibid*…, hlm.4.

Gampong Rima Keneurum sebagai salah satu daerah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa yang disusul gelombang tsunami, telah menarik simpati banyak lembaga[12] untuk terlibat dalam melaksanakan programnya di sana, terutama kaitannya dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Mereka (Lembaga) telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan berbagai model dan fasilitas yang mereka tawarkan. Dengan usaha tersebut, idealnya masyarakat sudah sejahtera/ berdaya. Ternyata dalam waktu 4 tahun (2005-2009) sudah berlalu proses pemberdayaan, namun dalam kenyataannya tidak semua berjalan dengan baik (sesuai dengan yang diharapkan), dan masyarakat 'masih belum berdaya'. Bukti kongkrit masyarakat belum terberdayakan dengan baik diantaranya adalah masih adanya ketergantungan kepada lembaga donor/pemberi bantuan, selain itu juga lemahnya pengawasan masyarakat terhadap pendidikan anak dan gagalnya beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga donor dan pendamping seperti program *cash assistance* yang dilakukan oleh Care.

Ketidakberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum mengindikasikan ada sesuatu yang tidak tepat dengan pemberdayaan yang telah dilakukan di sana. Hal ini karena kurang dilibatkannya *meunasah* secara efektif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Aceh sebagai satu-satunya daerah yang memiliki *meunasah* --kalau di Padang dikenal dengan Rumah *Nan Gadang*nya, dan Surau di Minangkabau-disetiap *gampong,*

[12] Data empiris yang berhasil penulis dapatkan (penulis juga terlibat langsung di lapangan dari tahun 2005-2007), ada beberapa lembaga yang terlibat di sana, dengan fokus pada kegiatannya masing-masing, yaitu: *pertama* Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, dengan proyek perumahan, jalan dan sanitasi. *Kedua* Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NAD bekerja sama dengan *United Nation Children Fund* (Unicef), yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani urusan anak dengan program *Children Center* (CC)-nya. CC tetap fokus pada anak dengan berbagai programnya, seperti pemberdayaan anak, pendidikan anak, dan *livelihood* untuk meningkatkan perekonomian pengasuh dan anak. Selain itu pihak Dinsos juga memberikan bantuan sosial yang lain seperti paket bantuan sosial. *Ketiga* Care Internasional, mereka mengambil peran dalam pembangunan rumah untuk korban tsunami, pembentukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberdayaan kaum perempuan, pengajian dan penguatan kelembagaan PKK bekerjasama dengan pihak kecamatan. *Keempat* Plan, juga ikut andil dengan pembangunan fasilitas kesehatan berupa pos bersalin desa (polindes). *Kelima* Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Banda Aceh, mereka terlibat dalam penyadaran hukum bagi masyarakat, terutama untuk penyadaran akan bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan terbinanya masyarakat yang aman, damai, rukun dan sejahtera. Dan *keenam* LCO (*Lost Children Operation*) dan TALOE (*Traditional Art Lace Organization*) yang masing-masing mengambil peran dalam pendidikan, pemenuhan hak anak dan dalam bidang seni-budaya. Lihat Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Tsunami Berbasis Meunasah,* tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 4-5.

yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim*[13] atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin *Keuchik*[14] atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri".[15] Struktur pemerintahan *gampong* adalah *Keuchik* dan *Teungku Imeum Meunasah*[16] beserta perangkat *gampong* lainnya.[17]

Keberadaan *meunasah* sangat ditentukan oleh masyarakat sebagai pelaku perubahan (*agent of change*). Ketika peran *meunasah* (sebagai *local wisdom*) diposisikan pada tempatnya, maka keberadaan *meunasah* akan mampu membawa perubahan menjadi lebih maju dan berkembang, demikian juga sebaliknya. *Meunasah* telah banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Aceh, yang kesemuanya itu bersendikan pada nilai-nilai religiusitas keislaman. Sejarah masa lalu yang cemerlang, mendorong semua pihak untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis *meunasah*, terutama pascakonflik dan pascatsunami yang telah memporak-porandakan Aceh.

Ketika *meunasah* dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik sebagai lambang persatuan dan kesatuan umat, ia akan menjadi sumber kekuatan masyarakat dalam mengatur berbagai keperluan adat maupun sebagai pusat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat *gampong*. Dalam beberapa literatur sejarah yang berhasil penulis dapatkan, menggambarkan bahwa semua kegiatan masyarakat *gampong* dimulai dari *meunasah* dan juga di akhiri di *meunasah*, baik kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan sekitar.

Namun berdasarkan data empiris dari hasil observasi penulis,[18] menunjukkan bahwa realitas sosial dalam masyarakat Aceh dewasa ini (tahun 2009) menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan fungsi

---

[13] *Mukim* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi NAD yang terdiri atas beberapa *gampong* yang mempunyai batasbatas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh *Imeum Mukim*.

[14] *Keuchik* adalah Pimpinan pemerintahan *gampong*. Lihat Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Petunjuk Teknis*, hlm. 194-195.

[15] Lihat *Qanun* Kabupaten Aceh Besar, No. 08 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Gampong* (Aceh Besar: Pemda Aceh Besar, 2006), hlm. 4-6.

[16] *Teungku* (menguasai bidang agama, Islam) *Imeum Meunasah* mempunyai kedudukan yang sejenjang dengan *Keuchik*. *Teungku Imeum Meunasah* bertanggungjawab terhadap pelaksanaan agama, sedangkan *keuchik* bertanggungjawab pada pelaksanaan pemerintahan *gampong*. Lihat Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Petunjuk Teknis*, hlm. 195 dan 225.

[17] Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Petunjuk Teknis*, hlm. 5 dan 10.

[18] Observasi Penulis lakukan di *Gampong* Rima Keneurum pada tanggal 21 September s.d 12 Oktober 2008, yang diperkuat dengan penelitian lanjutan (kedua) pada tanggal 10 Februari s.d 12 Maret 2009.

dan peran *meunasah* dengan lembaga adat dan pemerintahan lainnya, serta melemahnya nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat terutama sekali pascatsunami. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan *meunasah* agaknya kurang berperan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umat dewasa ini, seperti mulai lemahnya mutu pendidikan agama dan terjadinya degradasi moral di dalam masyarakat Aceh.

Meunasah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai titik sentral perubahan dalam masyarakat, kini sudah mengalami pergeseran. Bahkan keberadaan *meunasah* juga dipertanyakan peran dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat pascatsunami, sehingga buku ini hadir untuk memberikan informasi yang objektif tentang *meunasah* sebagai *local wisdom* yang menjadi basis dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh pascatsunami.

Secara sederhana terdapat dua hal yang menjadi tujuan dalam penulisan buku ini yaitu: *pertama* adalah untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat yang terjadi di *gampong* Rima Keneurum, secara lebih khusus ingin menggambarkan bagaimana pemanfaatan *meunasah* sebagai bentuk kearifan lokal yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan basis pemberdayaan masyarakat *gampong,* terutama pascatsunami. Berdasarkan data empiris yang berhasil penulis kumpulkan, proses pemberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum dengan berbagai fasilitas yang ada, belum mampu membuat masyarakat menjadi berdaya. Idealnya, pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana telah disebutkan di atas dapat membuat masyarakat menjadi lebih berkembang dan mandiri, walaupun masyarakat tidak lagi didampingi. Sehingga disaat lembaga melakukan pengakhiran program (*finishing*) dan melakukan pelimpahan (*handover*) ke masyarakat, kegiatan mereka dapat tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan (dapat *sustainable*). Tujuan yang *kedua* adalah untuk dapat mengetahui efektivitas pemberdayaan masyarakat *gampong,* pascatsunami.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ada dua yaitu: *pertama* adalah secara teoritis. Maksud dari kegunaan secara teoritis adalah untuk menemukan dasar-dasar teori dan metodologi dari pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat pascatsunami berbasis *meunasah*. Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana respon masyarakat *gampong* Rima Keneurum dan sejauh mana efektifitas pemberdayaan terhadap masyarakat, yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang turut terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di *gampong* Rima Keneurum. Selain itu juga, bagaimana pemanfaatan *meunasah* sebagai pusat kegiatan masyarakat dan sebagai basis pemberdayaan masyarakat di Aceh.

Karya ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk kepentingan dunia akademis dan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi para pihak yang memiliki kepentingan, terutama yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Hal ini mengingat pentingnya peran *meunasah* dalam komunitas Aceh, sebagai basis sosial masyarakat. Dengan sasaran mampu menumbuhkan kembali fungsi dan peran *meunasah,* dalam kehidupan masyarakat Aceh sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai hilang atau mengalami kemunduran (*regression*).

B. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang memuat tentang pemberdayaan, diantaranya Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D[19] dalam buku: "*Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat"*. Dalam buku ini Wrihatnolo dan Nugroho lebih banyak menyorot tentang pembangunan manusia Indonesia yang lebih merdeka, yaitu merdeka dari belenggu ketidakberdayaan, kemiskinan dan kebodohan. Penulis membagi pemberdayaan masyarakat pada tiga tahapan yaitu: *pertama*; tahapan penyadaran, *kedua*; tahapan pengkapasitasan dan yang *ketiga*; tahapan pemberian daya itu sendiri, atau "*empowerment*" dalam arti sempit. Buku ini menjadi cukup menarik mengingat pembahasannya tentang pemberdayaan yang cukup menarik, secara konseptual, dasar-dasar pemberdayaan, pengukuran pemberdayaan, dan model-model pemberdayaan. Namun dalam bukunya, mereka tidak membahas tentang kearifan lokal yang di dalamnya terdapat beragamnya institusi-institusi lokal yang antara satu daerah dengan daerah lain sangat mungkin berbeda.

Isbandi Rukminto Adi[20] dalam bukunya: "*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*", lebih banyak mengupas tentang intervensi terhadap komunitas, pengembangan dan pembangunan masyarakat. Dari sembilan bab yang disajikan dalam buku ini, hanya satu bab yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan itupun dikaitkan dengan intervensi komunitas. Namun ada yang menarik dengan buku ini, karena membahas tentang intervensi komunitas, yang dapat membantu dalam melihat komunitas Aceh secara lebih spesifik.

Selanjutnya Edi Suharto[21] dalam bukunya *"Membangun Masyarakat*

[19] Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho D., *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007).

[20] sbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002).

[21] Lihat Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis*

Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial". Dengan bersandar pada pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial (*social work*), Edi Suharto berargumen bahwa; era membangun dan memberdayakan masyarakat tidak akan optimal jika dilakukan secara parsial. Pengembangan masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Dalam konteks Aceh, itu dapat ditemukan pengaktualisasiannya dalam bentuk *meunasah* dan segala manifestasinya.

Berbeda dengan Edi Suharto, Zubaedi dalam bukunya: "*Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat"*, yang mengambil *setting* pemberdayaan masyarakat di pesantren, mengungkapkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terakhir pengembangan dan pemberdayaan terhadap wanita. Ia melihat keberadaan LSM sebagai sesuatu yang sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Namun dalam bukunya Zubaedi tidak menyinggung tentang pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pascatsunami maupun bencana. Zubaedi lebih banyak melihat tentang keberadaan dan peran LSM dalam proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.[22]

Supartini[23] dalam tesisnya, mengangkat tentang *"Program Pemberdayaan Pekerja Seks".* Supartini menggambarkan tentang betapa kemiskinan dan ketidakberdayaan telah membuat anak manusia memilih untuk bekerja sebagai pekerja seks. Penelitian tersebut bertempat di komplek Pasar Kembang Kodya Yogyakarta. Dalam penelitian itu Supartini melakukan evaluasi terhadap implementasi program pemberdayaan pekerja seks di komplek Pasar Kembang. Target pemberdayaan di sini adalah pekerja seksnya, sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pemberdayaan untuk masyarakat pascatsunami di Aceh yang secara geografis dan budaya jelas sangat berbeda.

Adapun beberapa karya tentang *meunasah* secara khusus dan secara umum tentang sosiologi masyarakat Aceh, diantaranya adalah Sulaiman Tripa[24] dalam tulisannya yang berjudul: *"Meunasah, Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh".* Menurut Sulaiman Tripa, sejarah *meunasah* dalam kondisi

---

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006).

[22] Lihat Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007).

[23] Supartini, Tesis, *Program Pemberdayaan Pekerja Seks*, *studi evaluasi terhadap implementasi program pemberdayaan pekerja seks di komplek Pasar Kembang Sostrowijayan Kulon Kecamatan Gedong Tengen Kotamadya Yogyakarta* (Jakarta: UI, 1998).

[24] Lihat Sulaiman Tripa, *Meunasah, Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh,* dalam: www.google.com/meunasah, di akses pada tanggal 04 Juli 2008.

ideal (terutama masa kejayaan kerajaan Islam Aceh Darussalam, 1607-1636 M) "begitu istimewanya *meunasah* dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga tidak ada sedikit pun ruang *meunasah* yang tidak termanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. *Meunasah* bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan".

Badruzzaman Ismail[25] juga menyampaikan tentang kedudukan *meunasah* dalam sistim sosial masyarakat Aceh, yang tertuang dalam makalahnya yang berjudul: *"Kedudukan Meunasah dan Masjid Dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh"* (disampaikan pada Kongres Kebudayaan Aceh, pada tanggal 7-9 April 2006 di Banda Aceh). Badruzzaman juga mengatakan bahwa *"meunasah* berfungsi sebagai sentra pembangunan masyarakat, dan sentra pengendali proses interaksi sosial masyarakat".

Qanun (peraturan daerah, khusus Aceh) Kabupaten Aceh Besar nomor: 08 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Gampong*, hanya sedikit menyinggung tentang *meunasah* dan itupun tentang kedudukan *Imeum meunasah* (imam *meunasah*) sebagai bagian dari struktur pemerintahan *gampong*. Namun hal yang paling menarik di sini adalah adanya perubahan penyebutan dari desa menjadi *gampong*. Perubahan redaksi bahasa tersebut memberikan nuansa khas ke-Aceh-an yang juga merupakan identitas bagi masyarakat Aceh (*local wisdom*).

Sebuah penelitian tentang *meunasah* yang dilakukan oleh tim peneliti IAIN Ar-Raniry[26] dengan judul: *"Pemetaan Kegiatan Meunasah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*. Penelitian ini lebih terfokus kepada pendataan kegiatan *meunasah* di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara umum. Penelitian tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam memahami *meunasah* di Aceh, namun tidak menyinggung tentang fungsi *meunasah* pascabencana. Buku ini berbeda tentunya, yaitu melihat sisi pemberdayaan masyarakat pascabencana berbasis kearifan lokal. Penulis ingin menarik relasi, antara *meunasah* sebagaimana yang disampaikan oleh Sulaiman Tripa dan Badruzzaman Ismail di atas dengan *meunasah* yang sekarang.

Penulis juga pernah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, tentang: "*Peran Meunasah Dalam Pengembangan Masyarakat; Studi di Kabupaten Aceh Besar"*.[27] Hasil penelitian menggambarkan bahwa: *meunasah* menjadi *community center* (pusat kegiatan masyarakat) dalam

---

[25] Lihat Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Meunasah dan Masjid Dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh,* dalam: www.google.com/meunasah, di akses pada tanggal 04 Juli 2008.

[26] Lihat, Farid Wajdi Ibrahim, dkk, *Pemetaan Kegiatan Meunasah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Kerjasama antara Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003).

[27] Sabirin, *Peran Meunasah Dalam Pengembangan Masyarakat; Studi di Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2007).

sebuah *gampong*. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa: ternyata telah terjadi perubahan fungsi atau terjadinya pergeseran nilai terhadap *meunasah*. Dalam buku ini berbeda dengan karya sebelumnya, pada kesempatan ini penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis pada kearifan lokal, dalam konteks ini yang menjadi sorotan adalah *meunasah* sebagai media --kearifan lokal di Aceh, fungsi, peran, eksistensi, maupun model pemberdayaan masyarakat berbasis *meunasah*.

Dari beberapa tinjauan kepustakaan (referensi yang penulis kemukakan di atas) dapat penulis simpulkan bahwa; belum ada yang membahas secara intents tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam konteks keacehan. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah literatur kita bersama.

C. Kerangka Teori

Saat ini belum ada satupun yang menjelaskan definisi Pemberdayaan masyarakat secara kongkrit. Namun, ada beberapa defenisi yang kiranya menurut penulis dapat mewakili definisi yang lain seperti di ungkapkan oleh Zimmerman, 1995 bahwa:

> Di tingkat individu, pemberdayaan merupakan pengembangan psikologis yang menggabungkan persepsi kendali personal, pendekatan proaktif pada kehidupan, dan pengetahuan kritis akan lingkungan sosiopolitis. Pada tingkat organisasi pemberdayaan mencakup proses dan struktur yang meningkatkan keahlian para anggotanya dan memberikan dukungan timbalbalik yang diperlukan oleh anggotanya untuk mempengaruhi perubahan di tingkat masyarakat. Dan di tingkat masyarakat, pemberdayaan berarti tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dan hubungan antar organisasi masyarakat.[28]

Edi Suharto dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat menyebutkan bahwa:

> Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi

[28] Lihat Wrihatnolo Randy R., D. Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 179.

mereka.[29]

Masyarakat Aceh sebagai sebuah komunitas yang dikenal cukup relegius, memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam merealisasi itu semua, tidak hanya terhadap Tuhan, namun juga terhadap manusia dan lingkungan. Sulaiman Tripa (pegiat kebudayaan Aceh) mengatakan bahwa:

> *Meunasah* dalam sejarahnya, merupakan sebagai sentral peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak sejak usia dini di *gampong*, dididik untuk mengenal penciptanya, untuk mengenal orang tuanya, dan untuk mengenal masyarakatnya. *Meunasah* memperlihatkan tiga dimensi; hubungan manusia dengan Tuhan-nya (*Hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablumminannas*), dan interaksi dalam sebuah lingkungan.[30]

Untuk membahas tentang *meunasah* sebagai struktur sosial dalam masyarakat adat Aceh, maka dalam kajian ini penulis juga menggunakan teori fungsionalisme struktural, untuk melihat relasi antara fungsi struktur adat Aceh dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sana. Robert Nisbet dengan mengutip Turner dan Maryanski (1979) menyatakan bahwa teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan yang paling besar dan menjadi arus utama (*mainstream*) yang cukup berpengaruh dalam ilmu sosial dewasa ini. Istilah fungsionalisme lebih cenderung pada persoalan psikologis, sementara itu struktural lebih cenderung pada persoalan sosiologis.

Talcott Parson yang mengusung teori ini yakin bahwa:

> Dalam masyarakat yang memiliki struktur dan sistem akan muncul fungsi masing-masing, diantaranya ada empat fungsi yaitu: *Pertama*; *Adaptation* (adaptasi); sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat/berbahaya. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Kedua*; *Goal Attaiment* (pencapaian tujuan); sebuah sistem harus mendefenisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Ketiga*; *Integration* (integrasi); sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Dan *keempat*; *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola); sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.[31]

---

[29] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 58.

[30] Lihat Sulaiman Tripa dalam: www.acehinstitute.org/meunasah, di akses pada tanggal 03 Juli 2008.

[31] Jane C. Ollenburger dan Helen A. More, *A Sociology of Women: The Intersection of Patriachy, Capitalism, and Colonialism* (New Jersey: Prentice Heall, 1992), hlm. 11.

Islam sebagai sebuah ajaran yang *universal* dalam memberikan aturan bagi pemeluknya, memiliki konsep sendiri dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang dilanda oleh keterpurukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Ra'adu* ayat 11, disebutkan bahwa:

... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ
وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن
دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*, *dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*.[32]

Ayat di atas memberikan gambaran tentang konsep perubahan masyarakat (*tgyir*), yang menurut M. Quraisy Syihab ditafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, disamping manusia berperan sebagai totalitas atau manusia sebagai wujud pribadi-pribadi personal, dalam ayat tersebut manusia juga diposisikan sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat. Pemakaian kata *qaum* menunjukkan bahwa proses perubahan yang dimaksudkan dalam ayat 11 surat *Ar-Ra'du* adalah sebuah proses perubahan masyarakat (sosial).[33]

Berdasarkan surat Ar-Ra'du ayat 11, teridentifikasi bahwa ada dua hal pokok dalam proses perubahan sosial menurut Islam. *Pertama* Islam memandang bahwa perubahan sosial haruslah dimulai dari individu (*Ibda' Binafsi*), dimulai dari diri sendiri. *Kedua* secara berangsur-angsur, perubahan individu ini harus disusul dengan perubahan struktural. Perubahan yang kedua ini menurut penulis adalah perubahan secara berjamaah, yang sudah distrukturkan secara lebih baik.

Surat *Ar-Ra'du* ayat 11, Tuhan (Allah) cukup jelas memberi gambaran bahwa: Allah tidak akan merubah keadaan mereka (sesuatu kaum), selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Artinya, proses

[32] Lihat Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989).

[33] M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Set. Ke-10 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 245.

perubahan atau pemberdayaan harus didahului oleh adanya perubahan pola pikir dan sikap, dalam wujud aksi nyata untuk menuju pada suatu tujuan yang dicita-citakan yaitu perubahan menuju kearah yang lebih baik. Ayat di atas juga menyiratkan bahwa betapa klien (objek yang ingin diberdayakan) sangat mempengaruhi terhadap perubahan yang diinginkan, tentunya klienlah yang sangat paham dan tahu apa yang terbaik bagi dirinya, bukan orang atau pihak lain.

Semua teori yang disebutkan di atas akan dijadikan kerangka fikir untuk memotret, membedah dan menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal (*meunasah)*, sebagaimana judul buku ini.

D. Metodologi

Fokus kajian tentang pemberdayaan masyarakat pascatsunami berbasis *meunasah* di Aceh, dengan titik fokus pada *meunasah* dan masyarakatnya, dalam penelitian yang kemudian menjadi buku ini penulis gunakan metode penelitian "kualitatif naturalistik".[34] Untuk mendapatkan data secara lengkap dan akurat menggunakan dua pendekatan yaitu: *pertama* pendekatan historis, yang penulis gunakan untuk melihat *meunasah* sebagai bagian dari sejarah Aceh, khususnya dalam meneropong bagaimana *meunasah* dalam literatur sejarah, sebagai jalan masuk dalam memahami konteks historis budaya dan adat-istiadat masyarakat Aceh. Dan yang *kedua* adalah pendekatan sosiologis-antropologis, pendekatan ini diperlukan untuk dapat memahami konteks kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh, sehingga akan mampu menterjemahkan dengan baik terhadap prilaku masyarakatnya secara objektif menuju suatu kesatuan pendapat secara utuh, profesional dan proporsional dalam melihat masalah-masalah yang muncul.

Desain penelitian ini adalah "deskriptif kualitatif", yang pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.[35]

---

[34] Istilah "naturalistik" menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya, ini dikenal dengan sebutan "pengambilan data secara alami dan natural". dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan, tidak seperti penelitian kuantitatif yang dapat mewakilkan orang lain untuk menyebarkan angket atau melakukan wawancara terstruktur. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. 12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11-12.

[35] Lihat M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,*

Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini amat mendalam dan sesuai dengan penelitian model ini. Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan "menusuk" sasaran penelitian.[36] M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa: Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bisa secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analisis), tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi.[37]

Data dapat dikelompokkan menurut cara pengumpulannya menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.[38] Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung, dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau oleh lembaga lain. Untuk memperoleh data tersebut, penulis juga mempergunakan literatur-literatur kepustakaan (*Library Research*). Langkah kong-kritnya adalah dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis *meunasah* (kearifan lokal). Selain itu untuk mendapatkan data yang lengkap, dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara, yaitu: observasi, interview dan dokumentasi. Metode dimaksud sebagai mana yang akan diuraikan berikut ini:

a. Observasi

Observasi atau yang sering disebut pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian.[39] Teknik ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi penelitian mengenai kenyataan yang terjadi di dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis *meunasah* dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. mengamati bukanlah hal yang mudah, karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang.

dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008), hlm. 68.

[36] *Ibid*., hlm. 68-69.

[37] Lihat, M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi,* hlm. 22.

[38] Lihat Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 195.

[39] Consuelo G. Sevilla dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 198.

Dengan bahasa yang lain, pengamatan harus objektif.[40] Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebanyak dua kali, yang pertama dari tanggal 21 September s.d 12 Oktober 2008, dan yang kedua dari tanggal 10 Februari s.d 12 Maret 2009. Sehingga total waktu yang penulis gunakan untuk observasi di lapangan adalah 53 hari.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lokasi penelitian, hal ini dilakukan karena objek penelitian terdapat di alam terbuka sehingga untuk mendapatkan data yang kongkrit maka dipandang perlu bagi peneliti untuk terlibat langsung ke lokasi penelitian. Penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari lokasi penelitian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun sasaran-sasaran yang di-*observasi* adalah segenap komponen masyarakat *gampong* yang menjadi objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung serta pihak terkait lainnya yang dibutuhkan. Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, partisipan yang terlibat dalam pemberdayaan, kegiatan (aktivitas) termasuk kejadian atau peristiwa penting lainnya semisal: sikap, perasaan, pandangan partisipan yang ditunjukkan melalui ungkapan, ekspresi wajah atau tindakan lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.[41] Dalam hal ini juga termasuk dari dunia maya, seperti di internet yang relevan dengan tema penelitian.

c. Interview

Teknik interview atau wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian, yaitu masyarakat *gampong* Rima Keneurum dan pihak lain yang dianggap penting demi kelengkapan data penelitian. Informan yang dimaksud berjumlah 17 orang. Diantaranya adalah *Keuchik Gampong* satu orang, Sekretaris *Gampong* satu orang, *Tengku Imeum Meunasah* satu orang, *Tuha Peut* satu orang, ketua pemuda satu orang, pengurus PKK dan Posyandu satu orang, Camat Kecamatan Peukan Bada yang diwakili oleh Sekretaris Camat satu orang, empat orang perwakilan NGo yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sana (dua orang dari Children Center Peukan Bada dan

[40] Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 205.

[41] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 2.

dua orang dari Care International), lima orang dari akademisi, dan satu orang praktisi dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.

Data tersebut di *back-up* oleh data pendukung lain yang diperoleh dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis *meunasah* di Aceh. Proses wawancara menggunakan pedoman wawancara "tidak terstruktur", yang hanya memuat garis besar untuk ditanyakan. Karena interview cocok untuk penelitian kasus.[42] Dalam melakukan wawancara mengikuti metode wawancara mendalam (*in-depth interview*).[43]

Dua cara yang dapat dilakukan dalam wawancara mendalam yaitu dalam bentuk penyamaran dan terbuka.[44] Kedua cara tersebut penulis gunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan kondisi lapangan untuk mendapatkan data secara objektif. Pewawancara menyamar sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang hidup dan beraktivitas dengan wajar bersama orang yang diwawancarai. Wawancara terbuka secara langsung, dimana informan/responden mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang melakukan wawancara. Dari dua alat bantu wawancara yaitu; pedoman wawancara dan daftar petanyaan,[45] penulis menggunakan pedoman wawancara, karena hal ini lebih memudahkan bagi penulis dalam melakukan wawancara.

Penentuan sampel, penulis menggunakan sampling bertujuan (*purposive sampling*),[46] yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian.

---

[42] *Ibid*., hlm. 202.

[43] Dalam metode wawancara ini peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya, yaitu wawancara dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, hal yang jarang terjadi pada wawancara pada umumnya. Lihat M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008), hlm. 108.

[44] Lihat M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 109.

[45] Pedoman wawancara sebagai alat bantu wawancara yang hanya menggambarkan garis besar atau pokok-pokok permasalahan saja. Namun dalam aplikasinya masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan di lapangan. Wawancara dengan sistem pedoman wawancara ini memberikan kebebasan yang terbatas pada penanya (*Interviewer*) untuk menanyakan pertanyaan lain, kebebasan tersebut tetap terbatas sepanjang tidak menyimpang dengan rencana penelitian yang telah dirumuskan. Sementara daftar pertanyaan lebih terperinci sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitian, sehingga terkesan kaku dalam aplikasinya di lapangan karena permasalahan penelitian telah dirumuskan dalam wujud daftar pertanyaan yang telah dibuat secara tuntas. Lihat P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, hlm. 43-44.

[46] Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 231.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menjadikan warga *gampong* Rima Keneurum sebagai informan, namun juga menggunakan pihak lain seperti para pakar dari akade-misi, praktisi, dan pihak berkompeten lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Aceh, yaitu *gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan salah satu daerah terparah terkena tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu *gampong* sebagai sampel daerah yang mengalami bencana hebat tsunami, yang secara geografis berada di daerah teritorial Kecamatan Peukan Bada yaitu, *gampong* Rima Keneurum.

Ada beberapa hal yang menarik dari g*ampong* ini, sehingga penulis memilih g*ampong* Rima Keneurum sebagai lokasi dalam penelitian yang penulis lakukan. Diantara beberapa hal tersebut adalah: *pertama,* tingginya mobilitas masyarakat. Secara geografis lokasi penelitian cukup dekat dengan jalan raya dan sarana transportasi serta fasilitas publik lainnya, seperti pasar, pusat kesehatan, sarana pendidikan dan pusat pemerintahan kecamatan.

Kedua, kondisi masyarakat cukup terbuka dengan pihak luar, dengan masyarakatnya yang heterogen. Keterbukaan masyarakat setempat dalam merespon pihak asing yang datang ke *gampong* Rima Keneurum, memudahkan bagi peneliti dalam memperoleh data-data yang kongkrit dan akurat tentang objek yang akan diteliti.

Ketiga, secara geografis letak *gampong* Rima Keneurum dekat dengan laut (daerah pesisir) di kecamatan Peukan Bada yang dilanda bencana tsunami, yang telah meluluh-lantakkan sendi kehidupan. Dan juga berada antara daerah pesisir dan pegunungan serta mudah dijangkau. Selain itu menarik juga untuk diteliti, karena *gampong* ini memiliki kekhasan tersendiri, dengan tingginya mobilitas masyarakat serta terjadi akulturasi budaya asing secara cepat khususnya pascatsunami, yang menembus batas-batas wilayah adat di *gampong* tersebut.

Keempat, banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami yang ikut ambil bagian dalam bidang pemberdayaan masyarakat di *gampong* ini, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Ngo asing, nasional, dan lokal). Bantuan tersebut berupa materil maupun non materil dengan berbagai model pendekatan yang dilakukan, seperti hibah, pinjaman lunak maupun bentuk pemberdayaan masyarakat yang berupa pelatihan-pelatihan. Namun sepeninggalan mereka, data empiris menunjukkan bahwa, adanya

ketergantungan masyarakat terhadap lembaga yang dulunya mendampingi mereka.

Kajian ini menjadi menarik jika dihubungkan dengan keberadaan *meunasah* yang selama ini dianggap sebagai pusat kegiatan dalam komunitas *gampong* di Aceh, terutama peran dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Kiranya dengan beberapa uraian di atas, *gampong* Rima Keneurum layak dijadikan sebagai lokasi penelitian. Diharapkan juga pemilihan lokasi ini akan mampu menggambarkan relasi dan peran *meunasah* sebagai basis pemberdayaan masyarakat pascatsunami di Aceh, secara objektif.

3. Analisis Data

Banyak pakar yang mencoba mendefenisikan tentang analisis data, seperti salah satunya sebagaimana yang digambarkan oleh Lexy J. Moleong, beliau mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[47]

Berdasarkan defenisi analisis data di atas, maka data yang di peroleh baik lewat observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data lainnya, seperti; studi literatur dianalisis, diseleksi, kemudian dipaparkan dengan sejumlah teori yang mendukung analisis tersebut dan kemudian disimpulkan. Analisis data ini penting dilakukan dalam menjamin objektifitas data penelitian dan sebagai salah satu upaya penting yang harus dilalui untuk penulisan karya tulis ilmiah, yang *capable* (yang sesuai dengan berbagai aturan penulisan yang ada). Dalam analisis data ini penulis menggunakan model analisis data perbandingan tetap atau *constant comparative method* karena dalam analisis data, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Penulis akan mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan.[48]

[47] Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi*, hlm. 97.

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. 21 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 288-289.

BAB II
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEUNASAH

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi, kata 'berdaya' mengandung makna "berkemampuan, bertenaga, berkekuatan",[1] kata 'daya' sendiri bermakna "kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan".[2] Kata masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *society* ternyata berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti kawan. Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraka*, yang berarti ikut serta, berpartisipasi.[3] Sedangkan kata 'masyarakat' bermakna "sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya; rakyat".[4]

Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang ikut bicara dalam hal itu. Salah satunya adalah Payne[5] yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) intinya ditujukan untuk:

> *"To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to us power and by transferring power from the environment to clients."*
>
> (Membantu klien untuk memperoleh daya, agar dapat mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, juga mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, diantaranya melalui transfer daya dari lingkungannya).

---

[1] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, tt. hlm. 213.

[2] Tim Prima Pena, *Kamus Besar…,* hlm. 212.

[3] Koentjaraningrat dalam; A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 82.

[4] Tim Prima Pena, *Kamus Besar…,* hlm. 518.

[5] Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*, Second Edition, (London: Macmillan Press, 1997), hlm. 266.

Shardlow (1998) melihat bahwa pengertian tentang pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Biestek (1961) yang dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama *self-determination*. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.[6]

Realitasnya, pemberdayaan memiliki banyak interpretasi sesuai dengan penggunaan dan berperan sebagai apa. Dalam pengentasan kemiskinan pemberdayaan juga bermakna bagaimana upaya yang dilakukan dengan titik akhir agar terbebas dari kemiskinan itu sendiri, sementara yang tahu persis apa saja yang harus dilakukan sangat tergantung pada dirinya sendiri. Demikian juga dengan pemberdayaan dalam bentuk yang lain, pemberdayaan akan sangat bervariasi sehingga bisa saja satu pemberdayaan akan sangat berbeda dengan pemberdayaan yang lainnya baik secara konsep maupun pendekatannya.

Sementara itu, kata masyarakat juga sering digunakan untuk menterjemahkan kata Inggris *community* atau *society*. Dalam penggunaannya, *community* tidaklah sama dengan *society*. Sebagaimana lazim kita lihat tentang adanya tulisan *moslem society* atau *civil society*, tidak ada yang menyebutnya *moslem communty* atau *civil community*, demikian juga dengan ungkapan *community based* dan *lokal community* tidak ada *society based* dan *lokal society*, tentunya pegiat sosial sangat memahami konteks kata 'masyarakat' yang sedang dipakai dalam kalimat; apakah berarti *community* atau *society*.[7]

Banyak defenisi tentang masyarakat, yang sampai saat ini masih tetap menjadi perdebatan para ahli sosial kemasyarakatan. Secara terminologi, masyarakat dapat dikatakan sebagai sekumpulan individu yang didalam kegiatannya saling berinteraksi, saling berasimilasi dan berakulturasi, sehingga suatu masyarakat menjadi berkembang dan teratur dengan adanya sistem dan struktur tertentu yang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan lingkungannya.[8]

---

[6] Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 78.

[7] Jim Ife, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development*, terj. Sastrawan Manullang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. VI.

[8] Lihat A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, hlm. 81.

Linton, seorang ahli Antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Menurutnya, masyarakat merupakan sejumlah individu yang hidup dan berinteraksi, sehingga melahirkan suatu sistem kemasyarakatan yang matang. Selain masyarakat dapat melahirkan suatu kebudayaan sekaligus dapat mengekpresikannya serta mensosialisasikannya melalui institusi-institusi sosial dan lembaga sosial yang telah diciptakannya.[9] Sementara itu J.L. Gillin dan J.P. Gillin juga mengemukakan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.[10]

B. Masyarakat dalam Pemberdayaan

Masyarakat dan pemberdayaan bagaikan dua sisi mata uang yang saling ketergantungan, dan tidak memiliki makna apa-apa jika keduanya dipisahkan. Tanpa pemberdayaan, masyarakat akan kehilangan substansi maknanya juga tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan bagaikan kalimat yang tidak sempurna (*subject* tanpa *object* atau sebaliknya), mari kita lihat bait kata di bawah ini:

> ”Sebutir biji tidak akan dapat menjadi pohon yang berbuah, kecuali setelah melewati beberapa tahapan masa, pendek atau panjang, bergantung pada jenisnya, tanahnya, iklimnya dan kondisi pertumbuhannya, sampai ia berbuah dengan izin Tuhannya..., begitulah kehidupan berjalan dalam segala bentuknya dari satu tahapan ke tahapan lainnya sehingga menjadi sempurna”.[11]

Secara sederhana dapat kita pahami dari seuntai katakata bijak di atas adalah betapa semuanya butuh pada sebuah proses yang matang. Kaitannya dengan masyarakat dalam pemberdayaan adalah adanya keberfungsian sosial masyarakat dalam pemberdayaan. Artinya semua orang atau individu memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan kepada arah yang diinginkan. Masyarakat diibaratkan sebagai biji yang berpotensi menjadi pohon yang berbuah, sementara tahapan yang dilalui komponen pendukung lainnya adalah bagian dari proses yang dilakukan untuk mencapai pada sebuah pohon yang berbuah itu.

Pemberdayaan (yang merupakan proses) menjadikan manusia sebagai pribadi yang berdaya dengan banyaknya pilihan-pilihan yang bisa diambil

[9] Lihat Harsojo (1999) dalam: A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, hlm. 82-83.

[10] *Ibid*., hlm. 83.

[11] Yusuf Qardhawi dalam: Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 77.

tanpa ada tekanan atau paksaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Edi Suharto (2006) bahwa berdaya itu adalah ketika tersedianya pilihan-pilihan untuk memilih atau memiliki sesuatu. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, tetapi juga sekaligus menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Ini disebut dengan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yaitu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.[12]

C. Pemberdayaan dalam Masyarakat Aceh

Bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh 26 Desember 2004 silam, telah meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan segera, baik bagi masyarakat pesisir yang mengalami musibah secara langsung maupun masyarakat Aceh pada umumnya. Pascatsunami telah meninggalkan duka dan trauma yang mendalam serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Ketahanan masyarakat menjadi lemah, salah satunya adalah telah menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya yang terindikasi dengan ketergantungan terhadap pihak luar.

Kondisi masyarakat Aceh pascatsunami yang membutuhkan sentuhan berbagai pihak, membuat banyak lembaga turut serta ambil bagian dalam proses menata kembali kehidupan masyarakat di Aceh pascatsunami. Lembaga-lembaga yang hadirpun beragam, baik dari *Non Government Organization* (NGO) Asing, Nasional maupun lokal dan juga dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara umum kehadiran lembaga-lembaga tersebut memiliki misi untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang menjadi dampingan, maupun patner mereka dalam mewujudkan cita-cita bersama (lembaga dan masyarakat).

Pemberdayaan terhadap masyarakat secara teori akan berhasil dengan menempuh tahapan-tahapan yang ada, dalam sebuah pemberdayaan harus melalui tiga tahapan:[13]

1. Penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
2. Pengkapasitasan, yang sering disebut dengan "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau "*enabling*". Pengkapasitasan ini dalam artian memampukan manusia baik dalam

[12] Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas*, Pengembangan, hlm.66.

[13] Randy R.Wrihatnolo, Riant Nugroho D., *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 02-07.

konteks individu maupun kelompok, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membantu menyiapkan sistem nilai yang berupa "aturan main", baik itu Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), sistem dan prosedur, aturan-aturan dan sebagainya.

3. Pemberian daya itu sendiri atau "*empowerment*" dalam makna sempit, setelah adanya kesadaran untuk memiliki sesuatu dan menyiapkan kapasitas diri untuk meraihnya, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Kesemuanya itu diberikan sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Jack Rothman dalam Edi Suharto (2006) mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi pengembangan masyarakat, yaitu sebagai berikut:[14]

1. Pengembangan masyarakat lokal atau *locality development.*
2. Perencanaan sosial atau *social planning*.
3. Aksi sosial atau *social action*.

Ketiga paradigma di atas merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Pengembangan masyarakat lokal adalah sebuah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya pengembangan masyarakat lokal merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kehadiran berbagai lembaga di gampong Rima Keneurum pada dasarnya adalah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal.

Hendaknya seorang pengembang masyarakat (pekerja sosial) harus memahami masyarakat dalam segala aspek. Dalam arti sempit, masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, *gampong*, kelurahan, kampung atau RT yang sering disebut dengan komunitas (*community*). Sedangkan pengembangan masyarakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*), pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-program yang dilakukan biasanya berbentuk usaha ekonomi produktif atau pelayanan kesehatan, pendidikan dasar yang sifatnya langsung dirasakan oleh penduduk setempat.

[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 42-45.

Untuk keberlanjutan pengembangan masyarakat ini, maka perlu adanya pondasi kuat yang meliputi perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial. Dalam perspektif ekologi Jim Ife mengatakan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:[15]

1. *Holistik* yang berupa eco-*centred philosophy*, yaitu penghormatan terhadap hidup dan alam, penolakan solusi linier dan perubahan organis.
2. Keberlanjutan yaitu konservasi, penurunan komsumsi, ekonomi tanpa pertumbuhan, hambatan pembengunan teknologi, anti-kapitalisme.
3. Keanekaragaman yaitu adanya nilai-nilai lain yang terinternalisasi, menghargai keberbedaan.
4. Keseimbangan yaitu yang bersifat global atau lokal, hak atau kewajiban, damai atau kerjasama.

Essensi yang terkandung dalam perspektif keadilan sosial yaitu pembangunan dapat mengurangi ketimpangan struktural yang ada, adanya perhatian terhadap kebutuhan dan hak warga masyarakat, tanpa kekerasan, demokrasi partisipatoris serta prinsip pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri.

Sementara itu dalam perspektif keadilan sosial terdapat 6 hal penting yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, ketidak beruntungan struktural; *kedua,* pemberdayaan; *ketiga,* kebutuhan; *keempat,* hak warga masyarakat; *kelima*, kedamaian tanpa kekerasan; dan *keenam,* demokrasi partisipatoris, sebagaimana akan diuraikan secara singkat berikut ini:[16]

1. Ketidakberuntungan struktural. Pembangunan masyarakat harus mampu merubah adanya ketidak beruntungan kelas, maupun ketidak beruntungan gender dalam rangka mewujudkan kadilan sosial bagi masyarakat.
2. Pemberdayaan. Memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses yaitu serangkaian kegiatan untuk mem-perkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
3. Kebutuhan. Ciri kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, absolut, komperatif, universal dan relatif.

[15] Jim Ife, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development*, terj. Sastrawan Manullang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 87-99.

[16] *Ibid*., hlm. 106-109.

4. Hak warga masyarakat. Dalam kontek pembangunan masyarakat, yang harus ditekankan adalah negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warganya.
5. Kedamaian tanpa kekerasan. Pembangunan masyarakat menghendaki sebuah proses pendekatan yang anti kekerasan.
6. Demokrasi partisipatoris. Pemerintah hendaknya mengedepankan dimensi partisipatoris di dalamnya, di mana kreativitas dan inisiatif masyarakat haruslah dipandang sebagai *input* formulasi kebijakan yang dibuat, dan kesejahteraan masyarakat haruslah dipandang sebagai *output* (tujuan akhir) dari pembangunan yang dilaksanakan.

Hal yang paling penting dari konsep yang telah disebutkan di atas adalah harus adanya upaya untuk memahami kearifan lokal masyarakat setempat yang menjadi ruh budaya masyarakat Aceh, karena hal ini sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya proses pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian adalah keberadaan *meunasah* sebagai basis pemberdayaan masyarakat di Aceh.

D. Pengertian *Meunasah*

Asal istilah *meunasah* adalah *madrasah*[17] yang berasal dari bahasa Arab, bermakna tempat belajar atau sekolah[18]. Safwan Idris juga mengatakan bahwa term "*meunasah*" secara *etimologi* berasal dari kata *madrasah* (dalam bahasa Arab) yang berarti sekolah (tempat belajar atau lembaga pendidikan).[19] Untuk nama *meunasah* sendiri terdapat penyebutan yang berbeda, ada yang menyebutnya dengan *meulasah, beulasah* dan juga *meunasah* (sebutan masyarakat secara umum). Keberadaan *meunasah* di

[17] Madrasah merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan formal dimana transmisi dan pelestarian tradisi Islam berlangsung. Pemakaian secara luas istilah ini mulai mencuat sejak abad ke11 dan 12 M atau abad ke-5 dan 6 H, terutama pada zaman Nizam Al-Mulk, seorang wazir dari dinasti Saljuk, mendirikan MadrasahNizamiyah di Bagdad. Pendirian ini memang merupakan langkah monumental karena telah memperkaya khazanah kelembagaan pendidikan di lingkungan masyarakat muslim yang sebelumnya hanya mengenal "lembaga pendidikan tradisional", yang biasanya di mesjid-mesjid dan *Dar al-khuttab*. Lihat Farid Wajdi Ibrahim dkk. *Pemetaan Kegiatan Meunasah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* Laporan Penelitian (Banda Aceh: Kerja Sama Pusat Penelitian IAIN ArRaniry dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 18. Lihat juga, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 61.

[18] Mattullada. *Agama dan Perubahan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

[19] Safwan Idris. *Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah: Antara Tradisi dan Pembaharuan*, *Dalam Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 61. Lihat juga H. Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh* (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 1.

Aceh berfungsi bukan hanya sebagai "tempat belajar" tetapi telah dijadikan sebagai pusat *(center)* pertemuan anggota masyarakat.[20]

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, *meunasah*[21] merupakan sebuah lembaga yang menjadi pilar budaya dan sekaligus *central-lini* atau pusat komando pengendalian tata kehidupan masyarakat. Pada sisi inilah, keterikatan masyarakat Aceh dengan *meunasah* sangat kuat yang diwujudkan dalam bentuk pola korelasi dan integritas dua sisi, yaitu sisi masyarakat Aceh dan sisi *meunasah* (sebagai institusi lokal masyarakat Aceh), sehingga dimana ada komunitas Aceh di situ ada *meunasah*.

Meunasah yang asal katanya dari madrasah jelas berbeda dengan Madrasah yang berkembang dewasa ini, yang merupakan lembaga baru yang muncul setelah adanya gerakan pembaharuan di Nusantara. Di Indonesia, perkembangan madrasah lebih pada fenomena "modern" yang diperkirakan baru muncul sekitar awal abad ke 20. Muncul dan berdirinya meunasah jauh lebih awal sebelum lahirnya lembaga madrasah di Indonesia. *Meunasah* merupakan lembaga yang lahir dan berakar dalam tradisi masyarakat Aceh dan telah menjadi aset sejarah yang terus diwarisi dari satu generasi kepada generasi sesudahnya.[22]

Pada setiap *gampong*[23] di Aceh --kecuali pada beberapa daerah tertentu-

[20] Aslam Nur, *Ramadhan dalam Persepsi Masyarakat Aceh, Sebuah Interpretasi Antropologi* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh, 1996), hlm. 27.

[21] *Meunasah* adalah suatu institusi adat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya adat masyarakat *gampong*. *Meunasah* merupakan bangunan fisik adat yang sederhana dan bermotif rumah Aceh. *Meunasah* juga merupakan titik sentra ibukota dan pusat kehidupan masing-masing masyarakat *gampong* serta memiliki fungsi ganda lainnya, artinya masyarakat *gampong* sangat ditentukan oleh bangunan "*meunasah*". Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 47.

[22] Farid Wajdi Ibrahim dkk. *Pemetaan Kegiatan Meunasah*, hlm. 23.

[23] *Gampong* merupakan daerah hukum paling kecil di Aceh, seperti desa di Pulau Jawa, *Dusun* di Sumatera Selatan, *Huta* di Tapanuli, *Nagari* di Minangkabau dan *Kampung* di daerah-daerah Melayu lainnya. Konsepsi pemerintahan *gampong* dilihat dari teori ilmu pemerintahan sebagai pelaksana "*Mono Trias Functions*", yaitu kekuasan eksekutif, legislative dan yudikatif menyatu dalam kekuasaan *Keuchik* selaku kepala pemerintahan gampong dengan meunasah sebagai pusat pemerintahan, yang berfungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan, hukum dan adat, politik, dan sosial budaya lainnya. Lihat T. Syamsuddin, *Pasang Surut Kebudayaan Aceh*, dalam: Ismail Suny, (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 122. Ada juga yang menyebutkan bahwa *gampong* adalah unit terkecil dari masyarakat di Aceh, yang terdiri dari beberapa rumah dan dikepalai oleh seorang *keuchik* (pimpinan *gampong*). Suatu kombinasi (gabungan) dari empat sampai delapan *gampong* membentuk suatu *mukim* yang dikepalai oleh seorang *imeum mukim*. Suatu *gampong* mempunyai meunasah (tempat pertemuan), sedangkan suatu mukim memiliki satu mesjid dan satu tempat perkuburan umum. Lihat Yunus Amir Hamzah, *Hasil Survei tentang Kedudukan Wanita Keluarga Berencana di Aceh,* dalam: Ismail Suny, (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 11-12. *Gampong* memiliki

terdapat *meunasah* yang selalu tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Secara fisik, *meunasah* merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah *gampong* atau di suatu tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh warga maupun pemakai *meunasah* lainnya. Bangunan *meunasah* pada umumnya hampir menyerupai konstruksi rumah tradisional Aceh itu sendiri, namun tidak dilengkapi dengan lorong (ruangan) dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruangan besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, *meunasah* sering dipenuhi dengan berbagai ukiran yang bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah.

Seperti halnya rumah adat atau rumah tradisional Aceh, *meunasah* dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi dari tanah atau lantai, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk anak-anak bermain. Sementara itu, pada bagian depannya kadang-kadang dilengkapi dengan beranda dengan ketinggian agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke *meunasah*,[24] karena *meunasah* dianggap sebagai salah satu tempat yang cukup strategis untuk menghabiskan waktu luang sambil beristirahat.

Selain itu bentuk asli konstruksi bangunan fisik *meunasah* menyerupai rumah adat Aceh (*rumoh Aceh*), letaknya secara umum menghadap ke arah barat (dalam konteks masyarakat Indonesia secara umum) yang menandakan arah kiblat untuk melaksanakan shalat. Bentuk asli ini perlu dipertahankan, agar ciri khas ke-Aceh-an tetap terpelihara dengan baik dan secara umum lebih mudah mengetahui arah kiblat dengan melihat bangunan *meunasah*.[25]

Dewasa ini bentuk dan kondisi *meunasah* di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Besar khususnya sudah berbeda jauh dari yang sebelumnya, hal ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan pengetahuan manusia dalam lintas arus perubahan zaman. Bangunan fisik *meunasah* kebanyakan sudah dibuat dengan konstruksi berdinding beton, beratap seng dan berlantai keramik atau semen.[26]

---

rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, harta kekayaan, dan batas teritorial. *Gampong* berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan "peradilan adat" sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki. Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan*, hlm. 44.

[24] Safwan Idris. *Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah*, hlm. 6.

[25] Farid Wajdi Ibrahim dkk. *Pemetaan Kegiatan Meunasah*, hlm. 102.

[26] *Meunasah* dalam bentuk dasar/asli memang masih terdapat dibeberapa daerah di Aceh. Biasanya terdapat di daerah pedalaman namun sudah semakin jarang ditemui, apalagi pascatsunami seperti halnya di *gampong* Rima Keuneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, yang bangunan *meunasah*-nya sudah jauh berubah dari bentuk dasarnya. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga kayu yang menjadi bahan baku utama dalam pembangunan *meunasah*, bila

Sedangkan sebelumnya konstruksi *meunasah* berdinding papan, berlantai papan maupun bambu, atau pohon pinang dan beratap daun rumbia.

Meunasah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur masyarakat *gampong* di Aceh. Keberadaanya selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sentral (*community center*), baik sebagai lembaga pendidikan, pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai pusat pemerintahan *gampong*. *Meunasah* adalah sentral dari segala bentuk kegiatan bagi masyarakat *gampong*, karenanya *meunasah* mempunyai fungsi sebagai tempat membaca Al-Qur`an dan pelajaran lain layaknya sekolah dasar, sebagai tempat shalat lima waktu, sebagai tempat shalat tarawih dan tempat membaca Al-Qur`an bersama-sama diwaktu malam pada bulan Ramadhan, tempat *kenduri* (syukuran) pada bulan Maulid, sebagai tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri, tempat mengadakan perdamaian saat terjadi sengketa antara masyarakat *gampong*, tempat bermusyawarah dalam segala urusan, tempat bermain bagi anak-anak, tempat berkumpulnya remaja putra dan putri dalam berbagai kegiatan, dan tempat mengembangkan akhlak serta wacana keislaman bagi segenap masyarakat. Selain itu *meunasah* juga dapat difungsikan seluas-luasnya, meliputi segenap aktifitas masyarakat *gampong*.

Dari dulu sampai sekarang, baik di perkotaan maupun di setiap *gampong, meunasah* masih digunakan sebagai sarana belajar, dan kondisi ini tidaklah berubah secara substansial meskipun bermunculan berbagai macam sarana lain yang memiliki fungsi yang sama dengan fungsi *meunasah*; seperti adanya pengajaran do`a shalat, praktek shalat, pengetahuan dasar tentang agama, pendidikan akhlak dan rangkaian keilmuan lainnya. Dengan demikian *meunasah* merupakan salah satu tempat yang ideal untuk pengembangan keilmuan khususnya mengaji Al-Qur`an.

Pada beberapa daerah di Aceh fungsi *meunasah* sering dibatasi dengan kegiatan keagamaan saja, yaitu terbatas sebagai tempat kegiatan perayaan hari-hari besar Islam dan tempat melaksanakan shalat pada waktu-waktu tertentu seperti shalat magrib dan shalat isya. Sementara selain pada waktu-waktu tertentu tersebut *meunasah* terkesan dibiarkan kosong, biasanya kegiatan shalat berjama`ah yang dilaksanakan di tempat tersebut dengan jumlah jama`ah yang sedikit, dapat dihitung dengan jari dan kebanyakan jama`ahnya-pun biasanya berusia lanjut. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, tentang keberlanjutan pengelolaan *meunasah* yang kekurangan kader penerus untuk mengelola *meunasah* sebagai aktifis *meunasah,* layaknya keberadaan aktifis masjid. Namun untuk masyarakat di *gampong* Rima Keneurum sampai penelitian ini dilakukan masih

dibandingkan dengan harga bahan bangunan dari beton/semen.

memanfaatkan *meunasah* tidak hanya untuk kegiatan keagamaan semata, tetapi juga untuk kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Bagaimanapun juga generasi muda khususnya para remaja adalah mata rantai yang akan mengisi kehidupan ini, jika para generasi muda rusak, maka dapat dipastikan minimal satu generasi akan hancur atau terjadinya *lost generation*, ini cukup berbahaya tentunya. Bagi para remaja atau generasi muda yang merupakan pemegang estafet kepemimpinan bangsa ke depan, maka dalam mengamalkan ilmunya sangat tepat untuk menjadikan *meunasah* sebagai salah satu wahana tempat berkiprah, terutama dalam mentransfer ilmu yang dimiliki kepada generasi setelahnya dan sebagai ajang mengasah kemampuan diri.

Keberadaan *meunasah* semestinya mampu membawa perubahan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik sebagai basis keberdayaan masyarakat di suatu komunitas, terutama dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan yang diidam-idamkan bersama, yaitu masyarakat *Baldatun Thaiyyibatul Warabbul Ghafur* atau lebih dikenal dengan masyarakat madani, *Mawaddah Wa Rahmah*.

E. Kedudukan, Fungsi, Struktur dan Manajemen *Meunasah* dalam Sejarah Aceh

Meunasah sebagai salah satu institusi adat lokal masyarakat Aceh, memiliki kedudukan, fungsi, struktur maupun manajemen tersendiri sehingga mampu bertahan keberadaannya sampai saat ini. Tentunya ada hal yang menarik dengan *meunasah* sehingga membuat keberadaan tetap menjadi eksis ditengah badai globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju serta menuntut perubahan. Setidaknya berikut ini penulis akan mencoba mengurai sedikit tentang kedudukan dan fungsi *meunasah*, struktur *meunasah*, dan manajemen *meunasah* dalam sejarah Aceh.

1. Kedudukan dan Fungsi Meunasah

Sebagaimana diketahui bersama, *meunasah* memiliki tempat yang sangat strategis dalam tata pemerintahan *gampong*[27] maupun dalam strata sosial masyarakat *gampong* di dalam masyarakat Aceh. Banyaknya persoalan yang dapat tertuntaskan di *meunasah*, menunjukkan betapa *meunasah* memiliki peran dan kedudukan yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Secara struktural, *meunasah* mendapat tempat yang cukup strategis dalam tata pemerintahan *gampong*. *Teungku*

[27] Dengan titik pusat kendali pembangunan masyarakat di *meunasah*, yang dipimpin oleh *Keuchik* dan *Teungku Sago*/*Imeum Meunasah*, serta dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*. Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan*, hlm. 24.

Imeum Meunasah adalah sebagai pemegang otoritas tertinggi di sebuah *meunasah* dan berperan sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di *meunasah*. Dalam struktur sebuah *gampong* terdapat beberapa buah lembaga adat yang kesemuanya memiliki tugas, fungsi dan peran yang berbeda walaupun antara satu dengan yang lain saling berkaitan dalam pencapaian tujuan bersama, misalnya *keuchik, teungku imeum*, *tuha peut* dan *tuha lapan,* yang kesemuanya bertugas untuk membangun *gampong* menjadi lebih baik sehingga mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap warga *gampong*. Kesemua kegiatan yang dilakukan oleh dan bersama masyarakat maupun para aparatur *gampong*, biasanya berpusat di *meunasah* karena dianggap memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat *gampong*.

Diantara beberapa lembaga adat yang ada dalam masyarakat Aceh, salah satunya yang cukup dikenal adalah *meunasah*. Secara lebih terperinci penulis dapat menjelaskan bahwa setelah kepala *gampong* atau dalam konteks Aceh sering disebut dengan *keuchik* yang memiliki tugas dibidang pemerintahan dan penanggungjawab suatu *gampong* secara umum, maka *meunasah* juga memiliki struktur, fungsi dan perannya dalam memajukan sebuah *gampong*.

Bila ditinjau fungsi *meunasah* tempo dulu, mungkin saja akan sangat berbeda dengan fungsi *meunasah* pada kondisi sekarang. Dahulu *meunasah* memiliki multi fungsi yang betul-betul difungsikan dan bisa dikatakan *meunasah* sebagai *Community Center* atau pusat kegiatan masyarakat. Namun sekarang fungsi dan kedudukan *meunasah* dalam masyarakat Aceh telah mulai berubah seiring dengan perputaran waktu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi *meunasah* akan penulis uraikan secara panjang lebar di bab III dalam buku yang sederhana ini.

2. Struktur *Meunasah*

Meunasah adalah sebuah bangunan yang berdiri di sebuah *gampong* dengan fungsi yang beragam. Dalam pelaksanaan kegiatannya, *meunasah* memiliki struktur kepengurusan secara tersendiri dengan garis koordinasi yang jelas. Siapa melaksanakan apa danbertanggung jawab untuk siapa sudah cukup jelas diatur dalam hukum adat di Aceh. Hal ini ditetapkan dengan ketentuan khusus yang telah ada dalam struktur adat Aceh yang cukup terkenal sejak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda[28] (1607-

[28] Nama Iskandar Muda masih menjadi perdebatan yang cukup alot, siapakah nama yang sebenarnya. Terdapat banyak nama untuk sultan Iskandar Muda; Selama tiga tahun pertama hidupnya, ia bernama Raja Zainal atau Raja Silan; pada hari ulang tahunnya yang ketiga ia diberi nama Raja Munawwar Syah, sebagai kenangan akan leluhurnya Raja Makota Alam yang beristrikan peri dari kahyangan. Pada hari ulang tahunnya yang kelima, ia diberi nama pancagah dan pada

1636), yaitu: *"Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiahkuala, Qanun*[29] *Bak Putro Pahang, Reusam*[30] *Bak Lakseumana".* (urusan adat dikendalikan oleh *Poe Teumeureuhom*, urusan hukum ditangani oleh *teungku* Syiahkuala, mengenai *Qanun* ditangani oleh *Putro Pahang* dan *Reusam* ditangani oleh *Lakseumana*). Yang senada dengan Hadih Maja di atas adalah "*Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Ulama, Qanun Bak Putro Pahang, Reusam Bak Bintara, Hukom dengon Adat lagee zat ngon sifeut"*. Kedua hadih maja di atas memiliki makna yang hampir sama, yaitu:

a. *Adat Bak Poe Teumeureuhom* bermakna sebagai pelambang pemegang kekuasaan pelaksana pemerintahan dan kebijaksanaan serta pelaksanaan adat.
b. *Hukom Bak Syiah Kuala atau Ulama* merupakan pelambang pelaksanaan hukum.
c. *Qanun Bak Putro* Pahang merupakan pelambang cerdik pandai atau cendekiawan yang membuat *qanun* (perda).
d. *Reusam Bak Lakseumana atau Bintara* merupakan pelambang orang yang perkasa, arif dan bijaksana dalam mengatur adat kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.[31]

Pembagian tugas ini sudah diatur sedemikian rupa, untuk dapat berjalannya roda pemerintahan-sosial kemasyarakatan. Perkembangan pembinaan adat terjadi fluktuasi, yaitu terkadang naik dan terkadang turun sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya perubahan kebijakan politik kekuasaan Pemerintahan Negara, krisis internal maupun tantangan dunia global.

---

umur sepuluh tahun ia diberi nama Perkasa Alam, yang selanjutnya ia dengan nama Johan Alam (yang hanyalah ulangan dari arti yang sama: "dunia", yang pertama dalam bahasa persi dan yang kedua dalam bahasa Arab). Dan gelar Iskandar Muda hanyalah gelar anumerta yang diberikan pada hari penobatannya sebagai raja. Lihat Denys Lombard, dalam; *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 234-235.

[29] *Qanun* adalah perundang-undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislasi yang terus berkembang. Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan*, hlm. 36 dan 43.

[30] Reusam adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan,* hlm. 36 dan 43. Ada juga yang mengatakan bahwa *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah yang tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Aturanaturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat, yang kemudian disebut adat. Lihat Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 40.

[31] Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan*, hlm. 106.

Qanun pemerintahan Aceh,[32] menyebutkan bahwa peran lembaga adat agar kembali difungsikan dalam berbagai tingkat dan jenjang yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Dengan kebijakan pemerintah sekarang kehidupan di *meunasah* yang seyogyanya dipimpin oleh seorang *imeum meunasah* (*teungku imeum*) dan perangkat lain sudah mendapat dana bantuan untuk meringankan beban yang biasanya selama ini ditanggung secara penuh oleh *teungku imeum*.[33]

Struktur masyarakat *gampong* terdapat lembaga adat yang menjadi pengelola kegiatan di *meunasah* dan mengurusi bangunan *meunasah,* yang berdiri kokoh sebagai pusat kegiatan masyarakat *gampong*. Ada sebuah ungkapan dalam masyarakat mengenai posisi dan penguasaan pengelolaan *meunasah* "pemerintahan *gampong* urusan *keuchik*, *meunasah* urusan *teungku imeum".* Ini berarti segala sesuatu yang ada kaitannya dengan urusan keagamaan khususnya mengenai penggunaan fasilitas *meunasah* semuanya menjadi tanggung jawab *teungku imeum,* walaupun dalam pengambilan keputusannya harus berkoordinasi dengan perangkat *gampong* lainnya.

Secara umum struktur kelembagaan meunasah dijalankan oleh perangkat gampong, sebagaimana telah penulis sederhanakan dalam bentuk bagan berikut ini:

[32] Untuk "*Qanun Pemerintahan Aceh*" berbeda dengan *qanun* pada masa pemerintahan kerajaan Aceh. Secara hukum keberadaan *qanun* setingkat dengan perda (peraturan daerah), namun dalam kasus Aceh menjadi sesuatu yang berbeda karena Aceh dengan otonomi khususnya (UU No. 11 tahun 2006, tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh), yang merupakan buah dari perjanjian damai antara RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang lebih dikenal dengan MoU Helsinky pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia. Lihat juga Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan*, hlm. 21. Yang menyebutkan bahwa *qanun* adalah Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan berfungsi sebagai sarana modem menjadi petunjuk bagi masyarakatnya (legitimasi kesepakatan menjadi hukum), karena sistem perundangundangan Negara mengharuskan demikian.

[33] *Qanun* Kabupaten Aceh Besar. No. 08 Tahun 2004. Tentang *Pemerintahan Gampong*. (Kota Jantho: Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, 2006), hlm. 38 dan 39.

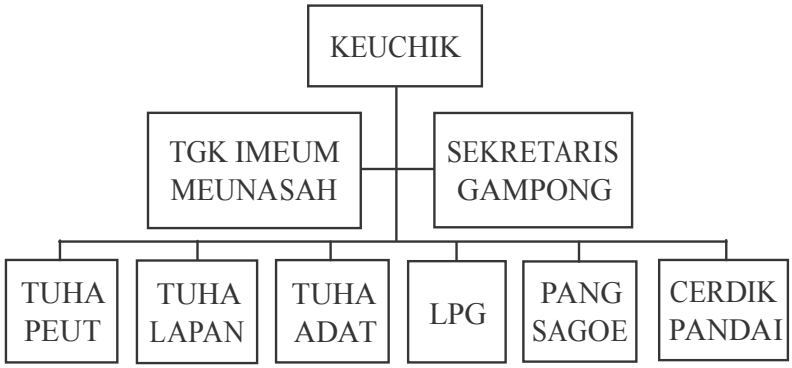

Tabel 1. Bagan struktur kelembagaan *meunasah* dalam struktur masyarakat *gampong*.

Mengenai fungsi dan peran masing-masing struktur yang termuat dalam bagan di atas, dapat penulis jelaskan sebagaimana tertuang dalam keterangan berikut ini:

1. *Keuchik*, selaku pimpinan gampong yang secara hirarkhi kepemimpinan bertanggung jawab penuh terhadap meunasah. Keuchik juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan umum di bawah camat, juga kepala pemerintahan adat yang tidak berada di bawah camat.[34]
2. *Teungku Imeum Meunasah atau petua*[35] *meunasah*, sebagai pimpinan yang mengepalai dan mengurus seluruh kegiatan *meunasah*, dan secara khusus mengurus acara keagamaan.
3. *Tuha Peut,* dengan empat orang angota. Mereka adalah tokoh masyarakat yang dituakan karena kecakapannya, berakhlak mulia, berpengalaman dan berwibawa. Keberadaan *Tuha Peut* ini juga sebagai pelaksana dan pengontrol terhadap jalannya berbagai kegiatan di *meunasah*.
4. *Tuha Lapan,* dengan delapan orang anggota. Mereka adalah penyempurnaan atau pelengkap terhadap institusi *Tuha Peut,* dengan menambah empat unsur lainnya, yaitu: intelektual, pemuda, wanita dan hartawan yang ada dalam *gampong* tersebut. Biasanya dalam kondisi tertentu *Tuha Lapan* sangat diperlukan, misalnya banyaknya penduduk disuatu *gampong* atau adanya perkara/permasalahan besar, sehingga membutuhkan orang lebih banyak lagi untuk menanganinya.
5. *Tuha Adat,* tokoh yang secara individual merupakan tokoh yang memiliki integritas moral dan pengalaman yang banyak dalam bidangnya.

[34] Badruzzaman dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan*, hlm. 12.

[35] *Petua* adalah orang yang dituakan, biasanya dipercayakan untuk mengurus sesuatu urusan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

6. *Ketua* LPG, yaitu: Lembaga Perwakilan *Gampong* yang dulunya dikenal dengan sebutan LKMD/LMD yang dalam masyarakat di Jawa masih menggunakan istilah ini. Setelah adanya *qanun* tentang pemerintahan *gampong*, maka LKMD/LMD-pun diubah namanya menjadi LPG yang juga banyak melakukan kegiatannya terpusat di *meunasah*.
7. *Pang Sago* (sisi atau sudut wilayah *gampong*), adalah kepala wilayah lingkungan *sago*-nya yang dipilih langsung oleh masyarakat di dalam wilayah *sago*-nya tersebut. Tugasnya adalah mebantu *keuchik* untuk wilayah *sago*-nya.
8. *Sekretaris gampong*,seorang pejabat *gampong* yang dipilih oleh masyarakat *gampong* untuk membantu *keuchik* dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi.
9. Cerdik Pandai, mereka merupakan perangkat *gampong* yang menjadi pelengkap persidangan musyawarah dalam menegakkan fungsi *meunasah* sebagai lembaga pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat *gampong*nya.[36]

Untuk urusan pengelolaan *meunasah*, seorang *teungku imeum* berkoordinasi dengan *keuchik* dan tokoh adat lainnya sehingga dalam setiap pengambilan keputusan selalu dapat seiring, sejalan dan selangkah dengan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan dalam masyarakat setempat. "Manajemen pengembangan yang dikembangkan dalam masyarakat khususnya dalam manajemen *meunasah* masih bersifat sangat tradisional dan cenderung berjalan di tempat dengan sistem yang masih sangat monoton", ungkap Tgk. Abdurrahman.[37]

Dari *observasi* yang dilakukan di beberapa *meunasah* di kabupaten Aceh Besar, seperti di *gampong* Cot Leuot, Cot Malem Kecamatan Blang Bintang (sebagai perbandingan) dan *meunasah gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada. Ternyata *meunasah* masih tetap pada fungsi yang sama, yaitu lebih banyak pada tataran pemanfaatan sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan pusat perayaan hari-hari besar dalam Islam serta tempat pendidikan (walaupun secara intensitasnya sudah berkurang). Namun sesekali juga digunakan sebagai tempat musyawarah warga, mungkin hal inilah yang menyebabkan manajemen *meunasah*-pun tetap sama dengan kondisi sebelumnya yang bersifat masih sangat tradisional, sehingga sangat sulit bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan.

---

[36] Badruzzaman Ismail. *Mesjid dan Adat Meunasah*, hlm. 190-191.

[37] Wawancara dengan tokoh masyarakat, Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada pada tanggal 23 September 2008.

3. Manajemen *Meunasah* dalam Sejarah Aceh

Setiap peradaban manusia memiliki ciri-ciri khusus, yang terkadang antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Aceh dikenal dengan *meunasah*-nya sebagai bangunan lembaga adat, demikian juga di Padang dengan Rumah *Nan Gadang*-nya, Surau di Minangkabau serta daerah lainnya di Nusantara. Namun demikian juga banyak peradaban yang memiliki kesamaan antara satu daerah dengan daerah lain. Contohnya pertumbuhan Islam antara satu daerah dengan daerah lain di nusantara ini memiliki kesamaan tentang sistem dan metode penyiarannya, yang berbeda adalah situasi dan kondisi lapangan/medan dakwah sehingga akan mempengaruhi pola dakwah dalam penerapannya pada tahapan aplikasi di lapangan.

Meunasah menjadi simbol sebuah daerah atau *gampong* di Aceh dan merupakan pusat kegiatan masyarakat, yang memiliki kedudukan cukup penting di mata masyarakat. Dalam lintas sejarah perkembangan keagamaan dan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam, *meunasah* dikenal sebagai lembaga pendidikan *indigenous* --yang lahir dan murni-Aceh. Lembaga ini muncul sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di kawasan ini, yang memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat, sehingga mampu menduduki posisi yang cukup sentral dalam dunia keagamaan, kependidikan dan keilmuan masyarakat serta sanggup bertahan di tengah derasnya perubahan zaman.

Meunasah merupakan warisan sejarah, budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang dalam lintasan sejarah kerajaan Islam yang pernah berkembang di kawasan ini. Keberadaan meunasah yang masih eksis dalam struktur masyarakat Aceh hingga sekarang ini diduga kuat merupakan warisan dari kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudera Pase, Kerajaan Beunua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidier, Kerajaan Islam Jaya, dan Kerajaan Islam Darussalam.[38]

Sejarah awal tumbuh dan berkembangnya *meunasah* telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Islam Peureulak. Menurut sejarah, seorang Arab Quraisy yang bernama Said Abdul Azis yang kemudian menikah dengan puteri Raja Peureulak, telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang pada saat itu masih belum berbentuk meunasah yang ada dewasa ini. Perkembangan selanjutnya seorang ulama, yaitu Tgk.

[38] Farid Wajdi Ibrahim dkk. *Pemetaan Kegiatan Meunasah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* Laporan Penelitian (Banda Aceh: Kerja Sama Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 23. Lihat juga, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 72. Untuk lebih jelasnya mengenai kerajaan-kerajaan Islam tersebut lihat juga, A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 45-65.

Muhammad Amin mendirikan sebuah pusat pendidikan di sekeliling *meunasah* (dikenal dengan Dayah Cot Kala), yang lokasinya tidak jauh dengan ibukota Kerajaan Islam Peureulak.[39]

F. Hubungan Sinergi *Meunasah* dengan Masjid dan *Dayah*

Meunasah terdapat di semua *gampong* yang ada di Aceh dengan fungsi hampir sama dengan mushalla, langgar maupun balai desa di daerah lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian --*meunasah* adalah *meunasah*-tidak dapat disamakan secara utuh dengan bangunan lain. Selain *meunasah* juga terdapat bangunan lain dengan fungsi yang sama, namun dalam konteks cakupan yang lebih luas dengan peran serta fungsi yang di miliki banyak kesamaan, yaitu masjid. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Sajada*" yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah swt.[40] Setiap orang bisa melaksanakan shalat di mana saja sepanjang terpenuhi rukun dan syarat sahnya shalat, apakah itu di rumah, di kebun, di dalam kendaraan (kapal pesiar misalnya), dan di tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi di kalangan kaum muslimin.[41] Di masjid pula tempat terbaik melaksanakan shalat Jum`at.

Masa Rasulullah saw maupun penerus sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahanpun (mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan maupun kemiliteran) di bahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Dalam bidang kebudayaan Islam, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama sekali saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga berfungsi sebagai ajang *Halaqah* atau diskusi, tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.

Biasanya dalam suatu daerah terdapat masjid yang merupakan kumpulan beberapa buah *gampong.* Ada juga yang menyebutkan bahwa masjid sebagai induk *meunasah* dalam struktur kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat Aceh. Masjid menjadi sentral peribadatan khususnya di hari Jum`at dan hari besar keagamaan lainnya seperti hari raya dengan pelaksanaan ibadah shalat hari raya, baik Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha.

---

[39] Farid Wajdi Ibrahim dkk. *Pemetaan Kegiatan Meunasah*, hlm. 24. Lihat juga, Farid Wajdi Ibrahim, *Reformasi Pendidikan Islam di Aceh*, dalam: Jurnal Ar-Raniry, edisi Sept. 2001-Febr. 2002, No. 79 (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2002), hlm. 7.

[40] Moh. E. Ayub. *Manajemen Mesjid, Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 1.

[41] *Ibid*…, hlm. 1-2.

Shalat *tarawiih*, tadarusan Al-Qur`an, peringatan maulid, peringatan Nuzul Qur`an, peringatan tahun baru Islam, *Musabaqah Tilawatil Qur`an* (MTQ) dan juga kegiatan lainnya dengan kapasitas yang lebih luas dari kegiatan di *gampong* atau kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa buah *gampong* yang menjadikan masjid sebagai titik sentral dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara geografis, idealnya sebuah masjid terletak ditengah-tengah komunitas muslim sehingga akan memudahkan bagi kaum muslimin untuk menjangkau masjid dalam setiap kegiatannya.

Dalam konteks Aceh secara umum, masjid berada di pusat kemukiman (*mukim*[42] atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lain)[43] dengan *imeum* masjid sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatannya. *Imeum Mukim* adalah kepala pemerintahan *mukim*,[44] sementara *meunasah* berkedudukan disebuah *gampong* dengan letak bangunannya di tempat yang mudah dijangkau oleh semua elemen masyarakat *gampong*. "Dalam struktur kepemimpinan, *meunasah* dipimpin oleh seorang *imeum meunasah* sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan di sana", ungkap Maimun Basri (*Keuchik* Rima Keneurum).

Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan, ada beberapa fungsi *meunasah* dan masjid yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Meunasah*

Tidak jauh berbeda dengan fungsi masjid, beberapa fungsi meunasah juga dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

a. Tempat ibadah/shalat berjamaah.
b. Dakwah dan diskusi.
c. Musyawarah/untuk mencapai mufakat.
d. Tempat penyelesaian sengketa/perdamaian.
e. Pengembangan kreasi dan seni.
f. Pembinaan dan posko generasi muda.
g. Forum asah trampil atau ketrampilan dan olah raga.
h. Pusat ibu kota dalam pemerintahan *gampong*.

---

[42] *Mukim* adalah wilayah (*territorial*) adat kemukiman, meliputi beberapa gampong yang mempunyai batas-batas tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, wewenang dan kekuasaan adat dalam kawasannya. Lihat Badruzzaman dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 37.

[43] *Qanun* Kabupaten Aceh Besar, No. 08 Tahun 2004, Tentang *Pemerintahan Gampong*, hlm. 04.

[44] *Ibid*…, hlm. 05.

2. Fungsi Masjid

Demikian juga dengan fungsi meunasah, terdapat kemiripan dengan fungsi masjid meskipun terdapat sedikit perbedaan, sebagai mana terlihat berikut ini:

a. Tempat ibadah/shalat Jum'at.
b. Tempat pengajian/pendidikan.
c. Tempat musyawarah atau penyelesaian sengketa atau perdamaian.
d. Tempat dakwah Islamiah.
e. Pusat kajian dan penyebaran ilmu pengetahuan.
f. Tempat dilangsungkannya acara pernikahan.
g. Sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat.

Berdasarkan dari poin-poin di atas menunjukkan bahwa fungsi *meunasah* menjadi sentral pembangunan masyarakat atau *Community Development Center* dan fungsi masjid menjadi sentral pilar komunikasi/ *To Traffic Communications Center*, di sini adanya keseimbangan antara *hablumminallah* dan *hablumminannas* yang sering disebut dengan istilah *"adanya keseimbangan antara Zikir dan Fikir".*

Proses pengintegrasian kedua fungsi lembaga diatas melahirkan sebuah ungkapan "*agama ngon adat lagee zat ngon sifeut",* (agama dengan adat bagaikan zat dengan sifat, satu sama lain tidak dapat dipisahkan) sehingga dapat diarahkan membangun suatu visi, yaitu dengan adat dan syariat, melahirkan aspirasi dan spirit dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui tatanan *equilibrium* pembangunan dunia dan akhirat.[45] Fungsi *meunasah* dan masjid mengandung misi dan nilai-nilai komunikasi *hablum minallah, hablum minannas*, nilai persatuan, damai, sumber ilmu dan sumber solusi musyawarah, sehingga dapat membangun hati nurani orang Aceh dengan "semangat rasa malu dan iman" kepada Tuhannya dan sesama manusia.

Kedua lembaga yang dimaksud (*meunasah* dan masjid) dapat memerankan misinya untuk mengkaji, membina dan mendayagunakan adat istiadat dan syariat sebagai aset kebudayaan Aceh, dalam berbagai format implimentasi program kegiatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang aman dan damai, *baldatun thaiyibatun warabbul ghafur*.

Hubungan *meunasah* dengan masjid dalam patron simbol budaya adat Aceh, telah dimaknai dengan *narit maja* atau yang lebih dikenal dengan *hadih maja* yaitu, *"Agama ngon Adat (hukom), lagee zat ngon sifeut*". *Meunasah* adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan sesama dalam komunitas *gampong* (antar

[45] Badruzzaman Ismail, Makalah: *Kedudukan Meunasah dan Mesjid dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh*, dipresentasikan di Banda Aceh: 2006, hlm. 1.

gampong), sehingga melahirkan adat, adat-istiadat dan tatanan adat. Sedangkan masjid dalam masyarakat Aceh dilahirkan oleh kebutuhan mukim (beberapa *gampong*), karena kebutuhan nilai-nilai aqidah dan syariat, terutama pelaksanaan shalat Jum'at.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik satu garis lurus bahwa masjid lebih banyak berperan dalam bidang syariat, dan *meunasah* lebih banyak berperan di bidang adat. Namun relasi antara masjid dan *meunasah* saling berkaitan satu sama lain (siklus dakwah/komunikatif) yang kemudian melahirkan suatu keterpaduan sikap dan prilaku yaitu, kemantapan adat yang ditopang oleh agama dengan masjid sebagai simbol dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat yang berupa *meunasah*. Kontribusi peran *meunasah* dan masjid dalam kehidupan sosialbudaya dan adat Aceh, telah memperkokoh otoritas dan hak otonomi dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan *gampong* dan kawasan *mukim*.

Merujuk pada kajian sejarah tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah Al-Mukarramah, yang pertama sekali dilakukan oleh baginda Muhammad saw adalah mencari tanah sebagai tempat untuk membangun masjid. Dengan kerja sama yang cukup sinergis antara kaum *Anshar* (penduduk asli yang menyambut kedatangan kaum muhajirin) dan *Muhajirin* (para pendatang yang hijrah bersama rombongan Rasulullah), maka dalam waktu yang tergolong singkat jerih payah Nabi dan para sahabat menghasilkan sebuah masjid yang sangat sederhana yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba.[46]

Bangunan masjid Quba terdiri dari pelepah kurma, berbentuk persegi empat, dengan enam serambi bertiang. Masjid pertama dalam sosialisasi Islam itu hanya sekedar tempat untuk bersujud, tempat shalat, dan tempat berteduh dari panas dan teriknya matahari di tanah pasir yang tandus. Sejarah mencatat, masjid Quba berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah.[47]

Bangunan yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah bukanlah sarana yang lain, melainkan bangunan sebuah masjid yang juga berfungsi sebagai fasilitas umum untuk dipergunakan bagi kepentingan umat. Masjid digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan proses belajarmengajar atau pusat pendidikan bagi umat, tempat musyawarah, tempat mengatur strategi dan taktik perang serta tempat melaksanakan berbagai kegiatan lainnya yang menyangkut masalah keummatan, baik masalah ekonomi, politik maupun sosial-budaya.

[46] Moh. E. Ayub, *Manajemen Mesjid, Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3. -

[47] *Ibid...*, hlm. 3.

Selain *meunasah* dan masjid, dalam sejarah Aceh juga dikenal bangunan lainnya yang memiliki nilai sejarah dan telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi Aceh secara khusus dan Bangsa Indonesia secara umum, yaitu *dayah*. Sebagaimana disampaikan oleh Ali Hasymi bahwa *meunasah*, masjid dan dayah memiliki tempat yang sangat strategis dalam kerajaan Aceh Darussalam, yaitu:[48]

1. *Meunasah* (Madrasah) di tiap-tiap gampong yang dapat disamakan dengan sekolah dasar *(Ibtidaiyah*). Di meunasah para murid diajarkan menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Jawi (melayu), akhlak dan sejarah Islam dengan cara bercerita.
2. *Rangkang*[49] dengan masjid sebagai pusatnya di tiap-tiap mukim dapat disamakan dengan sekolah menengah pertama (*Tsanawiyah*). Menurut ketentuan *Qanun Meukuta Alam* (pada saat itu), dalam tiap-tiap mukim harus ada satu masjid, seperti halnya di tiap-tiap gampong adanya *meunasah*.
3. *Dayah* di tiap-tiap daerah Ulee Balang dapat disamakan dengan sekolah menengah atas (*'Aliyah*). Dan *Dayah Teungku Tjhik* dapat disamakan dengan pendidikan tinggi atau akademi. Dalam Dayah, semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu yang diajarkan antara lain adalah: Fiqh (hukum Islam), Bahasa Arab, tauhid, tasawuf/ akhlak, *jughrafi* (ilmu bumi), sejarah, tatanegara, ilmu pasti, *faraidl*.

Sejarah perjuangan masyarakat Aceh telah membuktikan bahwa, "*dayah* memiliki peran yang cukup penting baik dalam masa kegemilangan Aceh (masa Sultan Iskandar Muda), penjajahan maupun dalam masa mempertahankan kemerdekaan.

Dayah berasal dari bahasa Arab, yang dalam bahasa arabnya disebut dengan "*Dzawwiyah*" yang berarti orang-orang yang berada di pinggiran atau orang-orang terasing, mengasingkan diri dari keramaian dan lebih fokus dalam menuntut ilmu agama. Dalam dunia modern juga dikenal dengan yang namanya pesantren yang di dalamnya juga mengajarkan

[48] A. Hasymi, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam; Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 7 dan 211-213.

[49] Rangkang adalah sebagai media pendidikan tingkat lanjut setelah *meunasah*, pada pendidikan Rangkang, sudah mulai di ajar bahasa Arab, dengan menggunakan buku berbahasa Arab. Juga mulai diajar ilmu-ilmu umum, seperti *jughrafi* (ilmu bumi), sejarah, ilmu hisab (berhitung), akhlak, fiqh (hukum Islam) dan lain-lain. Sementara mesjid adalah pusat dari segala kegiatan umat, termasuk kegiatan pendidikan. Jadi, mesjid merupakan madrasah tingkat menengah, yang kalau sekarang dapat disamakan dengan sekolah menengah tingkat pertama atau *Tsanawiyah*. Kebanyakan murid terus menetap di mesjid, sehingga sekeliling mesjid didirikan asrama. Lihat A. Hasymi, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam; Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 212.

ilmu-ilmu keagamaan, namun dayah tetap tidak bisa disamakan dengan pesantren. Secara bahasa orang sering menganggap bahwa *dayah* dan pesantren memiliki konotasi makna yang hampir sama, namun tetap saja *'dayah* adalah *dayah'* dan 'pesantren adalah pesantren', hal ini disebabkan oleh adanya tradisi yang berbeda antara tradisi di dayah dan tradisi di pesantren, selain kurikulum yang memang jelas berbeda.

Dayah bersifat tradisional dan dalam kurikulumnya hanya mengajarkan pendidikan kitab kuning serta kependidikan Islam klasik, sedangkan pesantren sudah bercorak lebih maju dan modern dengan kurikulum yang sudah dirubah dan cenderung meninggalkan tradisi pendidikan Islam klasik. Dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas tentang dayah maupun pesantren secara mendalam, hanya sedikit menyinggung untuk meletakkan pondasi dasar pengetahuan kita tentang lembaga pendidikan yang ada di Aceh.

Kembali kepada persoalan dasar, *dayah*[50] dan *meunasah* memiliki kesamaan fungsi dan peran dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, *meunasah* merupakan lembaga pendidikan tradisionil yang mempunyai asal usul, tradisi dan filosofi yang sama dengan *dayah*.[51] Harus diakui, dayah dengan strategi dan misi mencerdaskan anak bangsa serta basisnya para pejuang dalam mengatur taktik dan strategi perang, juga sebagai pusat kegiatan ummat, ternyata juga memiliki kesamaan dengan *meunasah*. Namun demikian juga terdapat perbedaan antara *dayah* dengan *meunasah*, kalau *meunasah* ruang lingkupnya berskala kecil untuk tingkat *gampong* dan dimiliki oleh setiap *gampong* yang ada di Aceh, sementara *dayah* berskala lebih besar dan sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan *meunasah, dayah* dalam sistem pengajarannya lebih menekankan pada masalah pendidikan keagamaan dan lebih bersifat tradisional, yang sampai hari ini masih tetap bertahan.[52]

Fakta sejarah Aceh membuktikan betapa *dayah* memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Hasbi Amiruddin;[53] ada 4 kegunaan atau manfaat *dayah* bagi

---

[50] Dayah terdapat hampir pada tiap-tiap daerah *Uleebalang* (sekarang setingkat dengan kecamatan). Kadang-kadang ada Dayah yang berpusat pada mesjid, dengan menyediakan sebuah balai utama sebagai aula, yang digunakan menjadi tempat mengajar dan sembahyang berjamaah. Lihat A. Hasymi, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan*, hlm. 212. Untuk lebih jelasnya lihat juga Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Cet. 2, Lhokseumawe-Aceh: Nadiya Foundation, 2007.

[51] Lihat Safwan Idris, *Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah*, hlm. 67.

[52] *Ibid*..., hlm. 69.

[53] Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal*, hlm. 58.

orang Aceh, yaitu: (1). Sebagai pusat belajar agama; (2). Sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah; (3). Agen pembangunan; dan (4). Sekolah bagi masyarakat. Aceh dalam perjalanan sejarah pernah menjadi tujuan bagi para calon ilmuan dari berbagai belahan dunia untuk menuntut ilmu di Aceh, yang kemudian disebarkan ke daerah asalnya masing-masing; diantaranya adalah seorang ulama terkenal Syekh Muhammad Yusuf al-Makkasari (1626-1699 M) dari kepulauan Melayu, Syekh Burhanuddin yang kemudian menjadi ulama besar dan mendirikan Surau di Minangkabau, Daud alPattani (sekarang menjadi nama satu wilayah di Thailand) ulama terkemuka yang belajar di Aceh selama dua tahun dengan Muhammad Zain al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi.[54]

Ketika perang meletus, kemudian pihak kerajaan sudah sangat kewalahan dalam melawan para penjajah, maka ulama dayah atau pihak dayah dilibatkan untuk mengkomandoi perang dengan semangat jihadnya. Pada akhirnya semangat jihad itulah yang telah menggegerkan Belanda dalam peperangan melawan Aceh, sebagai perintah Allah untuk berperang di jalan-Nya dalam mempertahankan tanah air-bangsa, pada dasarnya inilah yang menjadi kekuatan tak terkalahkan. Tampak dengan jelas di sini bahwa peran yang dimainkan oleh dayah cukup besar, dengan terlibatnya para *teungku-teungku* dayah yang didukung oleh segenap rakyat pada waktu itu (dengan semangat ideologis yang terkandung dalam hikayat *Prang Sabil*[55]).

Selain punya andil dalam peperangan melawan penjajah, *dayah* juga menghasilkan orang-orang terdidik di bidang agama yang menjadi pelaku atau agen perubahan dalam masyarakat. Memang masih terkesan keterlibatan mereka hanya dibidang agama, namun juga terdapat bukti yang menjelaskan bahwa orang-orang *dayah* juga mampu berkiprah di bidang lain dalam masyarakat, misalnya; Tgk Chik di Pasi memimpin

[54] Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama*, hlm. 59-60.

[55] Hikayat *Prang Sabil* berupa karya sastra dari ulama-ulama Aceh untuk membangkitkan semangat kaum muslimin Aceh dalam melawan belanda (yang disebut kafir/penjajah), bait-baitnya tidak hanya berisikan tentang ajakan untuk berperang melawan penjajah belanda, tetapi lebih jauh dari itu; ternyata juga berisikan semangat ideologis yang dibungkus dalam ajaran Islam. Ternyata hikayat prang sabil ini cukup ampuh dalam menggerakkan kaum muslimin untuk berperang melawan *kaphe* Belanda (Kafir; non muslim yang melakukan penjajahan terhadap rakyat Aceh), sehingga membuat kewalahan kaum penjajah. Lihat Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 105-136. Ideologi *Prang Sabil* yang sumber-sumbernya sampai saat ini masih dapat dijumpai dalam buku-buku tentang Aceh berasal dari abad ke XVII, dihidupkan lagi melalui *hikayat-hikayat prang sabil* pada pertengahan kedua abad XIX, ketika Negeri Aceh diserang oleh bangsa asing yang dianggap kafir. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 167-168.

masyarakat membangun sistem irigasi, seperti yang dilakukan oleh Tgk. Chik di Bambi dan Tgk. Chik di Rebee.[56] Demikian juga dengan alumni dayah yang kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi umum misalnya, dengan dasar kemampuan agama yang telah diwariskan dayah kepadanya, telah menjadikan ia sebagai sosok intelektual yang mampu membawa ide-ide segar kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh.

Dayah juga dapat menjadi tempat pendidikan yang sangat murah bagi masyarakat, sehingga persoalan ekonomi bukanlah masalah utama dalam mengenyam pendidikan di *dayah*. Belajar di *dayah* tidak membutuhkan uang banyak, siapapun bisa belajar di *dayah* walaupun ia sangat miskin. Hal ini karena umumnya, *dayah-dayah* tidak membebankan murid-murid untuk membayar uang pendidikan. Inilah keistimewaan *dayah* dibandingkan lembaga pendidikan formal lainnya yang membutuhkan uang yang banyak untuk dapat belajar di sana.

Di sisi yang lain, hubungan erat yang terjalin antara *dayah* dan *meunasah* adalah eksistensi alumni *dayah* yang menjadi *Teungku Imeum Meunasah*, sehingga terkesan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh M. Isa Sulaiman bahwa alumni *dayah* umumnya akan kembali ke kampung halamannya atau pergi ke suatu tempat lain untuk membangun *dayah*/pesantren yang baru, seperti Teungku H. M. Wali Al-Khalidi yang membangun *Dayah* Darussalam di Labuhan Haji tahun 1940. Sedangkan sebagian besar sisa yang lain sewaktu pulang ke kampung akan ditabalkan sebagai ulama rendahan berupa *Teungku Imeum* atau *Teungku Khatib* yang memimpin ritual keagamaan berskala masjid atau *meunasah*.[57]

Meunasah, masjid dan *dayah* sebagai tonggak sejarah kini menjadi sumber *re-inspirasi* dan *re-spirit* untuk menemukan masa depan, tidak hanya untuk kaum *lokalisme*, tetapi juga untuk *non-lokalisme* dalam membangun harkat dan martabat ke-Aceh-annya. Membangun Aceh, tidak secara individual atau kelompok melainkan wajib dalam satu kebulatan tekat dan aksi nyata. Segmen-segmen *deferensial*, harus dijadikan komponen perekat dan pengikat dalam satu arah ideal dan konsepsional dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagai bagian dari peradaban dunia yang penuh kedamaian (*peace civilization*).

[56] Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama*, hlm. 65-67.

[57] M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 34-35.

BAB III
MEUNASAH BAGIAN DARI KEARIFAN LOKAL

A. Meunasah dalam Defenisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *(local wisdom),* pengetahuan setempat *(local knowledge)* atau kecerdasan setempat *(local genious)* yang dalam bahasa Malaysia disebut juga dengan kearifan tempatan. Menurut Saini dalam Masrizal (2015)[1], Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan (kemampuan untuk bertahan) dan daya tumbuh (kemampuan untuk tumbuh) di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal, yang dalam istilah bahasa Melayu disebut dengan kearifan tempatan.

Menurut Saifuddin Dhuhri, dalam Sutoro Eko, (2007: 146)[2], mengatakan bahwa pembangunan di Aceh dengan konservasi kearifan lokal akan menjadi ruh dari semangat untuk mengembalikan peradaban besar (sebagaimana juga diungkapkan oleh Ali Hasjmy dalam buku ini). Salah satu prinsip yang dipegang dalam filosofi masyarakat Aceh lebih kuat mengakarkan kehidupan pada tradisi dan masa lalu sebagai kebanggaan dalam romantisme sejarahnya.

Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat mesti digali, dikembangkan, guna dimasukkan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, karena dalam pembinaan spiritual keagamaan di *gampong* (pedesaan) ketokohan

---

[1] Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015).

[2] Sutoro Eko, dkk, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: IRE Press, 2007).

dari seorang pemimpin informal (tokoh agama) itu yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat; sebagai sebuah perumpamaannya.

Selain itu kearifan lokal juga dapat berupa benda maupun media yang digunakan oleh komunitas tertentu dan tentunya hal tersebut boleh jadi menjadi ciri khas mereka, yang memiliki nilai-nilai lokal tertentu yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat di sana, dalam buku ini yang dimaksudkan salah satunya adalah *meunasah*.

Aceh sebagai sebuah provinsi yang memiliki keistimewaannya dengan kekuatan legitimasi hukumnya, menjadikan *meunasah* sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat dalam membicarakan berbagai urusan publik, sebagaimana peran dan fungsinya dalam literatur sejarah Aceh. Selain persoalan sosial kemasyarakat, meunasah juga digunakan sebagai tempat ibadah layaknya sebuah masjid (kecuali shalat jum'at) di masa kerasulan Muhammmad saw, yang dijadikan tidak hanya untuk shalat semata namun juga sebagai tempat membicarakan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan persoalan keummatan lainnya.

Menariknya adalah *Meunasah* di Aceh dijadikan sebagai suatu tempat yang sakral bagi masyarakat *sebagai* tempat bermusyawarah dalam segala urusan, tempat mengadakan perdamaian saat terjadi sengketa dan juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak, pusat beraktifitas remaja dalam berbagai kegiatan, dan tempat mengembangkan akhlak serta wacana keislaman bagi segenap masyarakat (dalam kajian sejarah; meskipun dalam konteks kekinian fungsi dan peran meunasah sudah mengalami pergeseran). Moga saja *meunasah* sebagai sebuah bentuk kearifan lokal akan mampu membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang masih sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, amin.

Masyarakat Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki budaya yang unik, layaknya bangsa-bangsa atau suku yang menyebar di seantero Indonesia tercinta ini. Keunikan dan kekhasan budaya lokal inilah yang selanjutnya disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*), boleh jadi antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia terdapat perbedaan yang cukup jelas, sehingga bila tidak dilihat sebagai sebuah fakta sosial yang patut disyukuri maka akan menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Salah satu ontoh kecil dari keunikan di atas adalah terjadi perbedaan nilai dalam masyarakat Aceh dengan masyarakat yang ada di luar Aceh seperti di pulau jawa misalnya, dalam hal mengangkat tangan sebagai sebuah penghargaan bila bertemu dengan teman atau tegur sapa terhadap orang yang dihargai (dalam masyarakat Aceh dibalut dengan nilai religius Islam). Di Aceh mengangkat tangan sebagai ucapan salam atau tegur sapa harus dilakukan dengan tangan kanan, jangan sekali-kali mencoba

mengangkat tangan yang sebelah kiri karena akan berakibat lain. Jika anda mengangkat tangan sebelah kiri maka itu bermakna tantangan bagi orang yang menerima tegur sapa anda dengan menggunakan tangan kiri tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh memahami bahwa suatu pekerjaan yang mulia haruslah dimulai dari arah sebelah kanan (dalam kasus ini dengan tangan sebelah kanan), ini terilhami oleh nilai-nilai agama Islam.

Kasus yang terjadi di Aceh berbeda bila terjadi di dalam masyarakat Jawa, di dalam masyarakat Jawa tegur sapa mengangkat tangan kanan atau kiri tidak jadi masalah. Untuk masyarakat di Jawa tidak ada persoalan dengan mengangkat tangan sebelah kanan atau sebelah kiri, sehingga masyarakat dari berbagai daerah lainpun yang berbeda budayanya dengan masyarakat Jawa harus menghargai dan memaklumi keunikan budaya nusantara ini. Begitu juga dalam konteks penerapan nilai-nilai budaya Islam di Aceh yang sudah mengakar, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang salah oleh pihak luar yang mungkin belum mengenal budaya lokal masyarakat Aceh.

Sebagaimana telah penulis kupas secara panjang lebar pada bab sebelumnya, tentang sebuah institusi lokal masyarakat Aceh yang berupa *meunasah,* menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang mesti dihargai dan dijunjung tinggi keberadaannya di dalam komunitas masyarakat Aceh. Tentunya dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat lokal di Aceh, juga harus mencoba untuk menggali potensi apa yang dimiliki oleh *meunasah* dalam rangka mendukung program yang akan dijalankan. Bicara *meunasah* tidak hanya berarti kita bicara tentang sebuah media tempat berkumpulnya masyarakat *gampong*, tapi lebih jauh *meunasah* harusnya mampu menjadi inspirasi dalam menggalakkan pembangunan masyarakat dengan semangat kejayaan *meunasah* di masa lalu (kerajaan Aceh Darussalam).[3]

Salah satu indikator keberhasilan dalam pemberdayaan adalah efektif atau tidakkah pemberdayaan yang sedang atau sudah diterapkan pada masyarakat. Pada tahap intervensi yang dilakukan terhadap masyarakat apakah sudah pro pada rakyat yang benar-benar membutuhkan, atau malah menjadikan mereka sebagai bagian dari proyek untuk memudahkan dalam mengambil dana demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Di sisi yang lain masyarakat akan semakin menderita akibat 'pemberdayaan' yang berbuah menjadi 'memperdayakan' masyarakat.

Banyak kebijakan (kegiatan yang bertopeng pada 'pemberdayaan') yang selama ini berdalih *pro-poor* (berpihak pada kaum miskin/lemah)

[3] Lihat Muslim A. Djalil, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi X, 2008. Kanwil Depag NAD. hlm. 25.

tapi pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar *pro-rich* (berpihak pada golongan kaya/mampu). Mengutip Edi Suharto "Di Indonesia masih banyak kebijakan publik yang *pro-rich*, ketimbang *pro-poor*. Padahal, sebagai sebuah perangkat *governance* yang penting, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya".[4] Ini yang semestinya harus dilakukan oleh berbagai pihak di Aceh, khususnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan di *gampong* Rima Keneurum. Pemerintah dan juga LSM atau NGO[5] yang bergerak dalam bidang pemberdayaan harus selalu didampingi dan diingatkan, bahwa kebijakan yang salah akan sangat merugikan rakyat begitu juga sebaliknya.

Di sini dibutuhkan berbagai macam upaya untuk mendapatkan dukungan secara formal dan informal menyangkut rencana pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap masyarakat pascatsunami dengan berbasiskan institusi budaya lokal yaitu *meunasah*. Setiap lembaga, idealnya dalam merumuskan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di *gampong* Rima Keneurum juga perlu memperhatikan enam langkah dalam perumusan kebijakan:[6] *Pertama* adalah Identifikasi Isu, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini, yang diberikan cenderung bukanlah yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak memperoleh hasil yang maksimal.[7] Belum lagi adanya program *top-down* dari lembaga yang seolah-olah dipaksakan kepada masyarakat, dalam hal ini karena masyarakat juga membutuhkan dana maka bagi mereka itu tidak masalah.

Terkadang lembaga juga melakukan penyeragaman dalam pemberdayaan terhadap masyarakat, dengan alasan memudahkan administrasi untuk pertanggung jawaban maka satu jenis kegiatanpun tidak jadi masalah. Misalnya adanya program peternakan maupun pembuatan kue, maka masyarakat juga harus memanfaatkan kesempatan untuk berternak atau buat kue, meskipun mereka bukan berprofesi sebagai peternak atau pelaku industri kecil rumah tangga pembuat kue. Salah satu yang menyebabkan program gagal disebabkan oleh kebijakan yang

[4] Edi Suharto, *Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*, dalam www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008.

[5] Selanjutnya dalam tulisan ini untuk menyebutkan LSM atau NGO penulis menggunakan istilah lembaga, sementara itu untuk pemerintah penulis langsung menyebutkan dengan pemerintah.

[6] Lihat Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 26-27.

[7] Hal ini diungkapkan oleh Nurlina, warga *gampong* Rima Keneurum yang juga sebagai penanggung jawab Posyandu. Selain itu informan juga terlibat dalam program pengembangan ibu-ibu dengan jenis kegiatan pembuatan kue dan pelatihan menjahit yang menurutnya juga tidak mencapai hasil yang maksimal. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

salah, yaitu memberikan suatu tanggung jawab kepada orang yang bukan ahli di bidangnya. Hal ini pula yang terjadi pada program pemberdayaan ekonomi warga yang dilakukan oleh Care International di *gampong* Rima Keneurum, yaitu untuk lima kelompok dampingan dana abadi di sana, yang diperuntukkan bagi 138 kepala keluarga (KK) dan setiap KK mendapat tujuh juta rupiah.[8] Dana yang begitu besar sebagaimana yang tersebut di atas (bila dijumlahkan mencapai Rp 0.966 miliar rupiah atau Rp 966 juta rupiah yang beredar dalam masyarakat) seharusnya sudah dapat mensejahterakan atau minimal membuat masyarakat menjadi lebih berdaya (belum lagi dana lainnya yang dikucurkan oleh lembaga lain), namun berdasarkan amatan penulis tidak banyak yang berubah hanya perabotan rumah tangga yang bertambah, sementara usaha produktif sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai (dari 138 KK yang dibantu hanya lima KK yang masih produktif, dengan tiga KK usaha kios dan dua KK membuat kue/ *home industry*).

Kedua adalah merumuskan agenda kebijakan, dalam hal ini yang paling penting adalah pada tahap perencanaan kegiatan harus benar-benar matang. *Ketiga* adalah melakukan konsultasi, dukungan berbagai pihak juga akan sangat menentukan program dapat berjalan dengan baik atau tidak. *Keempat* adalah menetapkan keputusan. Setelah melalui proses identifikasi masalah, agenda kegiatan dan konsultasi baru dapat diambil keputusan sekaligus untuk pelaksanaannya. *Kelima* adalah menerapkan kebijakan. Dan *keenam*; mengevaluasi kebijakan.

Proses demi proses tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini:

[8] Budi adalah salah satu staf Care International (dulu di bidang *Community Development Facilitator* dan sekarang sebagai *Senior accountability and outreach officer*) yang pernah menangani kegiatan Care di *gampong* Rima Keneurum, wawancara dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2008. Dalam hal pemanfaatan dana ini terdapat dua fersi, budi sendiri mengatakan program ini tidak dapat dijalankan secara baik oleh masyarakat karena masyarakatnya tidak amanah. Pada fersi yang kedua Aidarus mengatakan bahwa program yang dibuat oleh Care International hanya namanya yang besar, sementara di dalam keropos dan buktinya adalah uang yang diberikan kepada masyarakat secara bertahap (Tahapan pemberian uang untuk usaha; 40%, 30% dan 30% (untuk rencana usaha), jadi kurang bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam bahasa Aceh disebutkan *'peng si seen peu lheuh'* (uang yang sedikit cukup buat beli apa). Masyarakat maunya dana yang disediakan disalurkan langsung kepada masyarakat secara utuh, sehingga mereka dapat memanfaatkan dengan baik.

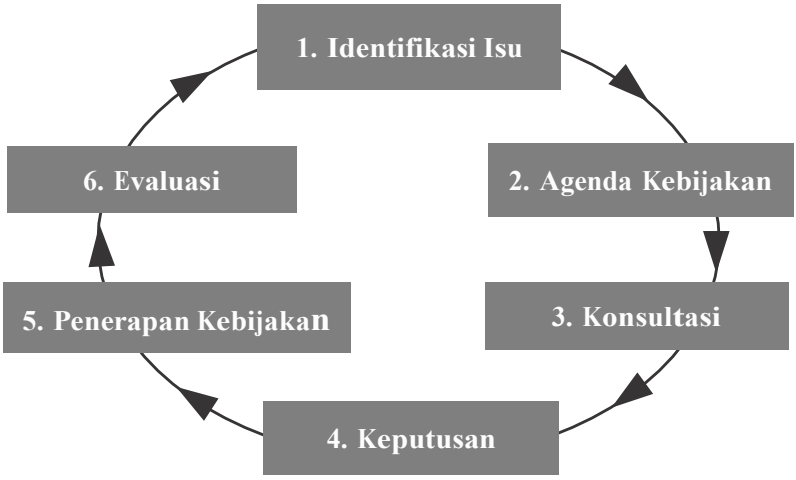

Tabel 2. Gambar Lingkaran Kebijakan (sesuai urutan)

Gambar di atas merupakan konsep ideal yang mestinya dapat dipraktekkan secara utuh para konseptor maupun aktor yang berperan di lapangan. Secara umum kerangka konseptual di atas dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai bagian tak terpisahkan dengan program dan tentunya mereka tidaklah diposisikan sebagai objek pemberdayaan melainkan sebagai subjek pemberdayaan.

1. Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan, apalagi untuk masyarakat yang dilanda bencana alam seperti tsunami. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan keseriusan dan idealnya melibatkan berbagai komponen di dalamnya, baik yang terlibat langsung dengan pemberdayaan itu sendiri yang disebut dengan objek pemberdayaan, maupun yang tidak langsung seperti perangkat pendukung lainnya untuk dapat memastikan bahwa pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu *gampong* yang mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam, *gampong* Rima Keneurum membutuhkan banyak sentuhan dari berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung. Bangunan fisik yang telah hancur juga dibangun kembali seperti rumah, tempat kegiatan masyarakat, tempat ibadah, dan juga tempat pendidikan. Selain itu juga pembangunan di bidang non fisik seperti pembangunan mental spiritual dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Berdasarkan informasi dari warga Rima Keneurum sebagaimana diungkapkan oleh Mahdi,[9] bahwa dalam proses pembangunan di *gampong* Rima Keneurum juga melibatkan masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat dilibatkan yaitu hanya beberapa orang saja sebagai *representative* dari masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan adanya struktur kekuasaan di *gampong*, sehingga setiap ada rekrutmen tenaga lokal sering sekali mendapatkan intervensi yang berlebihan dari aparatur *gampong* sehingga berdampak pada kualitas kinerja di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Budi[10] bahwa ada beberapa masyarakat yang cerdas namun tidak dimanfaatkan oleh aparatur *gampong* karena dianggap tidak bisa bekerja sama.

Secara umum penulis melihat masyarakat dilibatkan dalam proses pemberdayaan tapi cenderung diposisikan pasif, terkadang masukan dari masyarakat berlalu begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Mahdi[11] pembangunan perumahan dengan menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai standar, seperti kayu untuk rumah dengan kualitas yang sangat rendah, contoh kongkritnya adalah ada beberapa buah rumah yang dibangun oleh BRR di *gampong* Rima Keneurum sangat tidak layak huni. Menyangkut dengan kasus rumah layak huni yang dibangun oleh BRR secara fisik bangunan sangat tidak layak untuk ditempati, sebagai salah satu contoh kasus adalah yang dibangun oleh PT Ramai Purna Jaya Sejati, Banda Aceh.[12] Proyek yang bernilai Rp 1,1 miliar lebih itu menyisakan masalah, tidak hanya kepada pengguna rumah yang tidak layak huni tetapi juga bagi kontraktor yang terjerat hukum akibat dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kontrak atau kesepakatan awal atas pembangunan rumah tipe 36 tersebut. Kasus ini menjadi gambaran cukup nyata bagi para pengambil kebijakan betapa penting artinya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program mereka, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Disaat masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan rumah, maka sangat rawan terjadimya penyelewengan yang kemudian pada akhirnya juga akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

---

[9] Narasumber adalah masyarakat Keneurum yang berprofesi sebagai tukang kayu, menurut pengakuannya sampai wawancara dilakukan belum pernah mendapat bantuan yang sifatnya pemberdayaan kecuali bangunan rumah tipe 3x6 dengan kondisi yang juga butuh banyak perbaikan. Penulis melihat kondisi informan juga layak untuk dibantu dalam pemberdayaan, karena cukup ulet dan pekerja keras. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

[10] Wawancara dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2008.

[11] Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

[12] Lihat, *Saiful Hayat Dituntut Empat Tahun Penjara*, dalam: www.serambinews.com tertanggal 09 September 2008, diakses pada tanggal 18 November 2008.

Demikian juga dengan bantuan kambing dan sapi yang dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain pemerintah, pihak lembaga juga terlibat dalam pemberian bantuan kepada masyarakat seperti dari Care International yang memberikan bantuan cumacuma untuk peningkatan usaha masyarakat. Namun sayangnya bantuan yang diberikan juga masih ada yang tidak tepat sasaran, misalnya masih ada warga masyarakat yang belum mendapat bantuan dengan alasan yang tidak jelas. Salah satu contohnya adalah bapak Mahdi, mengapa tidak mendapatkan bantuan seperti warga lain pada umumnya, hanya karena adanya anggapan kalau ia adalah orang yang mampu. Padahal pascatsunami masyarakat yang menjadi korban semuanya harus memulai hidupnya dengan merangkak dari awal lagi, karena semua harta kekayaan sudah tersapu tsunami.

Kehadiran *Children Centre* yang dikenal dengan sebutan CC, menjadi warna tersendiri dalam proses pemberdayaan masyarakat pascatsunami di *gampong* Rima Keneurum terutama dalam pelibatan warga sekitar. CC mengambil peran dalam bidang perlindungan anak, khususnya yang menjadi korban tsunami. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh CC terhadap masyarakat cukup jelas terlihat, yang ditandai dengan pelibatan warga masyarakat dalam berbagai kegiatannya. Bentuk kegiatan pelibatan masyarakat diantaranya adalah dalam program *case assistance*[13] yang melibatkan keluarga klien (orang tua angkat anak yang berasal dari keluarga dekatnya).[14]

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan juga terlihat dengan jelas dalam pembentukan Yayasan Perlindungan Anak (YPA) Cut Nyak Dhien dan pembentukan Play Group yaitu tempat anak-anak belajar dan bermain yang sampai saat ini masih eksis berdiri, walaupun mengalami pasang surut. Wujud pelibatan masyarakat di sana adalah yang menjadi pengurus merupakan warga sekitar, sehingga proses keberlanjutannya kegiatan atau program yang dijalankan juga menjadi lebih terjamin. Sebagai salah satu dimensi yang dapat menopang berlanjutnya program YPA dan Play Group (berubah status hukumnya menjadi PAUD, yaitu

[13] Program *case assistance* adalah bantuan yang diberikan oleh unicef (badan PBB untuk menangani anak) berupa uang secara cuma-cuma untuk anak yatim-piatu secara rutin selama 6 bulan. Bantuan ini diberikan kepada orangtua angkat anak yang dipergunakan untuk kepentingan anak itu sendiri (yang berumur dibawah 18 tahun) yang menjadi anak dampingan CC, dengan cara meningkatkan keuangan ekonomi keluarga asuh. Hasil wawancara dengan Amri. S salah seorang pengurus CC dari tahun 2005 sampai saat wawancara dilakukan. Narasumber adalah warga setempat dan juga sebagai staf di CC yang merupakan petugas lapangan untuk menangani program *case assistance*. Wawancara dilakukan dalam ruangan kantor CC.

[14] Hasil wawancara dengan Amri. S. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

Pendidikan Anak Usia Dini) adalah adanya dana tetap yang dianggarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, dari anggaran tahunan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau APBA.

Sebagaimana diungkapkan oleh *Teungku* Rahman[15] Setiap tahunnya YPA dan PAUD[16] mendapat alokasi anggaran untuk biaya operasional sebesar Rp 15 juta. Namun yang paling penting menurut *Teungku* Rahman adalah keberadaan YPA sebagai sebuah lembaga pengontrol dan pendamping bagi masyarakat dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang menyangkut dengan persoalan perlindungan anak dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak pelatihan terhadap masyarakat telah mereka lakukan dan juga kampanye tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu dan bertanggung jawab terhadap anak dan keluarga mereka. Untuk penyelenggaraan PAUD, selain memberdayakan masyarakat lokal juga telah memberi arti yang cukup penting dalam mencerdaskan anak-anak di Rima Keneurum secara khusus dan anakanak di *gampong* tetangga secara umum yang mengantar anaknya untuk dididik di sana.

2. Efektivitas Bantuan Asing Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Bantuan asing pascatsunami yang melanda Aceh dan Nias (sebagian Sumatera Utara) telah banyak mengalir, di bawah koordinasi BRR yang dibentuk pemerintah dengan kewenangan setingkat Menteri. Lembaga semi pemerintah ini dibentuk dengan tujuan mempercepat birokrasi dalam proses percepatan pembangunan Aceh-Nias pascatsunami. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami. Data menunjukkan banyak bangunan yang telah dibangun dalam rangka proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, untuk *gampong* Rima Keneurum saja BRR telah membangun 84 unit rumah, lembaga Care 46 unit rumah, PU membangun 7 unit rumah, Mercy Corps merehab 1 unit *meunasah*,

[15] Narasumber adalah *Teungku Imeum Meunasah gampong* Rima Keneurum dan juga sebagai salah seorang penasehat YPA. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008 di *meunasah gampong* Rima Keneurum.

[16] PAUD ini juga memiliki nama yang sama dengan YPA, yaitu Cut Nyak Dien. Dari hasil observasi, penulis melihat antusiasme warga untuk mengantarkan anak-anak mereka ke PAUD Cut Nyak Dien cukup tinggi, terbukti dengan jumlah murid yang mencapai 25-30 orang anak hadir pada setiap harinya. Selain dari pengajar (Nurlina dan Darna) yang sangat bersemangat dalam mendidik para murid-muridnya, juga fasilitas yang dimiliki oleh PAUD yang cukup memadai (fasilitas yang dibantu oleh *Children Center* Unicef-Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui YPA Cut Nyak Dien) telah menyebabkan warga menjadi tertarik untuk mengantarkan anak-anaknya belajar di sana.

Pemerintah juga membangun 1 unit gedung PKK dan pembangunan polindes (pos bersalin desa) atau pustu (puskesmas pembantu) dilaksanakan oleh Plan.[17]

Pembangunan infrastruktur yang berupa rumah untuk masyarakat yang tidak lagi memiliki rumah akibat bencana, jelas sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sebagai tempat untuk berteduh dari terik panasnya matahari dan hujan yang melanda. Meskipun dalam pembangunan perumahan ada yang masih bermasalah hingga kasusnya mencuat sampai ke pengadilan akibat pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, namun secara umum sudah cukup baik. Artinya secara umum dalam pembangunan rumah masyarakat di *gampong* Rima Keneurum sudah maksimal.

Pembangunan polindes juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Rima Keneurum secara umum, ini adalah sebuah indikasi positif terhadap keberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, karena mereka memiliki banyak pilihan sebagai rujukan dalam berobat (selain polindes juga terdapat puskesmas yang tidak terlalu jauh yaitu sekitar 1.5 km jaraknya dari *gampong* Rima Keneurum).

Bangunan *meunasah gampong* Rima Keneurum yang direhab oleh Mercy Corps kini juga dimanfaatkan oleh segenap warga *gampong* dan para tamu yang singgah. Hal yang menarik dari *meunasah* ini adalah bangunannya 80% berbahan beton dan juga sudah ada serambinya atau teras di halaman muka, bangunan *meunasah* menjadi lebih luas. Sebagaimana dipahami secara umum, *meunasah* menjadi pusat kegiatan masyarakat dan bahkan sebagai pusat pemerintahan *gampong*. Dikarenakan kantor *keuchik* juga berada di komplek *meunasah*, bahkan berdempetan dengan *meunasah* maka segala aktifitas administrasi *gampong* juga berpusat di *meunasah*, kecuali hal-hal yang sifatnya praktis yang bisa dilakukan di tempat lain selain di *meunasah*, seperti di *Kedee Kupi*[18] maupun di rumah.

---

[17] Lihat, Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Rencana Desa (Village Planning) di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Final Februari 2008 Desa Rima Keneurum, Peukan Bada (Banda Aceh: P.T. Multi Karadiguna Jasa, 2008), hlm. III-2. Program pembangunan rumah dan fasilitas *gampong* di atas merupakan bagian dari program perencanaan pembangunan desa (*village planning*) yang salah satu wujudnya adalah hasil kesepakatan rembuk warga, pada September 2007.

[18] *Kedee Kupi* atau warung kopi adalah tempat masyarakat Aceh menghabiskan waktu luangnya untuk minum kopi sambil berdiskusi. *Kedee Kupi* dengan bentuk bangunan yang terbuka dan berada di sisi jalan umum, dewasa ini (khususnya pascatsunami) menjadi tempat yang cukup sentral dalam masyarakat Aceh, hal ini dikarenakan *Kedee Kupi* menjadi tempat berkumpulnya orang-orang (masyarakat) dari berbagai latar belakang kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. *Kedee Kupi* ini menjadi media komunikasi yang cukup baik dalam proses transformasi budaya dan informasi serta lobi-lobi kepentingan berbagai pihak, baik pemerintah dengan lembaga,

Meunasah selain dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan berupa salah berjamah, pengajian dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya, dewasa ini (pascatsunami) juga dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan, pelatihan, pengorganisasian masyarakat dan pembagian paket bantuan serta berbagai macam kegiatan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa *meunasah* dapat berdaya guna bagi masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar termanfaatkan dengan baik. Demikian juga dengan pembangunan polindes yang salah satu bangunannya juga dimanfaatkan untuk kegiatan PAUD Cut Nyak Dien.

Fasilitas jalan *gampong*, drainase, air bersih, sanitasi dan listrik secara umum juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun demikian ada beberapa item yang disebutkan di atas dalam pemanfaatannya tidak begitu memuaskan, seperti drainase dengan kualitas bangunan (campuran semen dengan pasir) yang kurang kuat, sehingga mudah roboh atau retak; air bersih yang pada saat awal-awal tsunami menjadi kebutuhan dasar masyarakat sangat dirasakan keberadaannya dalam memenuhi kebutuhan air untuk mandi, mencuci dan konsumsi. Namun berdasarkan amatan penulis, sampai saat ini masyarakat Rima Keneurum masih membutuhkan suplai air bersih yang dulunya dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Care, Plan, Islamic Relief dan juga Wahana Amal Sesama Makhluk Allah (WALSAMA). Hal ini disebabkan karena ketersediaan air bersih bagi masyarakat masih di bawah standar yang dianjurkan oleh pihak kesehatan, karena air sumur warga banyak yang keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi dan hanya bisa untuk mencuci serta mandi saja; sementara itu sanitasi masyarakat masih kurang memadai, sehingga lingkungan masih kelihatan kurang bersih dan rawan terhadap penyakit.[19]

Selain pemberdayaan dalam bentuk penyedian infrastruktur yang berupa fasilitas bangunan, sehingga masyarakat memiliki pilihan-pilihan dan terwadahi dalam melaksanakan berbagai kegiatan, juga ada yang tidak kalah pentingnya yaitu pembinaan mental atau *skill* yang berupa keterampilan bagi masyarakat terhadap berbagai bidang keahliannya.

Berbagai pelatihan aneka keahlian telah dilaksanakan untuk masyarakat, diantaranya pelatihan bordiran dan menjahit, pelatihan

---

pemerintah dengan unsur masyarakat dan lain sebagainya yang secara umum bersifat pendekatan awal secara personal.

[19] Hasil observasi penulis serta wawancara dengan beberapa orang warga Keneurum mengenai fasilitas *gampong* yang telah dibantu oleh pihak luar, baik pemerintah maupun NGO. Lihat juga, Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Rencana Desa (Village Planning) di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Final Februari 2008 Desa Rima Keneurum, Peukan Bada (Banda Aceh: P.T. Multi Karadiguna Jasa, 2008), hlm. II-39.

manajemen usaha kecil menengah yang difasilitasi oleh Care dan juga pelatihan pendidikan ramah anak dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kerja sama CC Peukan Bada dan LBH Anak Banda Aceh. Ini semua dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar segera pulih untuk membangun kembali Aceh yang telah porak-poranda akibat tsunami, tidak hanya kemampuan dalam bekerja untuk mendapatkan pemasukan secara *financial* tetapi juga dalam hal untuk dapat membina dan memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik, serta terciptanya keluarga bahagia yang jauh dari kekerasan dalam keluarga.[20]

Pada masa *emergency* (keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera) telah banyak bantuan yang diberikan secara langsung tanpa ada aturan birokrasi yang mengikat, seperti bantuan yang berupa makanan kebutuhan sehari-hari dan pakaian serta tempat sementara untuk berteduh. Seiring dengan keadaan yang semakin membaik maka sejalan itu pula aturan-aturan untuk mengikat dan sifatnya mengatur, secara perlahan mulai ditegakkan kembali demi terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pascatsunami selain menguntungkan masayarakat secara umum, juga menuai banyak masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah pembuatan rumah yang tidak sesuai standar (rumah bantuan BRR untuk *gampong* Rima Keneurum sebanyak 84 unit), sebagaimana yang tertera dalam kontrak sebelumnya sehingga mengakibatkan masyarakat dirugikan.[21]

Terlepas dengan berbagai aturan yang ada, kasus di atas merupakan sebuah gambaran sederhana betapa ketimpangan masih saja terjadi dalam pembangunan di sana, kasus ini memberikan dua makna yang berbeda. Makna yang *pertama,* dengan terungkapnya kasus di atas memberikan sinyalemen negatif, yaitu betapa masyarakat lemah dalam melakukan kontrol terhadap bangunan yang sedang dibangun sehingga sampai memunculkan kasus yang tidak diinginkan tersebut. Di sisi yang *kedua*, kasus ini memberikan makna yang positif terhadap keberdayaan masyarakat yang telah mampu mengangkat ketimpangan yang terjadi, sehingga adanya sangsi yang diberikan bagi pihak yang dianggap dan terbukti bersalah dalam kasus tersebut.

Di beberapa media masa lokal seperti harian surat kabar Serambi Indonesia, Rakyat Aceh dan media masa nasioanal seperti kompas

[20] Wawancara dengan Nurlina pada tanggal 28 September 2008 dan dengan Amri. S pada tanggal 09 Oktober 2008.

[21] *Saiful Hayat Dituntut Empat Tahun Penjara*, dalam www.serambinews.com tertanggal 09 September 2008. Data tentang jumlah rumah yang dibangun BRR dalam: Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan*, hlm. II-3.

menyebutkan terjadinya penggelapan dana, penggelembungan harga dan lain sebagainya dari berbagai proyek pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Ini memberikan gambaran bahwa ada yang salah dengan pembangunan yang telah atau sedang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di tengah-tengah masyarakat Rima Keneurum, penulis juga mendengar ketidakpuasan terhadap bantuan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga maupun pemerintah; seperti adanya ungkapan bantuan yang diberikan bersifat *cilet-cilet* (red. Aceh; tidak serius, bahkan terkesan main-main), sehingga kami juga tidak serius. Aidarus juga mengatakan bahwa NGO hanya berorientasi pada proyek semata, sedangkan masyarakat sebagai pelengkap penderita agar dana dapat dikucurkan oleh donor mereka (donator dari NGO-NGO atau pemerintah).[22]

Sementara itu, keberadaan CC menurut Aidarus bukanlah NGO karena tidak memberikan uang kepada masyarakat. Menariknya di sini adalah keberadaan CC sudah mendapat tempat yang cukup baik di mata masyarakat Rima Keneurum, karena banyak kegiatannya yang sudah menyatu dengan masyarakat seperti penyelenggaraan PAUD yang disuport oleh CC hingga sekarang, mereka mulai bisa hidup mandiri dengan keswadayaan mereka sendiri. Penerimaan masyarakat yang cukup baik akan keberadaan CC di *gampong* Rima Keneurum hingga saat ini, menurut hemat penulis lebih pada persoalan pendekatan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan *meunasah* dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat, seperti pengadaan pengajian rutin pada setiap hari jumat untuk ibu-ibu dan menghidupkan kembali Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), sehingga membuat masyarakat secara emosional menjadi lebih dekat dengan petugas di CC yang berkantor di *gampong* tersebut dari pertengahan 2006 hingga saat ini.

Beberapa kasus di atas cukuplah memberikan penjelasan kepada kita, bahwa betapa banyak bantuan asing yang diberikan, namun tidaklah mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi. Ternyata uang atau finansial yang banyak bukanlah segala-galanya, tanpa memperhatikan kearifan lokal (budaya masyarakat setempat) yang didasari pada kebutuhan yang rasional maka pembangunan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Misalnya bagaimana memanfaatkan *meunasah* sebagai sumber ideologi dan media aksi dalam melakukan proses pemberdayaan oleh berbagai lembaga yang masuk di dalam suatu komunitas masyarakat di Aceh, dalam hal ini adalah *gampong* Rima Keneurum. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa *meunasah* adalah tempat yang suci dan netral dalam hubungan sosial mereka.

[22] Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

Meunasah sebagai sumber ideologi mestinya mampu menempatkan *meunasah* sebagai ruh dalam proses pemberdayaanmasyarakat yang dilakukan oleh lembaga. Ideologi masyarakat Aceh yang bersumberkan pada nilai-nilai relegiusitas keislaman telah menjadikan *meunasah* sebagai tempat yang sakral bagi masyarakat Aceh, sehingga jika proses pemberdayaan terhadap masyarakatnya dilakukan dengan memanfaatkan *meunasah* sebagai landasan ideologis maka akan mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat setempat dan akan berdampak pada keberhasilan program yang akan dijalankan.

Meunasah sebagai media aksi adalah upaya pemanfaatan *meunasah* dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang berpusat di suatu *gampong*. Sebagai lembaga adat yang mendapatkan posisi strategis dalam masyarakat, memiliki nilai tawar lebih yang akan mampu menggugah dan menarik simpati masyarakat *gampong* terhadap kegiatan yang dibuat dengan berpusat di *meunasah*. Sebagai media aksi *meunasah* sering dimanfaatkan oleh lembaga dalam berbagai kegiatan di *gampong* Rima Keneurum, seperti dalam pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh Care, BRR, Mercy Corps, LBH Anak Banda Aceh dan beberapa lembaga lainnya bersama masyarakat setempat.

Walaupun pertemuan demi pertemuan telah dibuat bersama masyarakat setempat, kenyataannya program yang telah didiskusikan secara bersama juga tidak berhasil diterapkan dengan baik dan hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Budi[23] terjadi karena masyarakat yang tidak amanah dan tidak serius dalam menjalankan usahanya sesuai dangan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu lanjut Budi, dalam struktur pemerintahan *gampong* Rima Keneurum terjadinya ketidakcocokan antar aparatur *gampong* sehingga mengakibatkan terjadinya *miss communication* yang berakibat pada terhambatnya program pembangunan *gampong* baik fisik maupun mental.[24] Penulis melihat dalam kasus ini telah terjadinya

[23] Informan adalah staff di Care International yang bertugas sebagai *Community Development Facilitator* bertanggung jawab untuk *gampong* Rima Keneurum, wawancara dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2008.

[24] Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan beberapa orang warga yang tidak mau namanya disebutkan. Mereka mengatakan antara *Keuchik* dan *Teungku Imeum Meunasah* terdapat hubungan yang kurang harmonis, demikian juga antara *Keuchik* dengan Ketua Pemuda dan beberapa tokoh masyarakat *gampong* yang telah terbagi pada dua kubu besar, yaitu kubu *keuchik* yang baru dan kubu *keuchik* yang lama. Hal ini berbeda sekali dengan kepemimpinan *gampong* di masa silam, yaitu *keuchik* diangkat secara aklamasi oleh masyarakat *gampong* dengan perwakilan *Tuha Peut* sebagai legislative di tingkat *gampong*. Namun pada masa kerajaan Aceh dulu, jabatan *keuchik* itu bersifat turun temurun yang pada dasarnya diangkat oleh *uleebalang* (pada masa sekarang setingkat dengan bupati/walikota) melalui *mukim* di daerah masing-masing. Lihat Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, jilid I, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 72-73.

penurunan kharisma seorang *keuchik* dimata masyarakat *gampong* yang dipimpinnya, hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi beberapa *keuchik* sebelumnya yang memiliki kharismatik yang tinggi, sehingga pernyataan ataupun kebijakan *keuchik* tidak ada yang berani menentangnya karena didukung oleh mayoritas penduduk *gampong*.

Badruzzaman Ismail[25] dalam menyikapi lemahnya proses pemberdayaan masyarakat di Aceh mengungkapkan bahwa moralitas dan mentalitas bangsa sudah demikian bobroknya, baik internal orang Aceh sendiri maupun yang non Aceh. Hal ini menyebabkan pihak asing menjadi tidak lagi percaya dengan kita, dan diperparah lagi dengan munculnya sikap masyarakat yang *Imperior* yaitu kita menganggap diri kita tidaklah sehebat orang luar/asing, yang pada akhirnya juga akan mengikis mentalitas sumberdaya manusia lokal. Dalam hal ini seharusnya segenap masyarakat Rima Keneurum secara khusus dan Aceh secara umum, dapat memanfaatkan institusi lokal *meunasah* sebagai pusat kegiatan masyarakat *gampong* yang telah lama menjadi kebanggaan rakyat Aceh.

B. Pemberdayaan Masyarakat Pascatsunami

Pascatsunami masyarakat Aceh secara umum menjadi trauma terutama bagi yang merasakan secara langsung dahsyatnya gempa dan gelombang tsunami, dan pada saat yang sama mereka juga butuh makanan untuk hidup. Sementara itu masyarakat yang pada umumnya bekerja di daerah pesisir telah kehilangan lahan pekerjaannya, namun demikian mereka menjadi sibuk dengan urusan masing-masing dalam menata kembali hidupnya pascabencana.

Banyak model pemberdayaan masyarakat pascatsunami yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun lembaga. Ada yang melakukan dengan cara peningkatan kapasitas individu dan ada juga yang melakukan penguatan secara kelembagaan. Secara individu biasanya dilakukan untuk menghilangkan trauma akibat bencana maupun pemberdayaan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga mereka memiliki banyak pilihan dalam hidupnya.

Pascatsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 ternyata masyarakat Aceh sangat kuat secara mental, buktinya tidak ada pasien rumah sakit jiwa di Banda Aceh yang bertambah akibat tsunami. Hal ini disebabkan karena masyarakat Aceh lebih siap terhadap bencana yang melanda, karena mereka menganggap bencana yang mereka alami

[25] Informan adalah Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), wawancara dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2008 di kantor MAA Banda Aceh, Beliau juga sebagai akademisi yang saat ini mengajar di IAIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Unsyiah di Fakultas Hukum, Darussalam Banda Aceh.

sebagai cobaan Tuhan untuk hambanya. Nilai religius yang bersumber pada ajaran Islam inilah yang telah mampu membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai religius tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Pemberdayaan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat pada masa-masa awal tsunami sulit dilakukan, mengingat masyarakat masih trauma dan harus menata hidupnya dari awal kembali. Mereka pada umumnya lebih bersifat konsumtif dalam menerima bantuan dimasa-masa awal pascatsunami, dan inilah yang kemudian membahayakan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan baik oleh lembaga maupun pemerintah. Sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan disaat-saat awal pascatsunami, namun umumnya peran itu diambil oleh masyarakat yang tidak terkena langsung dampak dari tsunami. Sementara masyarakat yang terkena dampak langsung umumnya masih dalam tahap penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru pascabencana.

Tentunya penulis ingin menggambarkan bahwa masing-masing lembaga mengambil perannya tersendiri, sesuai dengan misi dan visi lembaga yang telah mereka sepakati. Sebagaimana telah penulis gambarkan sejak awal pada bab satu, setidaknya ada tujuh buah lembaga yang ikut ambil bagian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami. *Pertama*: BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias, disebabkan Aceh mengalami kerusakan terparah dalam bencana alam gempa disusul gelombang tsunami ini, maka Acehlah yang mendapatkan skala prioritas dalam pembangunannya.

Masa tanggap darurat pada saat pascatsunami, banyaknya bantuan yang terus mengalir dari berbagai belahan dunia dan juga dari dalam negeri. Ini mengharuskan pemerintah membuat team koordinasi khusus, untuk menangani bantuan yang masuk supaya lebih teratur dalam penerimaan maupun penyalurannya kepada masyarakat. Sebagai sebuah lembaga besar yang dibentuk presiden dengan kewenangannya setingkat mentri, maka banyak kegiatan yang telah mereka lakukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Secara lebih khusus dalam pemberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, BRR terlibat dalam pembangunan perumahan, jalan dan sanitasi serta bantuan lainnya yang bersifat kebutuhan konsumsi sehari-hari, namun yang paling ril bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah bangunan rumah yang telah mereka bangun dengan segala kekurangannya.

Kinerja BRR sebagaimana pernah penulis singgung di atas dalam realitanya juga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, setidaknya penulis juga mendapati ada beberapa rumah di

gampong Rima Keneurum yang diperuntukkan bagi korban tsunami yang sudah tidak memiliki rumah, ternyata sangat tidak layak pakai disebabkan kualitas rumah yang buruk.[26] Warga hanya ditanya oleh pihak BRR dimana tanah mereka untuk dibangun rumah, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh petugas.

Hal tersebut di atas sungguhlah amat menyedihkan, karena rumah yang dibangun tanpa memberdayakan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasannya, mereka hanya menjadi objek pemberdayaan bukan sebagai subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Muhammad Yunus (peraih hadiah nobel *Gremeen Bank*) mengatakan dalam konsep, ketika kaum miskin (dalam hal ini korban tsunami) dilihat sebagai objek, maka para pembuat kebijakan berarti telah meluputkan potensi luar biasa golongan miskin. Mereka tidak bisa melihat orang miskin sebagai aktor-aktor independen, yang mampu menjadi wira-usaha-wan yang mempekerjakan diri mereka sendiri dan menciptakan pekerjaan buat orang lain.[27]

Cara yang semestinya harus dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri sejak dari merancang konsep bangun hingga pada pelaksanaan kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat, sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan yang pro rakyat. Sudah seharusnya sebagai individu-individu unik yang memiliki kekuatan serta kemampuan yang berbeda untuk diberdayakan dalam setiap waktu dan kesempatan, bukan malah sebaliknya dengan memperdaya masyarakat lemah (sebelum diberdayakan) menjadi masyarakat tertindas.

Hak-hak masyarakat untuk membangun rumahnya kembali secara swadaya seharusnya dapat diwujudkan oleh pemerintah. Dan BRR sebagai agen pemerintah (*government of agent*) harusnya dapat menjadi pelaku perubahan *agent of changes* di tingkat kebijakan sehingga mampu membawa perubahan berarti bagi masyarakat Aceh secara umum dan

[26] Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan ada beberapa bangunan yang tidak layak pakai, seperti salah satunya adalah rumah milik Bapak Razali di lorong Bahagia sangat tidak layak untuk ditempati. Selain kualitas kayu yang buruk juga kualitas beton yang tidak sesuai standar kelayakan (campuran semen dan pasir yang tidak seimbang). Sebagai contoh antara pintu muka rumah dengan pintu belakang tembus pandang, akibat renggangnya ikatan kayu pintu, belum lagi beberapa rumah warga yang lain seperti rumah faisal yang tidak jauh dari rumah Bapak Razali dengan atap yang keropos, berbubuk (kayu dimakan rayap) dan atap yang bocor, sehingga jika hujan tiba rumah kemasukan air hujan. Padahal dana untuk pembuatan setiap rumahnya yang dianggarkan BRR mencapai 56 juta per-rumah, namun dalam pelaksanaannya masih sangat mengecewakan yaitu tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan. Observasi dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2009 di *gampong* Rima Keneurum.

[27] Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 13.

gampong Rima Keneurum secara khusus daripada hanya menjadi agen proyek. Penulis melihat BRR masih kurang memanfaatkan *meunasah* secara intensif sebagai media pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga pemberdayaan terhadap masyarakat tidak mencerminkan ruh *meunasah* di dalamnya yang penuh dengan budaya musyawarah dan sarat akan nilai-nilai religius Islam sebagai agama mayoritas penduduk Serambi Makkah ini. Namun terlepas dari itu semua, kita harus akui bahwa banyak hal yang telah dilakukan oleh BRR dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kedua adalah Dinsos (Dinas Sosial) Provinsi NAD bekerja sama dengan Unicef (*United Nation Children Fund*), yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani urusan anak dengan program *Children Center* (CC)-nya, CC yang berada di *gampong* Rima Keneurum disebut dengan CC Peukan Bada. Darma Muslim[28] mengatakan, CC yang mengambil fokus kegiatan dalam bidang perlindungan anak (*child protection*) dengan berbagai programnya, seperti pemberdayaan anak, pendidikan anak, *case assistance* berupa bantuan financial perbulannya dan *livelihood* untuk meningkatkan perekonomian pengasuh dan anak. Selain itu pihak Dinsos juga memberikan bantuan sosial yang lain seperti paket bantuan sosial untuk masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan juga menyentuh anak-anak di sekolah dan masyarakat umum untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Di sekolah misalnya dengan membentuk komite siswa (yang terpusat di SMP dan SMA Peukan Bada) dan di dalam komunitas membentuk komite anak yang mereka memiliki tugas dan hak yang sama selaku anak, dalam hal ini CC juga mengambil peran dalam penguatan kapasitas siswa ataupun anak di komunitas agar semakin tanggap dengan persoalan yang dihadapi oleh mereka maupun rekan-rekannya yang kurang beruntung.

Target minimal yang diharapkan dengan komite siswa adalah untuk memberdayakan siswa-siswi dalam memahami hak anak yang selama ini cenderung terabaikan oleh orang dewasa, demikian juga dengan komite anak yang bergerak di tengah-tengah komunitas. Helmi[29] mengatakan dengan terbentuknya komite anak, maka dia bersama teman-temannya sedikit banyaknya telah dapat mengetahui hak-haknya sebagai seorang anak, dan ikut untuk memperjuangkan nasib teman-temannya yang kurang beruntung (karena banyak hak mereka yang belum terpenuhi, seperti pendidikan dll).

[28] Informan adalah mantan Koordinator lapangan *Children Center* Peukan Bada, yang bekerja sebagai staff CC dari tahun 2006 sampai 2010. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2008 di kantor CC Peukan Bada, *gampong* Rima Keneurum.

[29] Ketua Komite Anak Peukan Bada, yang berasal dari *gampong* Rima Keneurum. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

Wujud partisipasi dalam masyarakat (komunitas) CC terlibat dalam mempelopori, menjadi fasilitator dan mediator dalam pembentukan Yayasan Perlindungan Anak Cut Nyak Dien, dengan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar (termasuk organisasi tingkat kecamatan) dalam memahami hak-hak anak serta mencegah sedini mungkin kemungkinan-kemungkinan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Maimun Basri[30] mengatakan keberadaan CC telah memberikan banyak hal bagi masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, dari melakukan pendampingan terhadap anak pascatsunami, pembinaan remaja dan juga pelatihan serta memfasilitasi berbagai kegiatan, termasuk pembentukan Yayasan Perlindungan Anak (YPA) Cut Nyak Dien. Tidak hanya itu, CC juga terlibat dalam pemberian bantuan yang lebih bersifat carity (bantuan cuma-cuma) daripada *empowerment*, karena umumnya kebutuhan yang habis dipakai seperti peralatan mandi dan alat-alat sekolah.

Children Center dalam kegiatannya selain memanfaatkan kantornya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, juga sering sekali memanfaatkan *meunasah* sebagai pusat kegiatan anak-anak dengan kegiatan bermain bersama dan belajar. *Meunasah* memiliki makna yang lebih bagi CC, sehingga dalam kegiatannya senantiasa menempatkan *meunasah* pada posisi yang penting, seperti dalam kegiatan musyawarah dengan warga, pelatihan, sosialisasi program bahkan samapai pembagian bantuan untuk warga juga memanfaatkan fasilitas *meunasah*.

Ketiga adalah Care International (dalam penulisan selanjutnya akan penulis sebutkan 'Care' saja), mereka mengambil peran dalam pembentukan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), pemberdayaan kaum perempuan, dan penguatan kelembagaan PKK yang bekerjasama dengan pihak kecamatan. Selanjutnya Care juga mengambil peran untuk pembangunan rumah bagi korban tsunami, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri mengingat mandat utama yang diperoleh oleh Care dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh bukanlah dalam pembangunan rumah, sehingga menjadi hal yang wajar jika dalam pelaksanaannya mengalami banyak masalah.

Mahdi mengatakan satu hal positif yang dilakukan oleh pihak Care dalam pembuatan rumah dengan melibatkan warga dalam mengelola rumah yang akan dibangun, juga bertanggung jawab terhadap material bangunan, namun sayangnya masih terjadi penggelembungan harga dan material bangunan juga ada yang hilang, belum lagi kualitas bangunan yang rendah. Akhirnya pihak Care sendiri manjadi tidak begitu percaya lagi dengan masyarakat, masyarakat juga demikian juga mencurigai pekerja

[30] Informan adalah *keuchik gampong* Rima Keneurum kecamatan Peukan Bada. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

lapangan bekerja di Care. Pelibatan warga dalam pembangunan rumah oleh Care sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, namun sayangnya orang yang dipilih untuk menanganinya bukanlah orang yang tepat sehingga bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru.

Budi[31] mengatakan kebijakan pembangunan rumah warga ini diambil sebagai sebuah strategi Care untuk dapat masuk ke *gampong* Rima Keneurum, yang kemudian mereka memasukkan program pemberdayaan masyarakat dan program psikososial. Terhadap kasus yang terjadi, pihak Care sebagaimana diungkapkan oleh Budi meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan untuk mengganti kerugian Care dan masyarakat atau memilih jalur hukum. Akhirnya kerugian yang dialami Care dan masyarakat keneurum diganti oleh pihak yang terbukti bersalah dan masalahnyapun dianggap selesai.

Usaha pembentukan UKM oleh Care dilakukan dengan melibatkan 5 buah kelompok usaha yang terdiri dari 138 KK, dengan pemberian modal usaha sebanyak tujuh juta rupiah per-KK dengan total anggaran mencapai 0.966 miliar atau 966 juta rupiah. Aidarus mengatakan program bantuan inipun tidak membuahkan hasil yang maksimal selain barang kebutuhan rumah tangga yang bertambah, ini disinyalir disebabkan karena pencairan dana untuk usaha dilakukan secara bertahap yaitu; 40%, 30% dan 30% (untuk rencana usaha). Aidarus berpendapat dengan pemberian uang secara bertahap tidak efektif, masyarakat yang mau beli barang untuk berjualan misalnya menjadi lebih tinggi modal yang harus dikeluarkan untuk beli barang dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dalam jumlah besar. Selain itu kesannya Care tidak serius dan mempermainkan warga (karena warga menganggap uang itu adalah milik mereka, dan Care hanya bertugas untuk menyalurkannya).

Budi, dalam menanggapi proses pencairan dana yang dilakukan secara bertahap berargumen lain, menurutnya ini sengaja dilakukan untuk memastikan penggunaan dana dapat dipergunakan dengan baik dan mudah dikontrol yaitu bila tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka uang sisa akan distop. Hal ini juga berdasarkan kegelisahan pihak Care yang tidak begitu yakin terhadap penggunaan dana yang begitu besar akan mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Namun demikian pada akhirnya seluruh dana dapat diserap oleh masyarakat, walaupun dalam mengukur tingkat keberhasilan program terjadi perbedaan penafsiran.

Untuk terealisasinya program, begitu dana sudah berhasil di-serap oleh warga atau kelompok dampingan maka program itu dianggap sudah

[31] Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2008 di Banda Aceh.

berhasil. Berbeda halnya dengan konsep pemberdayaan, tidak hanya dana yang mampu diserap secara penuh oleh masyarakat, tetapi lebih pada bagaimana terjadinya perubahan dalam masyarakat itu sendiri, apakah dengan bantuan itu masyarakat akan lebih berdaya atau malah semakin menimbulkan ketergantungan pada lembaga pemberi bantuan. Setelah melakukan diskusi singkat dengan beberapa warga keneurum tentang bantuan dana oleh Care ini, penulis merasa lebih yakin bahwa masyarakat ternyata belumlah berdaya. Indikasi ketidakberdayaan tersebut adalah warga masih mengharapkan bantuan lebih banyak lagi dari pihak Care secara khusus dan lembaga lain pada umumnya.

Nurdiana[32] mengatakan, pemberdayaan kaum perempuan dengan usaha *home industry* (seperti pembuatan kue dan menjahit) dan penguatan kelembagaan ibu-ibu PKK bekerjasama dengan pihak kecamatan masih tetap berlangsung, walaupun pihak Care sejak wawancara ini dilakukan telah mulai menarik diri dalam kegiatan di masyarakat Keneurum, mengingat semakin mengecilnya dana yang dimiliki oleh Care. Berdasarkan hasil pengamatan penulis hanya terdapat lima orang warga yang tetap eksis dengan usahanya yaitu; tiga KK usaha kios dan dua KK usaha membuat kue/*home industry* yang menjadi salah satu program pemberdayaan kaum perempuan di *gampong* Rima Keneurum, selebihnya sudah *off* atau tidak jelas keberadaan usahanya itu. Dalam kegiatan pendampingan masyarakat khususnya kaum ibu, Care memanfaatkan *meunasah* sebagai tempat pelatihan, penyuluhan, pemberian bantuan (biasanya di halaman *meunasah*) maupun musyawarah antara pihak Care dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya yang *keempat* adalah Plan, yang ikut andil dalam pembangunan fasilitas kesehatan berupa polindes (dalam hal ini plan hanya membangun sarana bangunan, tidak menyentuh pemberdayaan secara lebih khusus). Saat ini polindes sudah dimanfaatkan masyarakat untuk kepantingan kesehatan dan juga sebagai gedungnya untuk tempat pendidikan sementara kegiatan anak-anak Play Group, yang umumnya juga merupakan putra dan putri warga masyarakat setempat. Kehadiran polindes telah menggantikan posisi *meunasah*, yang sebelumnya kegiatan posyandu dilaksanakan di *meunasah* namun sekarang setelah adanya polindes kegiatan posyandu dialihkan tempatnya ke polindes, tidak lagi di *meunasah*.

Kelima adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Banda Aceh, mereka terlibat dalam penyadaran hukum bagi masyarakat,

[32] Salah seorang staf Care yang terlibat aktif dalam pendampingan ibu-ibu di *gampong* Rima Keneurum, informan juga melakukan kegiatan lapangan bersama masyarakat di tempat yang sama. Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2008 di Kecamatan Lamlhom, Aceh Besar.

terutama untuk penyadaran akan bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan terbinanya masyarakat yang aman, damai, rukun dan sejahtera. Mereka sifatnya hanya memberikan pelatihan dasar untuk penyadaran hukum bagi warga Rima Keneurum. Pelatihan dan penyadaran hukum yang dilakukan oleh LBH Anak Banda Aceh ini menggunakan *meunasah* sebagai tempat pelatihan, pada masa sebelumnya untuk menggunakan *meunasah* sebagai tempat pelatihan yang berbau isu gender menjadi tabu dilaksanakan, sehingga jika di Rima Keneurum telah melaksanakan pelatihan tersebut di *meunasah* maka itu menjadi hal baru dan menjadi pendekatan yang cukup bagus terhadap masyarakat, apalagi pada pelatihan tersebut tidak hanya melibatkan warga Keneurum tapi juga melibatkan warga sekitar.[33]

Keenam dan *ketujuh* masing-masing adalah lembaga *Lost Children Operation* (LCO) dan lembaga *Traditional Art Lace Organization* (TALOE) yang masing-masing mengambil peran dalam pendidikan, pemenuhan hak anak dan dalam bidang seni-budaya. Sebagaimana disampaikan oleh Fauzi,[34] LCO yang sampai saat ini masih eksis dalam pendidikan untuk anak di Kecamatan Peukan Bada secara khusus dan Aceh pada umumnya, tidak melakukan kegiatan pemberdayaan secara langsung untuk warga Keneurum. LCO hanya memfasilitasi anak-anak di kecamatan Peukan Bada dalam kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Jepang, dan anak-anak *gampong* Rima Keneurum juga memiliki kesempatan yang sama untuk itu.

Jamal Abdullah[35] mengungkapkan TALOE yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan 'tali' dalam perjalanan selanjutnya tidak memberikan kepanjangan dari TALOE itu sendiri. Mereka hanya memberikan makna filosofinya saja yang memiliki konotasi makna yang sama dengan tali, yaitu sebagai pengikat masyarakat Aceh, mereka mencoba untuk menghidupkan kembali kesenian Aceh seperi seni tari untuk diajarkan kepada anak-anak dampingan CC yang juga menjadi

[33] Pada saat pelatihan tersebut di atas, penulis juga turut berpartisi pasi dalam menyukseskan acara yaitu menjadi penghubung antara CCLBH Anak Banda Aceh dan warga sekitar. Acara dilaksanakan pada bulan November 2007.

[34] Direktur LCO berkedudukan di *gampong* Lamhasan yang bersebelahan dengan gampong Rima Keneurum. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008 di *gampong* Lam Teungoh tempat kediaman Informan.

[35] Informan adalah Direktur Taloe yang juga mantan manager taloe disaat mereka masih aktif terlibat dalam kegiatan di gampong Rima Keneurum. Wawancara dilakukan di Sagan Yogyakarta pada tanggal 12 November 2008, disaat informan datang ke Yogyakarta (karena penulis sangat sulit mendapatkan informasi tentang keberadaan TALOE, setelah menarik diri dalam kegiatannya di *gampong* Rima Keneurum akhir tahun 2007 silam).

anak dampingan mereka. Berbagai alasan teknis seperti anak-anak kurang antusias ditambah lagi suasana menjelang Ujian disekolah, maka upaya pendampingan lewat pelatihan seni tari-pun terhenti. Kegiatan TALOE ini terpusat di ruangan CC dan sesekali di rumah masyarakat, mereka tidak menggunakan *meunasah* sebagai media latihannya, karena menganggap tidak etis untuk latihan menari di *meunasah*.

Wujud pemberdayaan masyarakat pascatsunami sebagaimana telah digambarkan secara umum di atas, yang lebih banyak melihat pada sisi peran lembaga dalam upaya pemberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum dengan *meunasah* sebagai bagian penting di dalamnya. Maka penulis merasa perlu untuk melihat pemberdayaan masyarakat secara lebih khusus, yang penulis bagi dalam tiga hal sebagai berikut; *pertama*, bidang agama, sosial dan budaya; *kedua*, bidang ekonomi; *ketiga*, bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga bidang di atas, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

1. Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Terlepas dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara keseluruhan dari pemberdayaan terhadap masyarakat di *gampong* Rima Keneurum telah membuahkan hasil dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di bidang agama ternyata pemberdayaan terhadap masyarakat kurang memperhatikan unsur penting yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu segi nilai-nilai religious yang terdapat dalam ajaran Islam, demikian juga dengan kehidupan sosial-budaya. Berdasarkan amatan penulis yang didukung oleh beberapa data lain, ternyata pembangunan yang dilakukan telah melupakan aspek kearifan lokal yang telah lama menjadi ruh dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum lebih jauh penulis mengupas tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama, sosial dan budaya di Aceh; penulis ingin menyampaikan bahwa dalam masyarakat Aceh antara agama dan adat (termasuk di dalamnya sosial-budaya) tidak bisa dipisahkan, karena telah menyatu sebagaimana *hadih maja* yang berkembang di Aceh menyebutkan bahwa *Agama ngon Adat (hukom), lagee zat ngon sifeut*, (agama dengan adat bagaikan zat dengan sifat), tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena menjadi satu dalam prilaku agama maupun adat dalam masyarakat Aceh. Hal inilah yang menjadi argumen bagi penulis untuk menggabungkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama, sosial dan budaya menjadi satu dalam pembahasannya pada bab ini.

Makna *hadih maja* di atas adalah jika ada yang berbicara tentang agama maka pada saat yang sama juga berarti telah bicara tentang adat,

karena di Aceh antara agama dengan adat sudah menyatu sebagaimana telah penulis contohkan di atas dalam kasus tegur sapa (menjalin silaturrahmi). Hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain adalah dengan tegur sapa sebagai wujud silaturrahmi yang dianjurkan agama, proses tegur sapa itu sendiri dengan mengucapkan lafadz *assalamualaikum wr wb...* yang diikuti dengan mengangkat tangan sebelah kanan sebagai budaya orang Aceh, yang terilhami oleh nilai-nilai agama yaitu sesuatu yang baik hendaknya dimulai dengan tangan kanan.

Bidang agama menjadi dimensi yang kurang tersentuh, padahal dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh dimensi keagamaan menjadi bagian tidak terpisahkan yang integral dalam pembangunan masyarakat, terutama masyarakat *gampong*. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga yang ada menganggap dimensi agama tidak menjadi bagian dalam misi kemanusiaan yang mereka emban, ini adalah pendapat yang keliru. Di saat bantuan yang sifatnya material terus-terusan diberikan kepada masyarakat, sementara sendi-sendi kehidupan agama terlupakan, maka akan menciptakan ruang kosong yang harus segera diisi sehingga terciptanya keseimbangan dan ruang kosong itu adalah nilai-nilai dari agama itu sendiri.

M. Yusuf[36] yang merupakan komponen masyarakat Aceh menyadari betul akan hal itu, kebutuhan akan nilai-nilai relegius keislaman itu tidak hanya muncul dalam sosok pribadinya sebagai seorang muslim. Hal yang sama juga mengalir dalam jiwa masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, ini dibuktikan dengan desakan dan dorongan dari warga masyarakat setempat untuk membuka pengajian di *meunasah* mereka dan M. Yusuf-pun mengangguk menandakan persetujuannya dengan usulan warga tersebut.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial-budaya dirasakan juga masih belum begitu tepat, yang salah satu prakteknya adalah budaya gotong royong misalnya. Gotongroyong yang dilakukan bersama masyarakat sebagai warisan berharga dari nenek moyang bangsa ini, terdapat beberapa kasus seperti di Rima Keneurum dalam pelaksanaannya diberikan imbalan berupa uang yang dibungkus dengan program *case for work* (upah untuk bekerja).

[36] Sebagai staf CC M. Yusuf mengatakan; secara kelembagaan, beliau tidak punya mandat untuk melakukan pengajian karena itu sudah masuk pada persoalan agama, yang lembaga sama sekali tidak mau menyentuh persoalan itu karena mereka menganggap isu tersebut sangat sensitive dan tidak menguntungkan bagi lembaga. Namun dengan dukungan staf CC yang lain serta mendapat persetujuan dan dukungan dari manajemen Dinas Sosial Prov. NAD, maka pengajian-pun diadakan untuk mengisi ruang kosong tersebut (haus akan nilai-nilai spiritualitas dan ruh keilahian). Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2008 di Ponpes Abu Mekkah, Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Alur fikir yang dikembangkan dari lembaga dalam program *case for work* adalah masyarakat yang terkena tsunami sudah tidak memiliki apa-apa lagi sehingga untuk gotong-royong pun mereka haruslah dibayar. Secara kasat mata mungkin tidak ada masalah dengan program *case for work*, namun bila kita melihat lebih jauh maka ini telah merusak nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Ketika gotong-royong dibayar dengan nilai rupiah, maka apa bedanya dengan gotong-royong sebagai sebuah pekerjaan sehingga gotong-royongpun berubah maknanya yang substansi dan itu berarti telah terjadinya perubahan sebuah budaya.

Belum lagi *meunasah* sebagai lembaga adat dan tentunya sebagai lembaga agama tempat seharusnya menjadi pemersatu masyarakat *gampong*, menjadi kurang tersentuh oleh lembaga-lembaga yang terlibat di dalam proses pemberdayaan. Selain itu juga seperti *keuchik, imeum meunasah*, dan *tuha peut* (empat orang petua kampung/desa) kurang mendapat tempat dalam proses pemberdayaan. Kepemimpinan *keuchik* dan imam atau *teungku imeum* dalam *gampong* adalah dwi tunggal yang merupakan cerminan dipakainya hukum agama dan adat dalam konsep kekuasaan di masyarakat Aceh, sementara itu *tuha peut* layaknya sebuah DPR-nya *gampong*. *Ureung tuha* atau *tuha peut* itu sendiri biasanya terdiri dari 4 orang yaitu, pemuda yang belum menikah, orang kaya, orang pandai dan ahli agama. Jika menyangkut dengan masalah yang berat maka *tuha peut* bisa digandakan menjadi *tuha lapan*, biasanya yang duduk dalam *tuha peut* orang yang berpengalaman, berkelakuan baik dan berpengetahuan luas dalam masalah adat dalam *gampong*.[37]

Pada dasarnya struktur sosial informal di Aceh telah terbukti sangat terpercaya dan mampu menghadapi berbagai tantangan konflik dan tetap terus dipercaya oleh masyarakat. Hal ini terbentuk dari integritas seorang pemimpin informal yang benar-benar terpercaya. Walaupun dalam konteks *gampong* Rima Keneurum berdasarkan amatan penulis yang diperkuat dengan hasil diskusi bersama beberapa orang warga yang tidak mau namanya disebutkan, menyebutkan bahwa keberadaan otoritas *keuchik* maupun *teungku* mendatangkan kontrofersi, namun tetap punya otoritas yang besar.

Pola penokohan terhadap pemimpin tersebut merupakan hasil pemilihan dan verifikasi sosial dalam bentuk pengakuan kemampuan terhadap sang tokoh, yang dilakukan oleh masyarakat melalui observasi yang bertahun-tahun terhadap tindak tanduk, kelakuan, akhlaq, kejujuran

[37] Lihat Afadlal dkk, *Runtuhnya Gampong di Aceh; Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, (Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), hlm. 76.

dan kemampuan serta kearifan mereka. Yang kesemuanya itu diamati dan dinilai secara langsung oleh masyarakat *gampong*-nya selama bertahun-tahun dan kemudian dianggap mampu serta sesuai dengan pola kepimpinan yang diinginkan masyarakatnya.

Seharusnya kekuatan besar yang dimiliki *gampong* sebagaimana disebutkan di atas, mampu dimanfaatkan oleh lembaga yang menghendaki terjadinya pemberdayaan terhadap masyarakat di *gampong* Rima Keneurum. Setidaknya dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, lembaga harus melibatkan *keuchik*, *teungku imeum* dan juga *tuha peut*. Hal ini menjadi penting dalam rangka *sustainable*-nya program yang akan mereka kerjakan, termasuk sebagai upaya agar program yang akan dijalankan dapat menimbulkan rasa memiliki oleh warganya. Sebagai tokoh sentral *gampong* mereka juga dapat berperan sebagai pengawas swadaya dalam pembangunan *gampong* atau sebagai *social control* dalam komunitas *gampong*, terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam wilayah hukum *gampong*.

Walaupun pada akhirnya mereka (para elit *gampong*) juga dilibatkan, namun kelihatannya hanya sebagai formalitas semata. Mereka hanya menjadi bahagian yang dituangkan kedalam wadah baru yang cendrung "tidak diakui keberadaannya" ataupun dianggap aneh keberadaannya oleh masyarakat Aceh karena sebelumnya tidak pernah ada dalam elemen struktur sosial masyarakat. Misalnya team pemantau pembangunan *gampong* bentukan lembaga sebagai *alternative* solusi terhadap masalah yang muncul, dalam bahasa yang lain disebut sebagai pengawas namun tetap berbeda maknanya dengan masyarakat adat *gampong* itu sendiri.

2. Bidang Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi di *gampong* Rima Keneurum menurut amatan penulis yang diperkuat oleh data-data dari masyarakat secara kelembagaan lebih banyak dilakukan oleh Care, hal inilah yang membuat penulis lebih banyak mengupas tentang Care dalam pemberdayaan masayarakat di bidang ekonomi, sementara lembaga yang lain mengambil peran yang berbeda. Bantuan dari Care International dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana penulis singgung di atas tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan telah gagal dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di *gampong* Rima Keneurum. Hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya keberlanjutan (*sustainablelity*) program setelah lembaga menarik diri dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat di sana. Seharusnya dengan demikian banyak bantuan permodalan baik modal usaha maupun modal ketrampilan (*life skill*) untuk masyarakat, telah mampu membuat

masyarakat menjadi berdaya atau terciptanya masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dari bantuan yang telah diberikan oleh Care misalnya untuk 138 KK dengan total tujuh juta per-KK ternyata tidak meninggalkan bekas yang berarti, sesuai target yang diharapkan (yaitu terciptanya masyarakat yang mandiri) selain peralatan rumah tangga yang bertambah. Dalam hal ini mengutip pernyataan salah seorang warga *gampong* yaitu Mahdi[38] "Bantuan yang diberikan salah kaprah atau tidak tepat sasaran, memang terjadinya pemberdayaan terhadap masyarakat namun bukan pada bidang yang digeluti sebelumnya". Dalam kasus ini agak sulit menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena sama-sama punya kepentingan masing-masing yaitu; Lembaga ingin program jalan dan bisa membuat laporan pertanggung jawaban kepada donor dan masyarakat ingin mendapatkan bantuan. Namun dalam pembangunan perumahan, antara yang dibangun oleh Care dengan BRR masih jauh lebih unggul rumah yang dibangun oleh Care secara kualitas, walaupun secara kuantitas BRR lebih unggul daripada Care yaitu perbandingan antara 84 unit rumah dan 46 unit rumah.

Pemerintah dalam kapasitasnya juga telah membantu ternak untuk masyarakat dan bantuan dalam bentuk yang lain, namun kondisinya juga hampir sama dengan bantuan dari lembaga lain yang tidak begitu jelas keberadaan bantuan tersebut. Penulis melihat ada yang salah dengan pemberdayaan di *gampong* Rima Keneurum itu sendiri, sepertinya kesalahan itu terjadi secara berjamaah yaitu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh lembaga yang lemah dan kurang tegas di bidang evaluasi dan pengawasan program. Aidarus mengatakan, "masyarakat Rima Keneurum memang butuh pembinaan namun pihak lembaga juga semestinya juga harus serius dan memberikan bantuan lebih banyak lagi". Pernyataan seperti di atas membuktikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum berhasil dengan dengan baik, karena bukannya keberdayaan yang muncul tetapi malah ketergantungan.

Solusi dalam mengatasi permasalahan di atas adalah dengan mereformasi sistem lembaga dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah menghilangkan pemikiran yang keliru terhadap bantuan, sebagaimana diungkapkan oleh Ihsan[39] yang seolah-olah adanya

[38] Salah seorang warga Rima Keneurum yang menurut pengakuannya tidak pernah mendapat bantuan asing selain sebuah rumah yang dibuat oleh BRR untuknya. Wawancara dilakukan di *gampong* Rima Keneurum pada tanggal 29 September 2008.

[39] Informan adalah warga *gampong* Rima Keneurum yang cukup kritis dalam menanggapi bantuan yang data ke mereka, wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

pemahaman bahwa bantuan yang dibawakan kepada mereka melalui NGO maupun institusi pemerintah menjadi hak mereka secara penuh, yang bisa mereka manfaatkan sepenuhnya sesuai dengan yang mereka kehendaki "jadi tidak perlu dipersulit/diperlambat, NGO ada di Aceh juga karena ada kita, korban tsunami". Ada benarnya seperti yang dikatakan oleh Ihsan, namun juga harus dipahami bahwa dana yang akan disalurkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada donor atau *funding*.

Pasca tsunami banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, sehingga di saat datangnya bantuan untuk pemberdayaan masyarakat disambut dengan hangatnya. Namun sayangnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi misalnya, ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Ini diakibatkan salah satunya karena terjadinya peralihan profesi dari yang sebelumnya ia geluti, ke profesi baru yang sangat mungkin tidak begitu dipahami dengan baik sehingga resiko kerugian akan semakin tinggi.

Demikian juga yang dilakukan oleh lembaga dengan model penyeragaman program, dengan harapan akan memudahkan lembaga dalam pengontrolan dan evaluasi serta pelaporan kepada donor terhadap anggaran yang telah digunakan, hal ini ternyata telah memaksa masyarakat untuk mengikuti program yang ada demi mendapatkan dana. Jadi secara tidak langsung, keberadaan lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat telah memaksa mereka untuk merubah profesinya sesuai keinginan lembaga yang memberikan bantuan.

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam kaitannya dengan keberadaan *meunasah* pascatsunami ternyata jauh berbeda dengan sebelum tsunami, terutama pada masa-masa keemasan *meunasah* sebagai *community center*. Pada masa-masa tersebut, *meunasah* masih sebagai satu-satunya tempat yang dianggap cukup strategis dalam pengembangan bidang ekonomi di *gampong,* bahkan *meunasah* berfungsi juga sebagai pusat pemerintahan *gampong*. *Meunasah* dalam kajian *historis* memiliki multi fungsi, yang secara umum berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan dan fungsi sosial kemasyarakatan.

Meunasah sebagai tempat kegiatan keagamaan secara umum berupa pemanfaatannya sebagai media dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, di antaranya adalah Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) seperti Isra' Mi'raj, *molod* (maulid), tahun baru Islam 1 Muharam, Nuzulul Qur'an, shalat Idul Fitri dan Idul Adha; kegiatan keagamaan yang sifatnya insidental seperti pernikahan, shalat jenazah, *peulheuh kaoy* (melepas nazar); seni Islami seperti *dalail khairat*, *meusifeut*,*dikee*, *meurukon* dan lain sebagainya.

Meunasah sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat penyelesaian konflik, wisma tempat anak muda menginap, wisma bagi tamu yang berkunjung ke *gampong* maupun musafir yang melewati suatu *gampong* yang kondisinya sudah larut malam. Selain itu juga menjadi benteng pertahanan masyarakat *gampong*, karena anak muda yang menginap di *meunasah* secara otomatis menjadi pagarnya *gampong* baik gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar *gampong* itu sendiri.

Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah *meunasah* juga menjadi pusat ekonomi masyarakat *gampong*, yang dulu masih sangat terlihat dengan jelas adanya praktek atau tempat transaksi jual beli.[40] Dulu keberadaan *meunasah* yang dipahami sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat *gampong* karena terjadi transaksi jual beli di *meunasah*, jika itu yang dipahami maka *meunasah* sudah tidak lagi berperan sebagai media atau tempat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, karena sudah banyak berdirinya pasar maupun bangunan took atau tempat perbelanjaan mini bagi masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan banyak cara, dalam hal ini pemberdayaan yang dimaksudkan kaitannya dengan *meunasah* adalah pemanfaatan *meunasah* sebagai media dalam mengadakan musyawarah maupun pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembentukan UKM dan pemberian modal usaha serta pelatihan manajemen usaha yang mengambil tempat di *meunasah*.

Jelas terdapat perbedaan dalam pemanfaatan *meunasah* dalam bidang ekonomi pada masa dulu dan saat ini, terutama pascakonflik dan tsunami. Dulu pada masa kesultanan Aceh, *meunasah* sebagai pusat kegiatan pemerintahan *gampong,* ruang publik bagi masyarakat dan disebabkan kurang adanya pilihan lain bagi masyarakat sebagai tempat untuk dapat melakukan transaksi ekonomi, menjadikan *meunasah* sebagai alternatif yang paling efektif untuk itu. Saat ini banyak alternatif lain yang dapat menggantikan peran *meunasah* sebagai tempat kegiatan ekonomi, seperti tempat jual-beli barang secara langsung. Terdapatnya pasar yang tidak terlalu jauh dengan komunitas, banyaknya toko-toko, juga warung telah mampu menggantikan peran *meunasah* yang pada masa dulu juga berfungsi sebagai basis ekonomi umat.

---

[40] Lihat Muslim A. Djalil, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi X, 2008. Kanwil Depag NAD. hlm. 27.

3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pascatsunami telah meninggalkan banyak tugas yang harus dilakukan oleh segenap anak bangsa, sarana pendidikan dan kesehatan secara khusus ikut hancur berantakan. Akibatnya, bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dengan segenap keterbatasan yang dimiliki pada masa-masa *emergency*. Makanan, minuman dan obat-obatan menjadi kebutuhan utama pada saat-saat awal tsunami, namun secara perlahan kebutuhan akan makanan dan obat-obatan dapat tertangani yang selanjutnya perhatian masyarakat beralih pada kebutuhan lain yaitu di bidang pendidikan.

Keberadaan sekolah-sekolah yang hancur menjadi luka mendalam bagi dunia pendidikan di Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga pada saat itu kekhawatiran banyak pihak akan hancurnya dunia pendidikan akibat tsunami menjadi cukup beralasan. Hal ini mengundang keprihatinan banyak pihak termasuk kalangan LSM/lembaga yang ikut terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, demikian juga dengan pemerintah.

Kehadiran lembaga dalam masyarakat Rima Keneurum telah mengambil peran penting dalam dunia pendidikan, seperti *Children Centre* yang telah mengambil peran dalam mensuport pendidikan anak di *gampong* Rima Keneurum dan sekitar, hal ini terbuktikan dengan adanya Play Group atau PAUD misalnya yang sampai penelitian ini dilakukan masih tetap bertahan. Selain pendidikan formal dengan memperkuat sistem jaringan dibidang pendidikan misalnya sekolah maupun pondok pesantren, pihak lembaga juga menempuh jalur pendidikan non formal untuk mengisi kekosongan waktu belajar anak, dengan sistem belajar sambil bermain seperti adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dengan memanfaatkan *meunasah* sebagai pusat kegiatannya.

Proses kegiatan belajar-mengajar untuk anak-anak (PAUD) pada masa-masa awal berdiri mengambil tempat di kantor sementara CC, Namun selanjutnya setelah adanya bangunan tersendiri yang dibangun oleh Plan (pada dasarnya untuk kegiatan kesehatan) maka pelaksanaan PAUD-pun dipindah ke tempat yang baru. Pendidikan seni tari yang di fasilitasi oleh TALOE mengambil tempat di CC dan juga rumah peserta yang mengikuti pelatihan, tidak memanfaatkan *meunasah* sebagai tempat

latihan karena dianggap tidak sopan.[41]

Di masa kesultanan Aceh, *meunasah* menjadi titik sentral pendidikan dalam masyarakat Aceh, hal ini dikarenakan setiap *gampong* di Aceh terdapat *meunasah* yang memiliki multi fungsi. Disamping fungsinya yang lain, juga beerfungsi sebagai sekolah yang kalau sekarang dapat disejajarkan setingkat dengan Sekolah Dasar. Di *meunasah* para murid diajarkan cara membaca dan menulis huruf Arab, ilmu agama dalam Bahasa Jawi (Arab Jawo/Melayu), Akhlak dan sejarah Islam dengan cara bercerita.[42]

Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan di atas, Ibrahim Husein[43] menyatakan bahwa eksistensi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan tradisional karena didukung oleh tiga factor utama. Pertama, faktor kesadaran orang tua, karena mereka merasa bertanggung jawab atas pendidikan anaknay sejak dini. Kedua, faktor masyarakat, mereka merasa bahwa lembaga pendidikan ini adalah miliknya dan di sini belajar semua anak anggota masyarakat tanpa memandang status sosial dari setiap individu. Ketiga, faktor ibadah, pendidikan ini dianggap sebagai suatu ibadah wajib atas setiap muslim.

Secara umum *meunasah* juga dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pendidikan warga, tidak hanya untuk pendidikan anak-anak namun juga untuk orang dewasa. Kegiatan pengajian yang dipusatkan di *meunasah*

---

[41] Hal lain yang membuat mereka tidak mau memanfaatkan *meunasah* sebagai tempat latihan tari adalah khawatir terganggu saat latihan oleh kegiatan salat ashar, karena di *meunasah* dikumandangkan azan dan pelaksanaan shalat ashar secara berjamaah. Di samping itu peserta dan pelatih tarian merasa lebih nyaman bila tidak dilaksanakan di *meunasah*, hal ini juga untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan akibat memanfaatkan *meunasah* untuk latihan tarian yang dalam masyarakat masih terdapat kontrofersi antara layak dan tidak layaknya latihan tari dibuat di *meunasah*. Wawancara dengan Lia (warga *gampong* Rima Keneurum, dan masih duduk di kelas 2 SMP Peukan Bada) yang juga merupakan salah satu dari peserta latihan tarian. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008.

[42] Ali Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam: Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1980), hlm. 211. *Meunasah* bagi orang Aceh merupakan lambang supremasi *ureung* (orang) Aceh, lambang kebudayaan dan melahirkan orang Aceh "*ka jeuet keu ureung Aceh peue goh lom*" (sudah betul-betul menjadi orang Aceh apa belum), yang menjadi orang beragama dan beradat, sehingga menjadi kebanggaan *aneuk* (anak) Aceh. *Meunasah* juga menjadi sumber energi budaya Aceh, merupakan bagian tak terpisahkan dari orang Aceh. Ungkapan-ungkapan di atas benar-benar menunjukkan bahwa *meunasah* telah menjadi milik yang asli (orisinil) Aceh dengan segala fungsinya bagi masyarakat dan telah berjasa menjadikan generasi Aceh yang gemilang. Lihat Muslim A. Djalil, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi I, 2009. Kanwil Depag NAD. hlm. 42.

[43] Lihat Muslim A. Djalil, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi XI, 2008. Kanwil Depag NAD. hlm. 44.

juga diperuntukkan bagi ibu-ibu dalam bentuk pengajian yasinan maupun kita kuning. Bentuk pengajian yasinan dan kitab kuning masih tetap bertahan sampai saat ini di *gampong* Rima Keneurum, sama halnya dengan pengajian bagi anak-anak pada malam hari juga masih menggunakan *meunasah* sebagai tempat untuk belajar. Di bidang pendidikan *meunasah* masih berperan penting dalam memajukan pendidikan warga *gampong*, walaupun tidak sama seperti pada masa kesultanan Aceh (*meunasah* menajadi institusi resmi kerajaan di bidang pendidikan yang sejajar dengan Sekolah Dasar) maupun pascatsunami.

Kini pendidikan di *meunasah* telah banyak tergantikan oleh yang lain, dengan tersedianya gedung-gedung sekolah yang memadai maka *meunasah* lebih banyak hanya berperan dalam pendidikan non-formal (kondisi ini berbeda dengan pada masa kesultanan Aceh). Namun setidaknya telah mengembalikan fungsi *meunasah* sebagai pusat pendidikan bagi masyarakat Aceh, walau hanya pendidikan non-formal. Hasanudin Yusuf Adan mengatakan,[44] untuk pendidikan non-formalpun, keberadaan *meunasah* juga banyak tergantikan dengan menjamurnya pesantren maupun balai-balai pengajian yang memiliki fungsi hampir sama, yaitu mengajarkan pendidikan agama dan pengamalan ajaran-ajaran agama, berupa ibadah kepada Allah SWT seperti shalat lima waktu sehari semalam, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha dan shalat Taraweh pada malam bulan Ramadhan.

Pelaksanaan pengajian di *meunasah* khususnya untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), ternyata tidak dapat berjalan dengan baik di *meunasah*. Selain karena kekurangan kader pengajar (ustazh/ustazah) yang akan mengajar Al-Qur'an bagi anak-anak Rima Keneurum, ternyata semangat dan motivasi anak-anak yang menjadi peserta didik juga semakin menurun. Setelah merunut secara lebih jauh kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah kepedulian orang tua terhadap dunia pendidikan anak yang rendah, besarnya pengaruh lingkungan yang mendukung anak untuk tidak mengaji di *meunasah* misalnya akibat adanya acara menarik yang disiarkan di TV maupun akibat adanya *play station* yang banyak menarik perhatian anak.

Berdasarkan pantauan penulis ternyata bangunan *meunasah*, pemahaman terhadap nilai yang dimiliki oleh *meunasah* sebagai pusat kegiatan masyarakat dan kharisma yang dimiliki oleh pengurus *meunasah* (termasuk di dalamnya *Teungku Imeum Meunasah*), juga sangat mempengaruhi terhadap ketertarikan warga untuk datang ke *meunasah*.

Ketika anak-anak lebih memilih bermain selain di *meunasah*, dan

[44] Informan adalah unsur akademisi yang juga sebagai pemerhati kegiatan *meunasah* di Aceh, saat ini informan sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2008.

hal ini berbeda dengan salah satu fungsi *meunasah* sebagai pusat kegiatan masyarakat yang juga berfungsi sebagai fasilitas bermain anak. Di *gampong* Rima Keneurum *meunasah* tidak lagi menjadi media atau tempat yang menarik bagi anak terutama untuk bermain dan belajar, karena *meunasah* tidak lagi menjadi nyaman bagi mereka akibat bangunan yang berubah dari yang sebelumnya. Biasanya proses belajar mengajar TPA dilaksanakan pada siang hari dan model yang digunakan adalah anak belajar sambil bermain, namun bila hanya bermain di *meunasah* saja anak sudah enggan maka bagaimana mengajak anak belajar dengan menggunakan fasilitas *meunasah*. Untuk pengajian dimalam hari masih menggunakan *meunasah* sebagai medianya, walaupun secara kuantitas jumlah anak yang mengaji bersama *teungku imeum meunasah* tidak begitu banyak karena sebagian anak belajar di rumah.

Hal di atas akhirnya akan berdampak pada minat atau keinginan masyarakat untuk belajar atau menjadikan *meunasah* sebagi pusat pendidikan masyarakat *gampong*, beberapa indikator yang mendukung terhadap pernyataan penulis di atas adalah adanya pengajian anak-anak yang dilaksanakan di rumah warga bukan di *meunasah*. Badruzzaman Ismail juga menambahkan bahwa dewasa ini mulai terkikisnya rasa bangga yang dimiliki oleh rakyat Aceh terhadap budaya lokal, yang salah satunya dalam konteks institusi lokal (*meunasah*) adalah anak-anak yang dijauhkan dengan *meunasah* baik secara langsung ataupun tidak oleh orang tua maupun lingkungannya, pascatsunami sedikit banyaknya ini sudah terjadi di kalangan masyarakat Aceh.

Masa-masa awal tsunami *meunasah* juga dimanfaatkan sebagai pusat kesehatan masyarakat. Diantara kegiatan kesehatan misalnya untuk pemeriksaan warga yang sakit, sehingga pada saat itu *meunasah* memiliki fungsi yang cukup strategis di bidang kesehatan. Banyak warga yang datang ke *meunasah* untuk berobat, akan berbeda kesan yang timbul antara datang ke *meunasah* untuk berobat dibandingkan dengan datang ke rumah salah satu warga misalnya, hal ini disebabkan *meunasah* memiliki fungsi sebagai tempat yang netral dan sentral, sehingga semua orang punya hak untuk datang ke *meunasah* yang merupakan fasilitas umum bagi warga *gampong* yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Aceh.

Selain kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat secara umum, kegiatan posyandu juga dipusatkan di *meunasah*. Data terakhir yang diperoleh bahwa *meunasah* tidak lagi dimaanfaatkan sebagai tempat melaksanakan kegiatan kesehatan, hal ini disebabkan sudah adanya

bangunan klinik kesehatan yang dibangun oleh Plan untuk warga *gampong* Rima Keneurum dan sekitarnya.[45] Pada masa awal-awal tsunami, sarana pribadi seperti rumah fasilitas umum banyak yang hancur, untuk di *gampong* Rima Keneurum ternyata bangunan *meunasah* tidak terlalu parah tingkat kerusakannya sehingga masih bisa dimanfaatkan.

Tsunami telah membawa masyarakat pada kondisi yang tidak menentu, rawan terhadap penyakit, makanan yang kurang bergizi dan ditambah lagi dengan luka-luka akibat tsunami mengharuskan pihak kesehatan untuk menangani agar tidak bertambah parah. Dalam perjalanannya untuk memudahkan proses pengobatan, maka dimanfaatkanlah *meunasah* sebagai posko kesehatan untuk menjangkau segenap warga *gampong* yang membutuhkan bantuan kesehatan.

Namun secara perlahan setelah tingkat kesehatan masyarakat mulai membaik dan masa *emergency* berakhir serta adanya bangunan tersendiri yang terpisah dengan *meunasah*, maka pusat layanan kesehatanpun berpindah dari meunasah ke tempat khusus yang telah disediakan oleh Plan Internasional berupa bangunan gedung Polindes untuk warga *gampong* Rima Keneurum dan sekitarnya. Alhasil, saat ini warga Rima Keneurum tidak lagi harus pergi jauh untuk menjangkau fasilitas kesehatan, karena terletak ditengah-tengah pemukiman warga.

[45] Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2008 dengan ketua Posyandu *gampong* Rima Keneurum (Nurlina).

BAB IV
MEUNASAH DULU DAN SEKARANG

A. Sekilas Gampong di Aceh; Menilik Rima Keneurum

Gampong Rima Keneurum[1] merupakan salah satu *gampong* yang mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa dan bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Kerusakan meliputi berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dampak dari fisik diantaranya adalah berubahnya tata ruang *gampong* dari kondisi normal/ awal sebelum tsunami kepada kondisi baru yang telah membuat banyak bangunan porak-poranda. Berubahnya tata ruang *gampong* antara lain telah menyebabkan rusaknya pemukiman penduduk, perumahan, fasilitas dan utilitas *gampong* serta kerusakan lahan pertanian yang sebelumnya telah banyak mendukung kehidupan warga. Kondisi *gampong* Rima Keneurum pascatsunami secara langsung juga telah membawa dampak yang lebih luas dan kompleks, yaitu terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek perekonomian, adat dan sosial-budaya masyarakat *gampong* Rima Keneurum.

Sebuah penelitian kiranya perlu penulis lakukan untuk dapat menggambarkan lokasi penelitian, sehingga akan mempermudah dalam membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan letak geografis, keadaan penduduk maupun kehidupan sosial-keagamaannya yang akan sangat mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Dalam tulisan

---

[1] Penyebutan nama *gampong* Rima Keneurum, terdapat perbedaan ada yang menyebutkan Rima Keuneurum, Rima Keneurom dan ada yang menyebutkan Rima Keuneurom (berdasarkan interview dengan warga gampong pada tanggal 22 September 2008). Lihat juga dalam: Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Rencana Desa (Village Planning) di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Final Februari 2008 (Banda Aceh: P.T. Multi Karadiguna Jasa, 2008), hlm. Kover. Namun penulis menggunakan Rima Keneurum sebagai nama *gampong* yang dimaksusd dalam tesis ini, guna penyeragamannya.

ini penulis hanya akan menggambarkan sedikit saja tentang gambaran umum lokasi penelitian, guna membantu untuk dapat memahami sedikit banyaknya kondisi masyarakat di tempat yang akan diteliti secara objektif. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sebagaimana akan dijeleskan lebih lanjut berikut ini.

1. Gambaran Geografis

Setting tempat yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Peukan Bada (Kabupaten Aceh Besar-NAD) dengan luas daerah lebih kurang 9.625 Ha[2], yang merupakan salah satu Kecamatan yang paling parah terkena bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Kecamatan Peukan Bada sendiri memiliki empat buah kemukiman dan 26 buah *gampong* yang masing-masing *mukim* dipimpin oleh seorang *Imeum Mukim* untuk beberapa buah *gampong*.

Mukim yang dimaksud di atas yaitu: pertama, *Mukim Gurah* yang terdiri dari sembilan buah *gampong*; Beuradeun, Gurah, Keuneu Eu, Lam Gemok, Lam Isek, Lamgeu Eu, Lampisang, Lamrukam dan Rima Jeuneu. Kedua, *Mukim Lam Pageu* yang terdiri dari empat buah *gampong*; Lam Badeuk, Lambaro, Lamguron dan Lampageu. Ketiga, *Mukim Lambaro* yang terdiri dari empat buah *gampong*; Ajuen, Lamhasan, Paya Tieng dan Rima Keneurum. Keempat, *Mukim Lamteungoh* yang terdiri dari sembilan buah *gampong*; Gampong Baro, Lammanyang, Lamteh, Lamlumpu, Lamteungoh, Lam Tutui, Meunasah Tuha, Lam Awe dan Pulau Bunta.[3]

Adapun batas-batas Kecamatan Peukan Bada sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulo Aceh, yang dihubungkan oleh lautan.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jaya Baru. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lhoknga.

Sebagai daerah pesisir, *gampong* Rima Keneurum juga sangat berdekatan dengan pegunungan, sehingga pada saat datangnya gempa yang disusul gelombang tsunami, banyak warga yang berhasil selamat dengan cara melarikan diri ke gunung yang terdekat. *Gampong* Rima Keneurum termasuk dalam wilayah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan luas *gampong* sekitar 32 Ha.[4] Secara administrasi pemerintahan,

[2] Berdasarkan Data Statistik di Kantor Camat Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Peukan Bada: 2006.

[3] Daftar Desa/Kelurahan per-Mukim, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/Peukan_Bada,_Aceh_Besar, diakses pada 12 April 2009.

[4] Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan*, hlm. I-2. Di Aceh untuk sebutan desa disebut dengan *gampong*, sesuai dengan

gampong Rima Keneurum memiliki empat dusun,[5] yaitu; *pertama*: Dusun Sejahtera, *kedua*: Dusun Bahagia, *ketiga*: Dusun Lamreh, dan *keempat*: Dusun Sentosa. Sementara itu, batas wilayah administrasi *gampong* Rima Keneurum adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan *gampong* Paya Tieng.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan *gampong* Lampisang dan Rima Jeuneu.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan *gampong* Ajuen dan *gampong* Lam Hasan.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan *gampong* Lamgeu Eu.

Selain pentingnya mengetahui letak geografis *gampong* Rima Keneurum (peta perbatasan *gampong* terlampir), dalam penelitian ini juga penting untuk mengetahui letak *meunasah*. Keberadaan *meunasah* menjadi simbol di tengah-tengah masyarakat dan biasanya kelilingi oleh perumahan penduduk, *meunasah* juga memiliki halaman yang cukup luas sebagai tempat masyarakat berkumpul dan tempat anak-anak bermain. Selain itu di halaman ataupun di dalam komplek *meunasah* juga terdapat *Balee* (menyerupai gubuk kecil) yang biasanya digunakan sebagai tempat para pemuda *gampong* atau pemuda *gampong* tetangga yang tidak memiliki saudara di *gampong* tersebut untuk berkumpul dan tidur dikala malam tiba. *Meunasah* juga dilengkapi dengan sumur dan *kulaah* (dalam bahasa Indonesia disebut bak penampungan air), kelengkapan lainnya dari *meunasah* adalah adanya WC atau toilet tempat buang air besar dan kecil. *Meunasah gampong* Rima Keneurum memiliki *kulaah*, namun *kulaah* yang dimiliki sudah dibeton dan untuk mengambil air menggunakan kran, sementara toilet tidak dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat karena dalam kondisi rusak, padahal baru saja direhab.

Selain hal yang disebutkan di atas, umumnya di *meunasah* terdapat dapur umum yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk memasak atau *Dapue Weet Ibue Beudah* (tempat atau dapur memasak kanji/bubur), namun *gampong* Rima Keneurum tidak memiliki *Dapue Weet Ibue Beudah*. Hal ini disebabkan karena bencana tsunami yang melanda daerah ini beberapa waktu lalu dan telah menghancurkan fasilitas tersebut.

Sebenarnya yang paling penting adalah posisi sebuah *meunasah* mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan berdekatan dengan jalan. Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa

---

Qanun atau perda No. 5 tahun 2001 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Provinsi NAD.

[5] Dusun dalam masyarakat Aceh kedudukannya berada di bawah *gampong*, kepala dusun langsung bertanggung jawab kepada *keuchik*. Informasi mengenai nama dusun didapat dari hasil wawancara dengan Drs. Aidarus (Sekretaris *gampong* Rima Keneurum) pada tanggal 09 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

narasumber didapatlah informasi betapa bermaknanya *meunasah* bagi segenap warga masyarakat baik warga lokal maupun para pendatang atau musafir, yang hanya sekedar melewati dan singgah di *meunasah* sebagai tempat atau fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin memanfaatkannya.

Pendirian bangunan *meunasah* dalam masyarakat Aceh berbeda dengan mendirikan rumah, kalau rumah membujur ke arah timurbarat, maka *meunasah* harus membujur ke arah utara-selatan. Dengan demikian tamu yang datang dari jauhpun mudah mengetahui mana *meunasah* dan mana rumah, serta memudahkan untuk mengetahui kemana arah kiblat ketika hendak melaksanakan shalat.[6]

Perbedaan dalam pembangunan *meunasah* maupun masjid di Aceh dengan pembangunan rumah ibadah (masjid atau musalla) di tanah jawa, yang menarik untuk dilihat adalah pembangunan *meunasah* maupun masjid di Aceh mengikuti arah kiblat bukan mengikuti arah tanah (pagar yang menjadi pembatas) yang tersedia, seperti yang umumnya terjadi di Jawa (berdasarkan amatan penulis terhadap beberapa tempat yang pernah penulis singgahi). Namun demikian, juga terdapat beberapa masjid yang bangunannya dibangun mengarah ke arah kiblat, sama dengan pembangunan masjid atau *meunasah* di Aceh, diantara masjid yang dibangun dengan memperhatikan arah kiblat (bukan mengikuti arah tanah yang tersedia) yang terdapat di Yogyakarta adalah masjid kampus UGM dan masjid kampus UII terpadu di jalan Kaliurang.

Posisi *meunasah* pada dasarnya juga sangat ditentukan oleh letak tanah yang tersedia dan biasanya merupakan tanah waqaf milik warga *gampong* setempat. Untuk pemilihan letak *meunasah* harus mempertimbangkan beberapa aspek, sehingga keberadaan *meunasah* dapat dimanfaatkan secara optimal dalam masyarakat. Diantara aspek-aspek tersebut adalah: aspek keamanan, aspek keindahan dan kenyamanan, serta aspek efektifitas yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya beberapa aspek tersebut sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

a. Aspek Keamanan

Aspek keamanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sehingga siapapun yang nantinya akan memanfaatkan fasilitas umum tersebut akan memperoleh rasa aman tanpa harus ketakutan ketika berada di dalam *meunasah* tersebut. Satu hal yang paling penting di sini adalah keberadaan *meunasah* harus betul-betul menjadi fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu *meunasah* tidak boleh di kunci (digembok), karena jika

[6] Lihat Fauzi Ismail, *Peran Imeum Meunasah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Hasil Penelitian (Banda Aceh: PPISB Unsyiah, 2003), hlm. 12.

itu dilakukan maka akan menghambat orang untuk memanfaatkan *meunasah* secara maksimal dan keberadaan *meunasah* menjadi tidak lagi aman bagi orang yang akan memanfaatkannya.

Dalam penggunaan *meunasah* tentunya sangat tidak diinginkan oleh semua pihak, kalau ada orang yang harus disuruh keluar dari *meunasah* karena *meunasah* akan di kunci, ataupun ada yang terkunci di dalam *meunasah* karena terlelap tidur misalnya atau alasan yang lainnya sehingga diketahuilah bahwa ada orang yang terkunci. Hal ini tentunya dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan kondisi ini pula yang menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap *meunasah*. Selain itu *meunasah* harus aman dari kejahatan pihak manapun, artinya *meunasah* tidak boleh sepi dari masyarakat sehingga tidak membuka peluang terjadinya kejahatan.

b. Aspek Keindahan dan Kenyamanan.

Keindahan dan kenyamanan merupakan sarana pendukung yang dapat mengangkat makna dan nilai *meunasah* di mata masyarakat, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk pergi ke *meunasah*. Cerminan dari kepribadian masyarakat dalam suatu *gampong* dapat dilihat dari lingkungan *meunasah* di suatu *gampong* tersebut, apabila *meunasah* tertata dengan rapi maka hampir bisa dipastikan keadaan masyarakatnya juga demikian adanya dan begitu juga sebaliknya.

Kiranya sebuah *meunasah* juga harus mampu memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang berkunjung ke sana, *meunasah* yang juga sering berfungsi sebagai Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPA) harus bisa memberikan rasa nyaman bagi para santri yang datang ke *meunasah* tersebut. Rasa nyaman ini menjadi sesuatu yang cukup penting, sehingga harus dimiliki oleh setiap *meunasah* dalam mewujudkan fungsi ideal dari sebuah *meunasah* sebagai mana yang diharapkan.

c. Aspek Efektifitas

Semua orang tentunya mengharapkan segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Sama halnya dengan masyarakat kita, juga menginginkan yang mudah dan gampang untuk dikerjakan, posisi *meunasah* yang cukup jauh dengan lingkungan masyarakat dan sulit di jangkau oleh masyarakat, baik karena jalannya yang sulit di lalui maupun berjauhan dengan jalan umum, maka hal ini dianggap sudah tidak efektif untuk sebuah bangunan *meunasah* yang seyogyanya digunakan sebagai fasilitas umum tersebut.

Sebuah *meunasah* bagaikan bangunan serba guna yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk berbagai macam kegiatan, tidak

hanya sebagai sarana *u`budiyah* kepada Allah tetapi lebih dari itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, misalnya sebagai tempat berkumpul untuk bermusyawarah, sarana bermain bagi anak-anak dan juga tempat remaja putra dan putri beraktifitas dalam berekpresi.

Semua fasilitas yang ada di *meunasah* haruslah mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga akan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketika banyak hal bisa dilakukan di satu tempat dan mudah dijangkau yang kemudian juga dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, maka itu akan bernilai positif bagi perkembangan pola kehidupan masyarakat setempat, demikian pula dengan kondisi ideal dari sebuah *meunasah*.

Keberadaan *meunasah* sering juga digunakan oleh para musafir yang melakukan perjalanan antara satu daerah ke daerah lainnya sebagai tempat istirahat dan berteduh, terutama dikala dinginnya malam menyelimuti seluruh tubuh. Pada kasus seperti itu, *meunasah* menjadi solusi terbaik sebagai tempat berteduh, istirahat maupun bermalam pada saat hari mulai senja. Oleh karena itu posisi *meunasah* sering berada di dekat jalan agar lebih mudah di akses oleh setiap masyarakat, selain itu *meunasah* juga dilengkapi dengan sumur, kamar kecil dan bilik sebagai kelengkapan *meunasah* yang itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan kapanpun juga.

Aspek efektifitas ini menjadi sesuatu yang mendapat perhatian khusus dari pengurus *meunasah*, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, baik bagi masyarakat *gampong* setempat maupun bagi masyarakat yang hanya numpang singgah seperti musafir dan juga para tamu yang datang baik secara resmi maupun tak resmi.

2. Keadaan Penduduk

Secara umum ada tiga model masyarakat yang mendiami Kabupaten Aceh Besar, dan masyarakat yang lain pada dasarnya juga sama. Ketiga model tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dan juga akan mempengaruhi sistem tata nilai serta mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya, terutama watak/karakter dan kejiwaan masyarakat. Ketiga model masyarakat yang dimaksud yaitu: *pertama*, masyarakat di daerah pegunungan atau pedalaman; *kedua,* masyarakat daerah pesisir; dan *ketiga,* masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau masyarakat yang telah banyak menerima perubahan.

Untuk *gampong* Rima Keneurum termasuk dalam kelompok masyarakat pesisir-pedalaman (walaupun dalam keseharian mereka ternyata juga banyak mengalami perubahan), secara geografis mereka selain

bertempat tinggal tidak jauh dengan laut juga berdekatan dengan daerah pegunungan. Berdasarkan data di atas, maka dapatlah kita mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menata kehidupannya. Spesifikasi keilmuanpun masih sangat kurang, sehingga peluang kerja akan sulit diraih dan sumber daya alam yang dimiliki menjadi tidak optimal dalam pemanfaatannya.

Untuk daerah pesisir yang berdekatan dengan laut, kondisi penduduk pada umumnya keras namun lebih mudah menerima perubahan. *Gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada merupakan daerah bekas Tsunami yang luluh lantah pada tanggal 26 Desember 2004, dua tahun silam. Kehidupan masyarakatnya sudah ditata kembali, dengan bantuan BRR NAD-Nias bersama lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya, mulai dari pemukiman penduduk khususnya perumahan, sanitasi, lingkungan yang bersih sampai pada fasilitas *gampong* juga tak luput dari perhatian, yang salah satu di dalamnya adalah *meunasah*.

Gampong Rima Keneurum dengan jumlah penduduk 379 jiwa,[7] yang terdiri dari laki-laki sebanyak 194 jiwa, perempuan 185 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.184 (populasi/km^2).[8] Berdasarkan data yang berhasil penulis dapatkan dari situs pemda Aceh Besar jumlah keluarga di *gampong* Rima Keneurum sebanyak 90 keluarga, dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 57 keluarga atau 63% dari total keluarga yang ada.[9]

Keadaan warga *gampong* setelah di kaji lebih jauh ternyata di dalam masyarakat *gampong* ini terdapat dua kekuatan besar yang mempengaruhi segala kebijakan yang di ambil untuk kepentingan *gampong*, yaitu antara yang pro dengan keuchik dan yang kontra dengan kepemimpinan keuchik. Sisi lain dari dua kekuatan besar tersebut adalah adanya kekuatan penyeimbang yang bermain di luar sistem yang ada, kekuatan ini tidak menentu, terkadang ada dan terkadang tidak nampak sama sekali.

Ada hal yang cukup menarik dengan *gampong* Rima Keneurum,

---

[7] Mengenai jumlah penduduk penulis mendapatkan data yang berbeda dari beberapa sumber, dari Bapak Aidarus (sekreteris *gampong* Rima Keneurum) menyebutkan bahwa total jumlah penduduk *gampong* Rima Keneurum adalah sebanyak 659 jiwa; dari Lorong Sentosa 105 jiwa, Lorong Bahagia 236 jiwa, Lorong Sejahtera 232 jiwa, Lorong Lamreh 86 jiwa.

[8] *Populasi dan Kegiatan Ekonomi di Kecamatan Peukan Bada*, dalam: www.acehbesarkab.go.id/acehbesar, diakses pada 14 Agustus 2008. Informasi yang lain menyebutkan bahwa populasi masyarakat *gampong* Rima Keneurum pascatsunami sebanyak 628 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 397 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 321 jiwa, sebuah perbedaan angka yang cukup jauh antara 379 jiwa (versi pemda Aceh Besar) dan 628 jiwa (versi BRR) Lihat: Satuan Kerja BRR Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan*, hlm. I-8.

[9] Pemda Aceh Besar, *Populasi dan Kegiatan Ekonomi Dikecamatan Peukan Bada*, dalam: www.acehbesarkab.go.id/acehbesar, diakses pada 14 Agustus 2008.

yaitu tingkat mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Masyarakat lokal atau penduduk asli menjadi bagian kecil dari total warga *gampong* Rima Keneurum yang sebenarnya pascatsunami, karena banyak warga daerah lain yang masuk, tinggal dan menjadi warga masyarakat di *gampong* Rima Keneurum. Bahkan, berdasarkan data dari BRR NAD-Nias total penduduk *gampong* Rima Keneurum sebelum dan sesudah tsunami, ternyata lebih banyak setelah tsunami dengan perbandingan antara 361 jiwa (sebelum tsunami) dan 628 jiwa (setelah tsunami). Keadaan penduduk di *gampong* ini sangat mudah menerima perubahan yang datang dari luar.

Kemajuan dalam bidang pendidikan, masyarakat *gampong* Rima Keneurum sudah jauh lebih baik dari daerah pesisir yang lain di Kecamatan Peukan Bada, hal ini terlihat dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup baik sebagaimana termuat

dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Keadaan penduduk *gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada dilihat menurut jenjang pendidikan terakhir.

No	Tingkatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Pria	Wanita	
1.	Tamatan S1	9	7	16
2.	Mahasiswa	13	11	24
3.	Tamatan SLTA	43	25	68
4.	Tamatan SLTP	31	24	55
5.	Tamatan SD	67	42	109
6.	TK/Play Group	5	7	12
7.	Tidak Menamatkan SD	47	48	95
Jumlah Total		**164**	**215**	**379**

Sumber: Data yang dikeluarkan oleh bapak *Keuchik gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat *gampong* Rima Keneurum rata-rata dapat mengenyam pendidikan, walaupun banyak juga yang hanya tamatan SD mencapai 109 orang yang secara umum adalah orang tua dan orang dewasa. Sedangkan pada angka 95 jiwa termasuk di dalamnya orang tua dan anak-anak yang belum atau tidak mengenyam pendidikan di TK/Play Group. Majunya *gampong* ini

dalam bidang pendidikan dikarenakan letak *gampong* yang cukup strategis dengan pusat pendidikan dan berdekatan dengan jalan raya, sehingga memudahkan bagi warga dalam melakukan mobilitas ke berbagai tempat, dalam hal ini juga termasuk hubungannya dalam mengakses tempat pendidikan dan sarana umum lainnya seperti kantor camat, puskesmas, maupun kantor polisi.

Kondisi masyarakat juga mempengaruhi bentuk *meunasah* yang di bangun, termasuk perencanaannya serta pemanfaatan *meunasah* untuk kepentingan masyarakat. Di sisi yang lain, *meunasah* sering digunakan untuk kegiatan peribadatan dan serimonial keagamaan, hal ini terlihat pada moment-moment tertentu seperti pada bulan Ramadhan, peringatan maulid, tahun baru Islam, *Isra` Mi`raj* maupun hari-hari besar keagamaan (Islam) lainnya. Sementara dalam hal pengembangan masyarakat, *meunasah* menjadi sebuah lembaga yang idealnya mampu menjadi sentral pengembangan masyarakat *gampong*. Untuk *gampong* Rima Keneurum, berdasarkan data dari hasil observasi maupun diskusi dengan warga setempat, keberadaan *meunasah* masih harus lebih dimanfaatkan lagi sehingga upaya untuk menjadikan *meunasah* sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik.

3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Secara umum kehidupan sosial masyarakat di lokasi penelitian ini masih cukup baik. Dalam banyak hal, keberadaan *meunasah* tetap sebagai tempat ibadah dan tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan sosial lainnya. Namun demikian ada sedikit perbedaan yang pada akhirnya juga sangat besar pengaruhnya terhadap generasi muda kita, ternyata pengajian maupun seni budaya Islam yang dulunya cukup banyak diminati oleh masyarakat yang dilaksanakan di *meunasah* kini mulai kurang diminati. Bahkan *dalail khairat, dikee, meurukon* dan seni syiar Islam sudah mulai jarang dikumandangkan di *meunasah*, intensitas para generasi muda lebih banyak di *kede kupi* (warung kopi) daripada di *meunasah*.

Kondisi demikian cukup jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya pernah kita kenal, ketika *meunasah* menjadi tempat berkumpulnya para generasi muda untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sebuah pertanyaan muncul, apakah fungsi *meunasah* sudah tergantikan oleh warung kopi...!, sepertinya memang demikian. Misalnya penulis memperhatikan di saat waktu shalat tiba, ternyata banyak generasi muda bahkan yang tua juga tidak jauh berbeda, seiring dengan lantunan azan menggema tidak ada yang berubah, *meunasah* tidak menjadi tujuan utama selain mereka keasikan di warung kopi sambil *poh cakra* (asik berbicara).

Semangat generasi muda dalam memanfaatkan fungsi *meunasah* sudah mulai berkurang, termasuk keaktifan mereka dalam kegiatan keagamaan di *meunasah* seperti pengajian dan praktek ibadah lainnya. Biasanya azan dikumandangkan oleh anak muda dengan suaranya yang lantang dan merdu, kini tergantikan oleh generasi yang sudah tua atau lanjut usia, sehingga wajar sekali kalau dalam penyebutan bunyi huruf banyak yang tidak jelas. Adalah suatu kegagalan pengkaderan yang sangat fatal, sehingga menyulitkan bagi kita dalam mencari kader yang benar-benar siap menjadi pengelola *meunasah* atau minimal siap membantu demi terlaksananya berbagai kegiatan di *meunasah*.

Namun berbeda keadaannya dalam pelaksanaan kegiatan serimonial keagamaan seperti pembuatan panggung untuk tempat berdiri orang yang menyampaikan ceramah dalam memperingati hari-hari besar Islam,[10] seperti pada ceramah maulid Rasul, peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu antusiasme warga khususnya anak muda cukup tinggi, yang dibuktikan dengan berbondong-bondongnya kehadiran mereka dalam memeriahkan acara yang dilaksanakan di *meunasah* tersebut dari penyiapan hingga selesainya acara. Secuil kisah di atas menjadi contoh kecil tentang semangat generasi bangsa dalam mempertahankan sebuah budaya lokal "*hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeut*" (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat), ternyata banyak hal yang harus dibenahi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis *meunasah*.

Anak-anak banyak menghabiskan waktu mereka hanya untuk bermain-main. Sangat disayangkan di sini adalah lemahnya kepedulian orang tua dalam mengontrol kegiatan anak-anaknya sehingga sangat potensial terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak. Biasanya disetiap *gampong* diadakan pengajian untuk anak-anak di *meunasah* pada

[10] Dalam tradisi masyarakat Aceh, peringatan maulid Rasul (hari kelahiran Nabi Muhammad saw) selain melaksanakan acara kenduri atau makan-makan bersama warga, baik warga *gampong* itu sendiri maupun dengan warga *gampong* tetangga yang menjadi undangan pada perjamuan itu. Juga melaksanakan acara ceramah keagamaan yang biasanya mengundang seorang yang ahli dalam berceramah/tausiah bisanya diambil dari kalangan *teungku* dayah, ceramah keagamaan yang juga dalam masyarakat Aceh dulu sering disebutkan dengan *litheeng* (dikenal pada sebagian masyarakat Aceh Besar), sebagian menyebutnya dengan *haba* yang semakna dakwah islamiah. Isi dari dakwah islamiah erat sekali kaitannya dengan momentum kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu, misalnya dalam ceramah maulid isinya seputar tentang sejarah kehidupan Muhammad dari lahir hingga wafatnya, yang berbeda hanya pengemasan dari isi ceramah menurut keahlian masing-masing penceramah. Sama juga halnya dengan momentum peringatan Isra' Mi'raj maupun momentum lainnya, isi dakwah islamiahnya juga mengikuti moment yang berkaitan dengannya. Informasi tentang aktifitas masyarakat dalam memperingati hari-hari besar Islam dan kegiatan serimonial di *gampong* Rima Keneurum berdasarkan wawancara dengan *teungku* Rahman pada tanggal 07 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

malam harinya, atau pada siang harinya dengan kegiatan TPA. Sungguh disayangkan inipun tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Anak-anak belajar mengaji di rumah-rumah masyarakat, sehingga menjadi kurang terkoordinir, apa lagi kurangnya pengontrolan dari orang tua si anak dan warga masyarakat. Di *gampong* Rima Keneurum tidak ada yang namanya balai pengajian (*balee sumeubet*), yang biasanya juga berfungsi sebagai tempat pengajian selain di *meunasah*.

Ada cerita menarik untuk sebuah *meunasah* di Aceh Besar yang umumnya demikian, di setiap *meunasah* dengan halaman yang luas selain terdapat *balee* (gubuk kecil, tempat orang istirahat) juga terdapat pohon besar yang rindang dan di bawah pohon itu terdapat sebuah bangku yang lebar (dalam bahasa Aceh disebut *Panteu* ada juga yang menyebutnya *peurantah*-di sebagian Aceh Besar) tempat orang istirahat sambil menghirup udara segar. Ternyata bangku tersebut memiliki sejarah tersendiri, umumnya orang yang usia lanjut dan terkadang juga ada anak muda yang istirahat sambil merebahkan badan disana; pada saat yang sama juga banyak anak-anak yang bermain di komplek atau halaman *meunasah* (yang umumnya cukup luas) bersama rekan sejawatnya, keberadaan orang tua ataupun anak muda walaupun sambil istirahat di *meunasah* juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap anak-anak yang bermain di *meunasah*. Untuk di *gampong* Rima Keneurum, selain halamannya kecil juga tidak ada pohon rindang apalagi tempat untuk rebahan selain *balee* kecil yang letaknya sebelah selatan *meunasah*.

Ketika ada anak yang bicara kasar atau tidak senonoh langsung ditegur, bahkan diancam dengan sangsi tidak boleh lagi bermain di *meunasah*. Ini menjadi kekuatan lokal (*social capital*) dalam masyarakat dalam membina moral bangsa, demikian juga waktu shalat tiba anak-anak ataupun remaja di ajak naik ke dalam *meunasah* untuk melaksanakan shalat. Jarang bahkan tidak ada yang berani berbuat yang bertentangan dengan adat yang di dalamnya inklude dengan nilai-nilai agama, hal ini disebabkan kerena kontrol sosial tinggi dari masyarakat untuk masyarakat. Masalahnya adalah budaya inilah yang mulai terkikis oleh sifat *materialistis* dan *individualistis* pada masyarakat *gampong*, termasuk Rima Keneurum.

Harus diakui, bahwa dalam kehidupan sosial-keagamaan sudah banyak yang berubah, tata nilai yang dahulu cukup melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh, kini seolah-olah hilang tak berbekas. Mungkin ini yang disebut, kita sudah kehilangan identitas ke-Aceh-an kita, atau mungkin juga sudah lupa akan budaya sendiri. Peningkatan kapasitas diri dengan meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah salah satu upaya yang cukup bagus sebagai

wujud partisipasi dalam pembangunan. Semoga dengan usaha yang tulus ikhlas dan upaya intropeksi diri, perubahan kehidupan sosial kearah yang positif untuk kemaslahatan seluruh umat akan segera menjadi kenyataan.

Salah satu budaya yang ada pada masyarakat Jepang kiranya layak untuk kita ikuti, yang konsisten dengan adat dan budayanya "*Kaizen*" yaitu mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk serta menciptakan produk baru. Masih banyak budaya Aceh yang bernilai positif sehingga layak kita pertahankan. Salah satu contohnya adalah dalam hal adat pesta pernikahan (*walimatul 'arsy*) masih terdapat rasa gotong royong yang tinggi dalam masyarakat, demikian juga dengan acara kematian atau ada warga yang mendapatkan musibah (adat; *keurija hudep ngoen keurija matee*) rasa sosialnya masih cukup tinggi dalam wujud kepedulian terhadap sesama, meskipun dalam pelaksanaan prosesi acaranya sudah banyak yang berubah. Misalnya pada saat mengundang atau memberitahukan sesuatu hal kepada warga *gampong*, dulu menggunakan *tamboe* (beduk), kentongan atau yang disebut *tenteng*[11] namun saat ini sudah menggunakan microfon atau pengeras suara. Dulu, semua tamu maupun undangan disajikan makanan di ruang tamu dan ini berbeda dengan sekarang, semuanya menggunakan penyajian ala 'Perancis'.[12]

Demikian juga dengan tarian *ranup lampuan*, alunan shalawat, qasidah ataupun nasyid yang kini sudah banyak terjadi perubahan dan tergantikan oleh nyanyian-nyayian yang terkadang sama sekali tidak bersifat mendidik, bahkan merusak moral generasi Bangsa. Barang kali inilah dampak yang muncul akibat masuknya budaya asing yang kurang terfilter dengan baik dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terkiskisnya budaya lokal yang implikasinya berpengaruh pada terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk jangka panjang, perubahan (dalam makna yang negatif) ini akan sangat membahayakan eksistensi budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai spiritualitas (keislaman) yang merupakan warisan budaya timur, sebagai budaya Bangsa.

---

[11] *Tenteng* ini terbuat dari besi tua yang biasanya digantung menggunakan tali untuk kemudian dipukul berirama dengan jumlah pukulan yang beragam, yang masing-masing pukulan memiliki makna tersendiri dan juga berfungsi sebagai kode sandi saat masyarakat mengalami suatu kondisi tertentu, misalnya terjadi kebakaran, orang meninggal, saat turun ke sawah maupun ada warga yang kemalingan dan sebagainya.

[12] Ala '*Perancis*' hanya berupa istilah untuk model makanan yang tersedia disebuah meja, kemudian para tamu-undangan dipersilakan mengambilnya secara sendiri-sendiri (tanpa disugukan kehadapan tamu-undangan), hal ini berbeda sekali dengan kebiasaan menyajikan makanan yang dilakukan sesuai dengan adat Aceh, "namun kegiatan seperti ini sudah dapat dimaklumi oleh masyarakat secara umum", ungkap Tgk. Rahman (*teungku Imeum Meunasah* Rima Keneurum). 25 September 2008.

4. Keberadaan LSM

Bencana gempa disusul gelombang tsunami telah meninggalkan luka yang mendalam, serta kebutuhan yang mendesak untuk pembenahan berbagai lini dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan mendasar pada masa *emergency* (darurat) adalah obat-obatan, makanan dan tempat tinggal. Pascatsunami, pemerintahan Aceh menjadi lumpuh total, sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terlayani. Pada masa krisis tersebutlah datang berbagai bantuan dari luar baik dari pemerintah pusat, pemerintah asing (luar negeri) dan juga dari lembaga bantuan non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. "Kehadiran bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan", ungkap Maimun.[13]

Sebagaimana penulis singgung pada bab satu, sedikitnya ada tujuh LSM yang mengambil peran di *gampong* Rima Keneurum, dan masyarakat-pun menjadi terbiasa menerima bantuan yang diberikan oleh mereka. Salah satunya adalah *Children Centre*[14] yang mengambil peran di bidang anak. *Children Centre* yang merupakan pusat kegiatan anak disana, berusaha menjadikan *meunasah* kembali ke fungsi dasarnya sebagai pusat kegiatan masyarakat. Hal ini terus dicoba dengan menggiatkan shalat lima waktu secara berjamaah, Pengajian ibu-ibu, menghidupkan kembali TPA dan memusatkan perayaan hari-hari besar Islam di *meunasah*.

Lembaga yang lain misalnya Care International yang mengambil peran untuk pembangunan kembali rumah warga, selain itu juga melakukan pembinaan terhadap industry dan kerajinan rumah tangga. Dalam kegiatannya, mereka sering memanfaatkan *meunasah* sebagai tempat berkumpul, berdiskusi dan bahkan sebagai tempat pembagian sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) kepada masyarakat. Hampir semua LSM melihat betapa strategisnya *meunasah* dalam masyarakat, tanpa harus mengeluarkan biaya penyewaan dan sangat mudah dijangkau oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

Banyak bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LSM, namun kelihatannya yang terjadi adalah adanya sebuah ketergantungan masyarakat terhadap LSM yang biasanya memberikan bantuan-bantuan. Sampai saat ini tiga tahun tsunami telah berlalu, masih saja ada masyarakat

---

[13] *Keuchik gampong* Rima Keneurum, dalam wawancara tentang keberadaan LSM di daerahnya dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi *gampong* Rima Keneurum. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2008 di kantor CC, *gampong* Rima Keneurum.

[14] *Children Centre* adalah sebuah lembaga sosial di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Unicef yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi NAD untuk Program *Child Protection* (perlindungan anak) korban tsunami, yang salah satu tempatnya berada di *gampong* Rima Keneurum Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

mengharapkan NGO (*Non Government Organization*) kembali masuk untuk memberikan bantuan kepada mereka. Anehnya sampai ada yang cukup ekstrim dalam menanggapi keberadaan lembaga luar yang hadir di tengah-tengah mereka, dengan mengatakan "yang tidak memberikan bantuan bukan LSM/NGO".[15]

Pada kesempatan yang sama ketika penulis tanyakan tanggapannya tentang keberadaan CC yang masih tetap bertahan bersama masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, Aidarus mengatakan bahwa "CC itu bukan LSM, karena tidak memberikan bantuan". Padahal yang dilakukan oleh CC juga memberikan bantuan walaupun lebih banyak pada pendampingan masyarakat dan aspek pendidikan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lembaga yang datang memberikan bantuan dalam bentuk materi, sehingga sangat disayangkan karena ini mengakibatkan masyarakat menjadi konsumtif dan matinya sifat produktif yang umumnya mereka miliki sebelumnya. Barangkali inilah di antara dampak negatif yang ditimbulkan akibat kehadiran LSM (sering mereka menyebutnya dengan NGO), hal inilah yang menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terganggu, sehingga pada akhirnya menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat pascatsunami berbasis *meunasah* menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya.

B. Meunasah di Masa Tradisional dan Saat Ini

Meunasah dalam lintasan sejarah Aceh telah memainkan perannya yang cukup dominan sebagai lembaga pendidikan maupun institusi adat lokal yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat (*Community Centre*) *gampong*, keberadaannya telah menorehkan perjalanan panjang sejarah Aceh menuju sebuah peradaban yang saat itu pernah menjadi kerajaan Islam lima besar di dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Badruzzaman Ismail (Ketua MAA), fungsi *meunasah* sangat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun demikian nilai-nilai substansi keacehan harus tetap dipertahankan sebagai aset budaya yang tak ternilai harganya. Dinamisnya fungsi *meunasah* dalam kehidupan modern masyarakat Aceh sebagaimana akan diuraikan dalam pemaparan lebih lanjut berikut ini:

Sebagaimana telah penulis ungkapkan pada bab dua sebelumnya, *meunasah* memiliki multi fungsi. Keberfungsiannya tidak mengenal tempat dan waktu, *meunasah* yang hanya dimiliki oleh masyarakat Aceh ternyata tidak hanya terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam saja, tetapi bangunan

[15] wawancara dengan Aidarus, yang menjabat sekretaris *gampong* Rima Keneurum. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2008 di *gampong* Rima Keneurum.

adat ini juga turut dibawa oleh warga Aceh yang merantau diluar Aceh, baik masih di Indonesia maupun diluar negeri seperti di Swedia misalnya, juga terdapat *meunasah* sebagai simbol yang juga merupakan lambang eksistensi warga Aceh berada disana.

Meunasah di Swedia juga tidak jauh berbeda fungsi dan perannya bagi warga Aceh diperantauan tersebut, layaknya di Aceh di sana *meunasah* juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan maupun kebudayaan, juga menjadi gedung serba guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh di perantauan untuk berkumpul dan bersilaturrahmi serta sebagai pusat kegiatan lainnya.[16]

Untuk di dalam negeri penulis belum menemukan referensi yang cukup tentang adanya *meunasah*, namun di Daerah Istimewa Yogyakarta kita mengenal yang namanya *Balee Gadeng* yang bertempat di Sagan, Jln. Kartini No.1A. Keberadaan *Balee Gadeng* memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan *meunasah* di Aceh, di perantauan Yogyakarta Balee Gadeng telah menjadi simbol dan lambang persatuan masyarakat Aceh, walaupun bentuk bangunannya sangat jauh berbeda dengan bentuk *meunasah* yang sebenarnya. Dalam kesempatan ini penulis tidak akan mengupas lebih jauh tentang *Balee Gadeng* maupun *meunasah* yang ada di luar Aceh, khususnya di dalam negeri maupun diluar negeri. Berikut ini kita akan mencoba melihat multi fungsi dari *meunasah* yang menjadi identitas masyarakat Aceh, diantaranya adalah:

1. Meunasah sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat

Masyarakat *gampong* umumnya adalah masyarakat tradisional yang masih berpegang pada adat dan budayanya. Dengan halaman yang luas, akses yang mudah juga fasilitas yang memadai telah menjadikan *meunasah* sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Merunut pada realitas sejarah masyarakat Aceh, ternyata keberadaan *meunasah* di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, seakan-akan adanya sebuah ikatan yang cukup kuat antara masyarakat *gampong* dengan *meunasah*. Dalam masyarakat *gampong* seseorang akan sangat ketakutan sekali jika ia dikeluarkan dari kelompok *meunasah*, bila terjadi pengucilan ini maka ia tidak berarti apa-apa (dianggap tidak ada) lagi di tengah-tengah masyarakat tersebut ungkap Imran Abdullah.[17]

---

[16] www.google.com/meunasah.diaksespadatanggal10November2008.

[17] Prof. Dr. Imran Abdullah adalah seorang Antropolog Aceh yang sekarang menjadi Guru Besar di UGM Fakultas Antropologi, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2009 di Yogyakarta.

Terutama dalam hal kegiatan keagamaan, musyawarah *gampong* atau *duek pakat gampong*, serta berbagai kegiatan lainnya yang dilaksanakan disebuah *gampong*. Keberadaan perangkat *gampong* memiliki peran yang cukup besar, dan cukup dihormati oleh masyarakat, dan biasanya para tokoh tersebut cukup aktif di *meunasah*, sehingga kalau ada anggota masyarakat (apalagi masyarakat yang baru menjadi warganya) yang tidak hadir dalam berbagai kegiatan di *meunasah*, maka ia akan dikucilkan di dalam masyarakat. Pengucilan ini menjadi sangat ditakuti oleh masyarakat, artinya hukuman yang diberikan berupa sangsi sosial ternyata mampu menjadikan *meunasah* sebagai sentral kegiatan masyarakat.

Dulu, orang yang tidak terlibat dalam kegiatan di *meunasah* dianggap kurang gaul atau dalam istilah lain disebut *"hana roeh lam kawan"*,[18] ini terjadi pada semua umur. Anak-anak juga menghabiskan sebagian besar waktu bermainnya di *meunasah*, para remaja juga demikian termasuk orang dewasa juga menghabiskan waktu luangnya sambil istirahat di *meunasah*. Yang menarik disini adalah antara anak-anak, remaja dan orang dewasa memiliki tempat sendiri-sendiri di *meunasah,* misalnya; anak-anak bermain di halaman maupun di lantai dasar *meunasah*, remaja mengambil posisi di belee yang tersedia juga di dalam komplek *meunasah*, demikian juga dengan orang dewasa juga mengambil tempat di salah satu fasilitas yang telah tersedia baik rangkang di bawah pohon besar yang umumnya rindang maupun di *meunasah*-nya sendiri.

Menjadi hal yang aneh dalam adat orang Aceh jika antara menantu dengan mertua duduk bersama sambil bercanda-ria di suatutempat,demik ianjugaantaraayahdananak-anaknya(kecuali anak perempuan), juga antar umur yang berbeda (misalnya antara anak-anak dengan orang dewasa/ remaja). Walaupun demikian penghormatan antar generasi tersebut cukup baik terjaga, samasama saling menjaga, menghormati dan menghargai satu sama lain. Demikian juga dengan kepatuhan pada hal-hal baik yang dianjurkan oleh generasi di atasnya, termasuk sopan santun terjaga dengan baik. Ini semua tidak terlepas dengan fungsi *meunasah* tadi yang menjadi wahana berkumpul dan terjadinya kontrol sosial yang tinggi terhadap prilaku sesama mereka, selain itu *meunasah* juga menjadi lambing pemersatu bagi masyarakat *gampong*.

2. Meunasah Sebagai Pusat Keagamaan

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan syariat Islam. Konflik yang

[18] Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Imran Abdullah pada tanggal 16 Januari 2009 di Yogyakarta.

berkepanjangan telah menyisakan trauma yang mendalam dan telah merusak tatana kehidupan masyarakat, setelah runtuhnya kerajaan Aceh pada masa penjajahan (walaupun Aceh tidak pernah menyerah kepada belanda), kemudian bersama-sama republik (Indonesia) melanjutkan perjuangan merebut kemerdekaan (1945), kemudian dilanjutkan lagi dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII), yang ditambah lagi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari tahun 1973[19] untuk menuntut kemerdekaan kepada pemerintah pusat (RI) karena dianggap telah menjajah Aceh. Itu adalah sekelumit kisah yang telah menyita tenaga dan fikiran kita semua yang seharusnya dapat membangun Aceh secara bersama-sama. Baru pada tanggal 15 Agustus 2005 perdamaian Aceh dapat dirasakan sampai saat ini.

Sejarah kelam tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk keagamaan, dengan adanya konflik yang berkepanjangan juga telah berpengaruh pada kegiatan keagamaan di sebuah *gampong* yang pada umumnya dipusatkan di *meunasah*. Pada saat penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 dan Darurat Militer di Aceh dari tahun 2003 sampai tahun 2004, kehidupan masyarakat menjadi tidak menentu, tidak boleh berkumpul misalnya, setiap kegiatan dicurigai, serta adanya kewajiban untuk jaga malam yang telah menyita waktu dan tenaga masyarakat, sehingga ini menjadi masalah tersendiri yang turut memperparah kondisi yang ada.

Idealnya *meunasah* sebagai pusat kegiatan keagamaan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya. Namun pascatsunami, denyut kehidupan di *meunasah* mulai berdenyut kembali; termasuk salah satunya adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara meriah di *meunasah*, misalnya pelaksanaan *kenduri molod* (memperingati Maulid Rasul), peringatan Isra' dan Mi'raj, Nuzul Qur'an, Shalat berjamaah baik yang wajib maupun yang sunat (shalat lima waktu, shalat tarawih, shalat idul fitri dan idul adha, maupun shalat sunat qabla dan ba'da shalat wajib).

3. Meunasah Sebagai Tempat Pendidikan

Pada abad ke-XVI Aceh sudah dikenal di berbagai belahan dunia dengan Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan pada saat itu sudah mengakui

[19] Secara umum mengenai pecahnya perlawanan GAM ditandai dengan deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimun, Tiro Aceh. Penulis melihat dengan kepulangan Teuku Hasan Tiro pada tahun 1972 sebagai awal gerakan perlawanan yang dilakukan, sehingga penulis sangat yakin sekitar tahun 1973 konflik bersenjata kembali mulai meletus di Aceh, yang kemudian memuncak pada saat di deklarasikannya GAM untuk memerdekakan Aceh.

eksistensi *meunasah* sebagai bagian tidak terpisahkan dari kemajuan yang telah diperoleh. Setidaknya kerajaan pada saat itu telah mengakui keberadaan *meunasah* sebagai salah satu instrument penting dari dunia pendidikan yang sangat tersohor pada saat itu. *Meunasah* disejajarkan dengan Sekolah Dasar yang telah banyak mengantarkan begitu banyak orang untuk mengecap pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, seperti di surau atau masjid dan di dayah serta di *ma'had ali* atau *dayah teungku tjhik* yang setingkat dengan pendidikan tinggi atau akademi.

Saat ini kedudukan *meunasah* sebagai tempat pendidikan masih dapat dirasakan oleh masyarakat, walaupun intensitas pemanfaatan *meunasah* sebagai tempat pendidikan cenderung mengalami penurunan. Di beberapa *gampong*, termasuk di Rima Keneurum masih menjadikan *meunasah* sebagai tempat pendidikan. Hasanudin Yusuf Adan[20] mengatakan bahwa; Peran *meunasah* masih sebagai lembaga pendidikan di Aceh, walaupn kondisi ini sudah mulai berkurang karena telah banyak tergantikan oleh hadirnya lembaga pendidikan formal maupun non-formal lainnya. Hal ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum dan pascatsunami, yang disebabkan akibat sistem pendidikan yang tidak lagi tertumpu di *meunasah*, sehingga pendidikan beralih ke sekolah formal (juga dayah dan pesantren).

Namun secara umum kita masih dapat menyaksikan peran *meunasah* sebagai tempat terjadinya *transfer of knowledge* atau transformasi ilmu pengetahuan, khususnya keagamaan ilmu yang berbasiskan agama sampai saat ini masih tetap berlangsung di *meunasah* sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tgk. M. Yusuf[21] bahwa "pengajian untuk ibu-ibu di *meunasah* Rima Keneurum sampai hari ini masih tetap bertahan", belum lagi kegiatan pelatihan lainnya dalam skala kecil menengah yang sering menggunakan *meunasah* sebagai media, tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang begitu besar.

4. Meunasah Sebagai Pusat Sosial-Kebudayaan

Meunasah sampai saat ini masih menjadi tempat sentral masyarakat *gampong*, setiap kegiatan yang menyengkut dengan hajat hidup orang banyak dilaksanakan di *meunasah*. Kegiatan sosial kebudayaan masih saja tetap mengandalkan *meunasah* sebagai medianya, acara *dikee*, *dalail khairat, pembagian zakat fitrah* misalnya masih menggunakan *meunasah* sebagai tempat yang dianggap paling strategis.

[20] Tokoh masyarakat Aceh yang peduli dengan dunia pendidikan, juga sebagai pengamat Budaya Aceh. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kampus IAIN Ar-Raniry. Fakultas Syariah tempat beliau mengabdi.

[21] Tgk. M.Yusuf adalah alumni dayah yang menjadi ustazh di pengajian ibu-ibu di gampong rima keneurum. Beliau juga telah menetap menjadi warga masyarakat di sana.

Dalam hal ini penulis agak sulit dalam membedakan antara kehidupan sosial budaya dengan kehidupan keagamaan, mengingat antara adat/ budaya dengan agama/hukum sudah tidak dapat dipisahkan "*adat ngoen hukom lage zat ngoen sifeut*" (antara adat/ budaya dengan hukum/agama, bagaikan zat dengan sifatnya), sudah menyatu padu antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial. Atau barangkali sudah terjadinya islamisasi budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kehidupan sosial masyarakat Rima Keneurum tidak lepas dengan *meunasah*, misalnya *meunasah* tidak pernah kosong sama sekali (tidak ada hari yang tidak ada orang di *meunasah*), walaupun hanya datang sebentar untuk istirahat, melaksanakan shalat atau hanya sekedar untuk berbicara dengan sesama masyarakat disana. Penulis menyimpulkan berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil observasi maupun wawancara dengan masyarakat *gampong* Rima Keneurum[22] bahwa *meunasah* masih tetap sebagai sebuah bangunan yang memiliki daya tarik tersendiri yang menyebabkan orang mau datang ke sana. Hal ini terbukti, jika mau dilaksanakannya sebuah efen kegiatan maka *meunasah* selalu saja menjadi salah satu tawaran tempat yang tidak menimbulkan kontrofersi, walaupun masih banyak pilihan tempat lainnya yang dianggap juga layak.

Berbeda dengan pada masa sebelum tsunami, untuk kegiatan apapun selalu menjadikan *meunasah* sebagai pusat kegiatan, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imran Abdullah bahwa; "dulu kurangnya pilihan tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan dan yang paling mungkin dilakukan adalah mengambil tempat di *meunasah*".[23] Dewasa ini, kalangan luar juga sudah menyadari akan eksistensi *meunasah* dalam masyarakat Aceh sehingga sering sekali memanfaatkan bangunan institusi lokal ini sebagai media untuk mengumpulkan masyarakat dalam berbagai kegiatannya. Ini menjadi bukti kongkrit betapa *meunasah* telah menjadi instrument penting dalam perjalanan kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, khususnya dengan semakin digalakkannya semangat dalam mempertahankan nilai budaya lokal untuk menghadapi tantangan dunia global, dan *meunasah* menjadi identitas dari kebudayaan Aceh itu sendiri.[24] Badruzzaman Ismail

[22] Observasi dilakukan dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008, dalam melakukan observasi penulis juga dibantu oleh dua orang teman (warga *gampong* Rima Keneurum, yaitu Ikhsan dan Mahyud) untuk menjaga keakuratan data.

[23] Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2009 di kediaman Prof. Dr. Imran Abdullah, Sleman Yogyakarta.

[24] Senada dengan yang disampaikan oleh Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kantor MAA Banda Aceh, Beliau juga sebagai akademisi yang saat ini mengajar di UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Unsyiah di Fakultas Hukum, Darussalam Banda Aceh.

mengatakan dengan lebih tegas bahwa "simbol ke-Acehanpun tidak boleh hilang, karena itu adalah identitas kita yang menjadi nafas kebudayaan sebuah peradaban Bangsa".

5. Meunasah Sebagai Basis Perekonomian

Kehidupan modern dewasa ini telah melahirkan berbagai tempat dan fasilitas yang lebih menspesifikasikan aturan dan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, sehingga banyak konsentrasi masyarakat sudah beralih ke spesifikasinya masing-masing. *Meunasah* dulu pernah menjadi pusat segala kegiatan masyarakat *gampong*, namun kini sudah tidak demikian nyatanya. Selain kegiatan sosial budaya, yang menyangkut dengan kegiatan ekonomipun tertumpu di *meunasah*. Tidak salah ungkapan Badruzzaman Ismail yang mengatakan bahwa *meunasah* sebagai ibukotanya *gampong*, dalam kehidupan masyarakat tradisional *gampong*; *meunasah*-pun menjadi pusat perekonomian warga saat itu.

Transaksi sapi, sawah, bahkan kebutuhan rumah tanggapun juga terjadi di halaman *meunasah*. Pada masanya, itu adalah fakta sejarah gerakan ekonomi berangkat dari *meunasah* sebagai buah dari kompromi dagang yang kemudian menimbulkan kesepakatan-kesepakatan untuk urusan dagang atau jenis usaha yang lainnya. *Meunasah* sebagai basis perekonomian adalah sebagai sebuah simbol pergerakan masyarakat *gampong* yang memulai gerakannya berawal dari semangat nilai-nilai religiusitas yang dimiliki oleh *meunasah*.

Nilai sakral yang dimiliki oleh *meunasah* sebagai sarana umum masyarakat, pada akhirnya mempertemukan antara orang miskin dan orang kaya, demikian juga antara para pekerja keras dengan pengangguran yang barangkali belum mendapatkan pekerjaan. Dengan intensifnya pertemuan dan dalam sebuah ikatan sesama warga masyarakat, maka diharapkan timbulnya kesadaran kolektif untuk membantu sesama, dalam konteks ini tentunya besar harapan terbukanya peluang peningkatan taraf kehidupan yang dapat mengangkat derajat pihak yang kurang beruntung akibat ketidakmampuan secara keuangan atau finansial.

Kiranya dengan penjelasan di atas dapatlah memberikan gambaran, bahwa adanya nilai-nilai lokalitas yang terkandung dengan berkumpulnya masyarakat di *meunasah* pada gilirannya akan membawa perubahan dalam sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat *gampong*. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang terkandung dalam bangunan *meunasah*, sehingga menjadi salah satu ciri khas masyarakat Aceh di manapun ia berada.

6. *Meunasah* Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Meunasah di Aceh juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, misalnya adanya pembagian zakat yang dilakukan di *meunasah* dan kegiatan pelatihan keterampilan (*life skill*) serta pembukaan akses dengan pihak luar untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan sosial lainnya untuk memberdayakan masyarakat juga sering dilaksanakan di *meunasah*, seperti pembagian bantuan modal usaha. Pemberdayaan dalam bentuk yang lain seperti santunan untuk golongan kurang mampu serta adanya berbagai acara kenduri (syukuran) sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat Allah swt.

Kaitannya dengan kegiatan kenduri adalah adanya sebuah pernyataan menarik yang disampaikan oleh Imran Abdullah tentang angka kemiskinan di Aceh, Imran mengatakan bahwa "di Aceh tidak ada masyarakat miskin", ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut tentang makna dibalik pernyataan tersebut. Ternyata dalam budaya Aceh sering diadakan *kenduri* atau syukuran, di dalam kegiatan itu orang yang dianggap kurang mampu selalu mendapatkan undangan untuk menyantap makan yang dihidangkan, dan tidak jarang mereka selain datang sebagai undangan juga sebagai pekerja. Sehingga jika perspektif kemiskinan dilihat karena tidak pernah atau jarang makan makanan yang enak-enak, maka masyarakat Aceh tidak ada yang miskin. Kenduri sering sekali diselenggarakan oleh masyarakat, yang kesemuanya dikaitkan dengan rasa syukur dan kedekatan hamba kepada Allah SWT sang pencipta.

Ada istilah dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan '*keurija hudep, keurija matee*' ini bermakna kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan senang dan susah. Istilah '*keurija hudep*' dalam keadaan senang, misalnya pesta pernikahan, syukuran siap panen buah-buahan, syukuran bertambahnya anggota keluarga, '*peusunat aneuk*' atau sunat rasul dan lainlain. Demikian juga '*keurija matee*' ini dilakukan bila mendapat musibah seperti adanya keluarga yang meninggal, kecelakaan berat dan ringan dengan cara *peusijuek*[25]. Intinya yang ingin penulis sampaikan adalah dalam masyarakat Aceh susah dan senang tetap mengadakan *kenduri* sebagai rasa syukur terhadap Allah,[26] ini juga mengandung makna

[25] Ditepung tawari, yang diiringi dengan doa-doa agar musibah tidak lagi menimpa. Ini merupakan warisan budaya hindu yang tatacaranya telah diislamkan sebagai buah dari akulturasi budaya lama dengan nilainilai ajaran Islam. Kegiatan ini juga bisa bermakna ucapan syukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan, dan juga sebagai simbol untuk memohon keselamatan serta agar dijauhkan dari bahaya yang menimpa atau dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, yang semuanya tertuju kepada Allah penguasa alam semesta.

[26] Rasa syukur terhadap pemberian Allah menjadi salah satu kekuatan besar yang dimiliki

bahwa kenduri sarat akan nilai-nilai religius. Hal ini menurut penulis agak berbeda dengan budaya dalam masyarakat Jawa yaitu '*mangan ora' mangan seng penteng ngumpul*' lebih kurang kalau dibahasa indonesiakan bermakna 'makan tidak makan yang penting kumpul'.

oleh masyarakat Aceh dalam menghadapi segala kondisi, sesenang apapun dan juga sesedih apapun tetap dihadapi dengan rasa syukur dengan penuh kesabaran. Diantara beberapa contoh prilaku masyarakat yang merupakan wujud rasa syukur adalah saat menyambut kelahiran bayi, pelaksanaan sunat rasul, pesta pernikahan, menempati rumah baru. Demikian juga dengan kesusahan juga dihadapi dengan penuh rasa syukur seperti acara kematian, kebakaran, kecurian barang berharga bahkan sampai pada bencana alam sekalipun juga diperingati dengan rasa syukur yang secara umum mereka mengadakan acara kenduri selain juga mengadakan penyampaian doa baik secara bersama atau secara individu. Rasa syukur yang muncul menjadi bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sekaligus mengambil hikmah dibalik semua peristiwa yang terjadi, baik senang maupun susah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pemberdayaan terhadap masyarakat di *gampong* Rima Keneurum banyak pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dengan BRR-nya maupun pihak *Non Gaverment Organization* (NGO) baik lokal, nasional maupun Internasional. Kesemuanya bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat yang hancur akibat tsunami. Masyarakat Aceh yang memiliki budaya lokal dan pernah mencapai kegemilangannya pada masa kesultanan Aceh, diyakini akan mampu untuk bangkit dari keterpurukan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal (*local wisdom*)-nya, keberadaan *meunasah* sebagaimana penulis kutip dalam beberapa literatur ternyata memiliki peran yang sangan dominan dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh, terutama sekali pada masa kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya.

Pada setiap *gampong* di Aceh --kecuali pada beberapa daerah tertentu- terdapat *meunasah* yang selalu tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Secara fisik, *meunasah* merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah *gampong* atau di suatu tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh warga maupun pemakai *meunasah* yang bukan warga setempat.

Meunasah yang dulunya memiliki multi fungsi yaitu sebagai: pusat kegiatan masyarakat, pusat keagamaan, tempat pendidikan, pusat sosial-kebudayaan, basis perekonomian dan pusat pemberdayaan masyarakat. Pascatsunami fungsi *meunasah* sudah mulai bergeser dan bahkan hilang, hal ini disebabkan banyak faktor di antaranya telah banyaknya fasilitas atau bangunan lain yang mulai dan atau telah menggeser peran dan fungsi *meunasah* dalam masyarakat. Yang masih tetap bertahan diantaranya adalah *meunasah* sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial dan budaya;

dalam bidang inipun sudah mulai berkurang yang diakibatkan banyaknya berdiri *dayah* atau pasantren, balai pengajian dan bangunan adat lainnya, yang memiliki peran dan fungsi hampir sama dengan *meunasah*.

Selain itu dibidang pendidikan, peran *meunasah* juga masih dapat dirasakan oleh masyarakat di *gampong* Rima Keneurum, sementara itu selain dari yang telah penulis sebutkan di atas sudah mulai berkurang bahkan hilang fungsi dan peran *meunasah* yang dulunya cukup dominan dalam kehidupan masyarakat *gampong*.

Meunasah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur masyarakat *gampong* di Aceh. Keberadaanya selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sentral sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat. *Meunasah* adalah sentral dari segala bentuk kegiatan bagi masyarakat *gampong*, karenanya *meunasah* mempunyai fungsi sebagai tempat membaca Al-Qur`an dan pelajaran lain layaknya sekolah dasar, sebagai tempat shalat lima waktu, sebagai tempat shalat tarawih dan tempat membaca Al-Qur`an bersama-sama diwaktu malam pada bulan Ramadhan, tempat *kenduri* (syukuran) di bulan Maulid, sebagai tempat menyerahkan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri, tempat mengadakan perdamaian saat terjadi sengketa antara masyarakat *gampong*, tempat bermusyawarah dalam segala urusan, tempat bermain bagi anak-anak, pusat beraktifitas remaja dalam berbagai kegiatan, dan tempat mengembangkan akhlak serta wacana keislaman bagi segenap masyarakat. Selain itu *meunasah* juga dapat difungsikan seluas-luasnya, meliputi segenap aktifitas masyarakat *gampong*.

Dengan hadirnya banyak pihak dalam proses pemberdayaan masyarakat di *gampong* Rima Keneurum dan keberadaan *meunasah*, semestinya mampu membawa perubahan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan yang diidam-idamkan bersama, yaitu masyarakat *Baldatun Thaiyyibatul Warabbul Ghafur* atau lebih dikenal dengan masyarakat madani, *Mawaddah Wa Rahmah*.

Sebelum gelombang tsunami melanda Aceh, keberadaan *meunasah* juga sudah mulai kehilangan pengaruh dan perannya dalam masyarakat, yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan yang melanda Aceh, dan ditambah lagi dengan tsunami sehingga lengkaplah ketidakberdayaan masyarakata di Aceh. Dalam posisi seperti inilah banyak pihak mencoba melihat kembali makna *meunasah* bagi masyarakat Aceh, terutama kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beranjak dari kesadaran tersebut maka dalam beberapa kegiatan yang dibuat di tengah-tengah masyarakat baik oleh pemerintah ataupun NGO kembali

memanfaatkan *meunasah* sebagai media dalam berbagai kegiatannya, yang biasanya berupa kegiatan musyawarah, pelatihan-penyuluhan dan kegiatan penyaluran bantuan untuk korban tsunami.

Proses pemberdayaan yang dilakukan di *gampong* Rima Keneurum kurang melibatkan masyarakat sebagai aktor perubahan di dalamnya, masyarakat cenderung dijadikan sebagai objek yang akan diubah sehingga dalam program yang dilakukan oleh lembaga membuat mereka merasa bahwa jiwanya tidak hadir di sana, padahal keunikan kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan yang dijalankan oleh lembaga. Selain itu program dari lembaga lebih banyak bersifat *carity,* berupa pemberian yang setelah dibantu kemudian habis tidak meninggalkan bekas, meskipun namanya adalah program pemberdayaan masyarakat.

Adanya kesan bahwa pihak donatur atau lembaga pemberi bantuan tidak serius, telah menambah rumitnya permasalahan yang dihadapi dalam melakukan proses pemberdayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lebih pada pencapaian program yaitu, dana berhasil diserap sepenuhnya oleh masyarakat dampingan dan mereka bisa mempertanggungjawabkannya kepada pihak manajemennya berarti mereka sudah berhasil. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sikap konsumtif warga yang semakin tinggi akan mendatangkan ketergantungan kepada lembaga. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa dana yang ada pada lembaga yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah milik mereka, sementara lembaga hanya bertugas untuk mendistribusikannya ke warga.

Pemberdayaan terhadap masyarakat pascatsunami khususnya di *gampong* Rima Keneurum dan umumnya Aceh mengalami nasib yang hampir sama, yaitu banyak yang mubazir, tidak tepat sasaran, maupun penanganan yang kurang tepat sehingga dalam pencapaian hasil juga tidak begitu memuaskan. Namun demikian, semua pihak yang terlibat punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Banyak hal yang telah dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh, khususnya di *gampong* Rima Keneurum tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu.

B. Saran

Dari beberapa analisis, faktor yang menjadi acuan dalam penelitian tesis yang kemudian menjadi buku ini serta kesimpulan yang telah penulis rangkumkan di atas, maka ada beberapa hal yang kiranya perlu penulis rekomendasikan, sebagaimana tertuang berikut ini.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pascatsunami berbasis *meunasah*, hanya mengambil sampel di salah satu *gampong* yang terkena

tsunami di Aceh, padahal masih banyak *gampong* lain yang juga perlu untuk diteliti. Akibat dari keterbatasan tersebut pencapaian hasilnya-pun belum mampu memberikan gambaran maksimal, tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pascatsunami berbasis *meunasah* yang sebenarnya di seluruh Aceh. Dalam hal ini penulis berharap akan adanya penelitian lanjutan dalam skala yang lebih luas, sehingga hasil yang dicapai akan maksimal dan konprehensif sebagai pijakan bagi para pengambil kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya pengembangan dan memajukan sebuah peradaban untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam pemberdayaan masyarakat *gampong* ke depan, kepada pihak-pihak terkait hendaknya untuk lebih memperhatikan lagi keterlibatan masyarakat dan membuka peluang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi aktif semenjak dari perencanaan hingga tahapan pelaksanaan program kegiatan. Institusi lokal (seperti *meunasah*) dan adat-istiadat masyarakat setempat juga harus mendapat perhatian yang lebih, sehingga kekuatan lokal (*social capital*) dapat dibangkitkan untuk samasama membangun masyarakat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas,* Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002.

_____, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas,* Edisi Revisi, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2003.

Amiruddin, Hasbi, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Cet. 2, Lhokseumawe-Aceh: Nadiya Foundation, 2007.

_____, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Afadlal, dkk, *Runtuhnya Gampong di Aceh; Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008.

Alfian, T. Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

_____, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008.

Consuelo G. Sevilla dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993.

Daftar Desa/Kelurahan per-Mukim, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/Peukan_Bada,_Aceh_Besar, diakses pada 12 April 2009.

Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989. Djalil, Muslim A. *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi X, 2008. Kanwil Depag NAD.

_____, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi I, 2009. Kanwil Depag NAD.

_____, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh; Periode 1520-1675 M*, Majalah Santunan Jadid, edisi XI, 2008. Kanwil Depag NAD.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi: Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasjmy, Ali, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam: Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1980.

_____, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang RI No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung: Fokusmedia, 2006.

Hurgronje, Snouck, *Aceh Di Mata Kolonialis*, jilid I, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

Ibrahim, Farid Wajdi, *Reformasi Pendidikan Islam di Aceh*, dalam: Jurnal Ar-Raniry, edisi Sept. 2001-Febr. 2002, No. 79, Darussalam Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2002.

Idris, Safwan. *Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah, antara Tradisi dan Pembaharuan, dalam Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995.

Ismail, Badruzzaman. *Kedudukan Meunasah dan Masjid Dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh,* dalam: www.google.com/*meunasah*. Di akses pada tanggal 04 Juli 2008.

_____, *Masjid dan Adat Meunasah* sebagai *Sumber Energi Budaya*

Aceh, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

_____, dkk, dalam: *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.

Ismail, Fauzi, *Peran Imeum Meunasah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Hasil Penelitian, Banda Aceh: PPISB Unsyiah, 2003.

Jane C. Ollenburger dan Helen A. More, *A Sociology of Women: The Intersection of Patriachy, Capitalism, and Colonialism*, New Jersey: Prentice Heall, 1992.

Jim Ife, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development*, terj. Sastrawan Manullang (eds), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*, Second Edition, London: Macmillan Press, 1997.

Masrizal*, Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015.

MediaIndonesia(Senin,11Juli2005),*Pasca Tsunami Penduduk Miskin di Aceh Bertambah,* dalam http://www.acehrecoveryforum.org/ id/ index.php?action=NewsUpdate&no=2946, diakses pada tanggal 18 April 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. 21, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mubarok, M. Mufti. *Duka Aceh, Tsunami dan Solidaritas Dunia*, Surabaya: Java Pustaka, 2005.

Nur, Aslam. *Ramadhan dalam Persepsi Masyarakat Aceh*, *sebuah Interpretasi Antropologi*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh, 1996.

Pemda Aceh Besar. *Qanun* Kabupaten Aceh Besar, No. 08 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Gampong.* Aceh Besar: Pemda Aceh Besar Press, 2006.

_____, *Populasi dan Kegiatan Ekonomi Dikecamatan Peukan Bada*, dalam: www.acehbesarkab.go.id/acehbesar, diakses pada 14 Agustus 2008.

Pemda Aceh, *Penduduk Miskin di Provinsi NAD Tahun 2005-2007Mengalami Penurunan,* (02 Agustus 2007) dalam http://www.nad.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=2960&Itemid=2, diakses pada tanggal 18 April 2009.

Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD*, edisi. II, Banda Aceh: Biro Pemerintahan Sek-Prov. NAD, 2005.

Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sabirin, *Peran Meunasah Dalam Pengembangan Masyarakat; Studi di Kabupaten Aceh Besar,* Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam Fakultas Dakwah, 2007.

_____, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Tsunami Berbasis Meunasah,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi, *Perpaduan Adat dan syariat islam di A*ceh, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Sufi, Rusdi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

_____, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.

_____, *Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*, dalam www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008.

Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Suny, Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980.

Supartini, *Program Pemberdayaan Pekerja Seks*, *studi evaluasi terhadap implementasi program pemberdayaan pekerja seks di komplek Pasar*

Kembang Sostrowijayan Kulon Kecamatan Gedong Tengen Kotamadya Yogyakarta, Tesis, Jakarta: UI, 1998.

Sutoro Eko, dkk, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong,* Yogyakarta: IRE Press, 2007

Syihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Set. Ke-10, Mizan, 1995.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, tt. Tripa, Sulaiman, dalam: www.acehinstitute.org/*meunasah*, di akses pada tanggal 3 Juli 2008.

_____, *Meunasah, Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh,* dalam: www.Gogle.com/*meunasah*. Di akses pada tanggal 04 Juli 2008.

Tsunami Dan Perdamaian Aceh, dalam: www.koalisi-ham.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=38, diakses 27 Agustus 2008.

Umar, Muhammad, *Darah dan Jiwa Aceh; mengungkap Falsafat Hidup Masyarakat Aceh,* Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

Usman, A. Rani, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Wrihatnolo Randy R., D. Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

Yunus, Muhammad, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat,* Yogyakarta: ArRuzz Media Group, 2007.

BIOGRAFI PENULIS

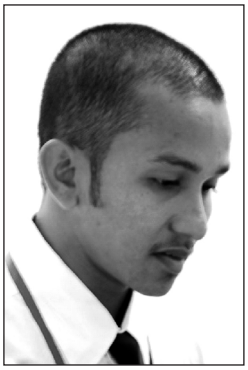

Sabirin, S.Sos.I., M. Si. Lahir di Aceh Besar, 27 Januari 1984. dengan alamat email: sabirin.aceh@gmail.com, menempuh pendidikan Formal S1 di Jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam), Fak. Dakwah & Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Kemudian melan-jutkan S2 Konsentrasi Pekerjaan Sosial (*Social Work*), Jurusan IIS (*Interdisciplinary Islamic Studies*), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat ini tengah menyelesaikan Doktoral di Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang Malaysia, Jurusan *Social Work*. Selain sebagai Dosen UIN Ar-Raniry, penulis juga dipercayakan sebagai ketua laboratorium Jurusan PMI-Kesos pada Fakultas yang sama (2011-2013). Kegiatan lainnya sebagai pegiat LSM, juga Pemerhati dan Peneliti Masalah Sosial Kemasyarakatan.

Berbagai pelatihan jarang penulis lewatkan, seperti di Hmi, PII, *Training of Trainer; Abuse, Exploitation and Trafiking*, Pelatihan Advokasi terhadap pelanggaran Hak Anak, *Training of Trainer; Parenthood Education*. Pelatihan Filsafat Islam I, II, III, dan Filsafat Hikmah, di Yogyakarta. Seminar dan Kuliah Budaya Sehari bersama Prof. Irwan Abdullah. Pelatihan *In Service Training For Program Development*. Pelatihan Mediasi untuk Akademisi, Pelatihan *Winning Writing Proposal*, dan berbagai pelatihan lainnya.

Pengalaman menarik lainnya di berbagai organisasi sejak di bangku kuliah hingga saat ini, diantaranya: Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Aceh, (2003-2004). Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid

Indonesia, Aceh Besar. Ketua II Rabithah Thaliban Aceh, Aceh Besar (2004-2007). Sekretaris Umum PD PII Aceh Besar (2005-2006). Pekerja Sosial Walsama (Wahana Amal Sesama Makhluk Allah) 2005-2007. *Social Worker Children Center* Peukan Bada (Unicef-Dinsos NAD, 2005-2007).

Direktur Eksekutif LPU (Lembaga Pengembang Ummat) Aceh 2007-2012. Koord. Divisi Pengembangan Intelektual HIMPASAY (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta), 2008-2009. Wakil Sekretaris Koniry (Korp Alumni IAIN Ar-Raniry) Kabupaten Aceh Besar, 2009-2012. Direktur Rumah Pusat Perlindungan dan Kreatifitas Anak (RPPKA) "WALYATAMA" Aceh, 2009-2011. Ketua Panitia Training Nasional *Restorative Circle*, Kerja sama Nuffic, The Netherlands, Walisongo *Mediation Center* (WMC) IAIN Walisongo Semarang dan *Center of Conflict Resolution and Peace Studies* (CCRPS) IAIN Ar-Raniry 2010. Sekretaris IV Pengurus Besar Rabithah Thaliban Aceh (PB-RTA), 2011-2013, dan Ketua I PB-RTA, 2013-2014. Anggota Tim Persiapan Perubahan Status IAIN ke UIN Ar-Raniry, 2011-2013. Sekretaris III Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW-HUDA) Kab. Aceh Besar (2011-2016), Katua Yayasan Blang Bintang (2012-sekarang).

Pernah terlibat dalam beberapa penelitian diantaranya: Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ummat di Aceh, Peranan Zakat dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial di Aceh Besar, *Building Capacity* Dosen dalam Penguatan dan Pengembangan Program Studi di Lingkungan IAIN Ar-Raniry, dan Pemberdayaan Masyarakat Pascakonflik Berbasis Meunasah.

Beberapa karya ilmiah berupa Buku; *Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Aceh Pascatsunami* (Bunga Rampai Himpasay; 2009). *Media Sosialisasi Syariat Islam* (2011). Dan beberapa artikel diantaranya; *Penguatan Kapasitas Keagamaan Masyarakat Aceh Melalui Meunasah*, (Proseding Nasional), Pemberdayaan Masyarakat Pascakonflik Berbasis *Meunasah*, (International Proceding), *Pembangunan Sosial dan Pembangunan Manusia*, (Jurnal PMI Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Suka, Yogyakarta). *Pembangunan Sosial Berbasis Masyarakat Daerah Tsunami* (Jurnal PMI Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Suka, Yogyakarta). *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat* (Jurnal Al-Bayan Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry). Semoga Allah swt masih memberi kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya, amin.

"Praktek pemberdayaan yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan dan kekuatan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat benar-benar berdaya dan menjadi subjek atas kegiatan pemberdayaan tersebut. Di sinilah pentingnya wacana pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal."

Miftachul Huda, M. Si
(Penulis buku *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial sebuah Pengantar*)

"*Meunasah* sebagai institusi dan sumber daya sosial memiliki peran strategis bagi pemberdayaan masyarakat, terutama meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana Tsunami. Penulis mampu menyajikan ulasan bernas namun kritis bagi revitalisasi Meunasah sebagai kekuatan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Buku ini wajib dimiliki bagi para pekerja sosial dan lembaga kemanusiaan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan."

Untung Tri Winarso, M.Si
(Office Director Perkumpulan Lingkar, Yogyakarta)

"Banyak orang menulis tentang kearifan lokal (*local wisdom*), namun anda tak akan mendapatkan semenarik buku ini, khususnya mengenai pentingnya pelibatan dan pemahaman nilai kearifan itu dalam pemberdayaan masyarakat."

Saifuddin Bantasyam, SH., MA
(Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Aceh)

"Di tengah miskinnya literatur tentang praktek-praktek pengembangan masyarakat yang berbasis lokal keIndonesiaan, kehadiran buku ini memberi kontribusi yang signifikan. Dengan mengangkat *meunasah* sebagai institusi penting masyarakat Aceh, penulis yang juga putra Aceh asli, memaparkan dengan detail bagaimana pengadopsian nilai dan sumber daya lokal merupakan media efektif untuk upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat."

Ro'fah, Ph.D.,
Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS)
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ISBN 978-602-9276-52-7

Scanned by CamScanner